

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dapat terselesaikan.

Penyampaian LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan kewajiban Kepala Daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan penyusunannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Secara substansi, pokok-pokok materi yang dituangkan dalam LKPJ ini merupakan hasil evaluasi dan refleksi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kudus selama satu tahun anggaran dengan tolok ukur kinerja berdasarkan pencapaian target pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2022. Muatan dalam LKPJ disamping hasil penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga di dalamnya termuat hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Kudus atas kerjasama yang telah terbina selama ini dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kudus, demikian pula disampaikan apresiasi untuk segenap jajaran Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus atas kerja kerasnya dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kudus.

Kudus, Maret 2023
BUPATI KUDUS

Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
BAB I.....	
PENDAHULUAN	
1.1 DASAR HUKUM	
1.2 VISI DAN MISI BUPATI KUDUS.....	
1.3 DATA UMUM DAERAH	
1. Data Geografis Wilayah.....	
2. Jumlah Penduduk	
3. Pertumbuhan Penduduk	
4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil	
5. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan	
6. Realisasi belanja menurut jenis belanja	
7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.....	
BAB II.....	
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
2.1 KEBIJAKAN UMUM	
2.2 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
2.3 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN.....	
2.4 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).....	
2.5 DANA TRANSFER	
2.6 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.....	
2.7 ANGGARAN DAN REALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PER URUSAN	
2.8 PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGELOLAAN KEUANGAN.....	
BAB III.....	
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	
3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
RINGKASAN URUSAN WAJIB RINGKASAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR.....	
3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	
3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	
1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.....	
2. Dinas Kesehatan.....	
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4. Dinas PKPLH	
5. Dinas Sosial P3AP2KB	
6. Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	
6. Dinas Perhubungan	
7. Dinas Pertanian dan Pangan.....	
8. Dinas Perdagangan	
10. Dinas Komunikasi dan Informatika.....	

11.Dinas Kkebudayaan dan Pariwisata.....	
12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	
13.Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil.....	
14.Satuan Polisi Pamong Praja	
15.Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
16.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
17.Badan Pngelolaan Pendapatan dan Aset DAerah.....	
18.Bagian perekonoian Setda	
BAB IV.....	
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN	
PENUGASAN.....	
4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN	
4.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN	
TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN.....	
BAB V.....	
PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Kudus Tahun 2022, yang juga merupakan implementasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 untuk proyeksi tahun keempat ini, merupakan wujud pemenuhan kewajiban konstitusional Bupati Kudus kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 69 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mekanisme sesuai dengan pedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Obyek laporan berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2022.

1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 25).

1.2 VISI DAN MISI BUPATI KUDUS

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera

Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan yakni sebagai berikut :

Bangkit. Bangkit merupakan suatu tindakan semangat dari masyarakat untuk bangun menggugah dan memajukan daerah. Tindakan semangat yang ditimbulkan dapat memperkuat dan mengembangkan potensi daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Daerah yang bangkit mampu memperbaiki permasalahan daerah dan menyejahterakan masyarakat.

Modern. Modern merupakan suatu sikap, cara berpikir, dan cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kabupaten modern adalah kabupaten yang memiliki daya saing dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta dapat menyelaraskan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan teknologi yang dikembangkan. Penggunaan teknologi sebagai pendukung perkembangan suatu daerah dapat menjadikannya selalu *up to date* dalam segala informasi. Penggunaan teknologi untuk menjadikan kabupaten modern akan memudahkan pelayanan pada masyarakat. Kabupaten modern dapat menciptakan kabupaten yang nyaman, terdepan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Religius. Religius merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang taat/ patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama. Karakter religius

sangat penting dalam kehidupan masyarakat, menjadi sikap hidup yang mengacu pada tatanan dan larangan dan tatanan sikap yang telah diatur dalam aturan agamanya. Sikap religius pada setiap individu akan menciptakan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan masyarakat.

Cerdas. Cerdas berarti mempunyai kebiasaan atau tradisi, sikap dan kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan pengetahuan, intelektual, emosional dan spiritual.

Sejahtera. Sejahtera berarti aman sentosa dan makmur dengan suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Keadaan Sejahtera memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Kudus tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

1. *Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.*

Dengan program prioritas mewujudkan industri kerakyatan, pendidikan, kesehatan, gender, pemuda dan olahraga serta kesejahteraan sosial. Penggunaan dan penguasaan teknologi dan multimedia di era globalisasi menjadi basis dalam perkembangan daerah. Dengan adanya pemanfaatan yang baik dari adanya teknologi dan multimedia diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif. Berkualitas berarti adanya kemampuan dan kapasitas yang dimiliki, sedangkan kreatif dan inovatif merupakan kemampuan untuk menciptakan serta memperkenalkan atau mengembangkan hal – hal baru. Terbentuknya masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif diharapkan mampu mewujudkan perubahan – perubahan sebagai langkah awal perkembangan daerah yang lebih baik. Misi ini dilaksanakan dengan sasaran pendidikan dan pelatihan teknologi dan multimedia bagi masyarakat terutama bagi generasi – generasi muda daerah. Masyarakat yang kreatif dan inovatif merupakan masyarakat yang memiliki ide baru dan mampu menciptakan serta mengembangkan ide tersebut menjadi hal-hal baru. Hal ini perlu didukung dengan pengembangan penelitian, pengkajian serta inovasi secara terarah. Peta jalan Sistem Inovasi Daerah (*roadmap SIDA*) perlu disusun untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan inovasi daerah serta kreativitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi inovasi, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif.

2. *Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.*

Dengan program prioritas menyangkut transparansi anggaran, akuntabilitas, manajemen pemerintahan yang modern dan pelayanan publik. Upaya peningkatan pelayanan publik dimaksudkan guna memberikan pelayanan publik yang bermutu untuk seluruh masyarakat. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud termasuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan perundangundangan yang berlaku dibutuhkan pemerintahan yang semakin handal. Keberhasilan mewujudkan pemerintah yang handal tergantung kepada sumber daya manusia yang tersedia. Misi ini dilaksanakan dengan sasaran peningkatan kinerja SDM. Peningkatan kinerja SDM dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan dengan harapan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. untuk melayani kepentingan masyarakat.

3. *Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.*

Dengan program prioritas pendidikan karakter, berbagi sesama dan saling menghormati. Upaya mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif dilaksanakan guna menciptakan daerah tanpa terjadi adanya kekerasan. Perwujudan kehidupan yang toleran dan kondusif dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan seperti adanya toleransi antaragama dengan kebebasan beragama, toleransi terhadap perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Hubungan baik, saling menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat merupakan beberapa sasaran yang dapat dilakukan. Disamping itu, juga diupayakan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjalin toleransi serta harmonisasi sekaligus perlu adanya perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia.

4. *Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.*

Dengan program prioritas akselerasi daya saing, pemberdayaan ekonomi lokal dan program produksi yang kreatif dengan membentuk sentra industri kecil. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui keunggulan lokal dan pembangunan iklim usaha yang berdaya saing menjadi prioritas mengingat peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang dilakukan dengan peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan terkait SDM, permodalan dan investasi serta akses terhadap produk yang akan dipasarkan dengan perbaikan prasarana dan sarana pendukung. Dengan memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal maka perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang. Berbagai permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya penguasaan teknologi dan informasi bagi masyarakat. Dengan demikian perlu adanya optimalisasi pemerintah sebagai penyedia (*provider*) menjadi regulator, fasilitator, motivator dan katalisator berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata.

Misi Bupati terpilih memperlihatkan pilar penting yang perlu diprioritaskan dalam proses pembangunan di Kabupaten Kudus, yang dikenal dengan 9 (sembilan) Program Unggulan yaitu :

1. Tunjangan 1 juta per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/TK/Madin/RA/TPQ/SD/SMP/SMA/Madrasah
2. Bantuan sosial santunan bagi warga yang sakit di rumah sakit kelas 3 dan santunan anak yatim piatu serta santunan kematian cair dalam satu hari lewat desa
3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru setiap tahun
4. Bantuan per bulan untuk khotib dan imam masjid/mushola serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah
5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen
6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan usaha
7. Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumberdaya manusia
8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui pelatihan khusus kewirausahaan
9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi Pimpinan Unit Kerja (PUK)/Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB), perusahaan dan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas maka ditetapkan tujuan pokok pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018 – 2023, adapun tujuannya adalah :

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif;
3. Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan;
4. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah.

Sedangkan sasaran-sasaran pokok pembangunannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat;
4. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi;
5. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama;
6. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
7. Meningkatnya daya saing investasi daerah;
8. Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah;
9. Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Permasalahan Strategis

Permasalahan strategis pemerintah daerah yaitu :

1. Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sampai dengan tahun 2019, IPM di Kabupaten Kudus sebesar 74,94 dan masuk kategori tinggi. Namun demikian, angka tersebut masih perlu ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan perubahan. Kondisi lain yang ditunjukkan dari rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kudus tahun 2019 sebesar 8,63 dan harapan lama sekolah tahun 2019 sebesar 13,22. Angka tersebut menunjukkan bahwa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih perlu didorong pada tahun 2020. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan usaha yang lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Beberapa hal yang menjadi isu strategis dan masih harus dioptimalkan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia antara lain :

a. Pendidikan

Kualitas penyelenggaraan pendidikan selain didukung oleh sarana prasarana dan kurikulum, salah satu faktor yang sangat

menentukan adalah kualitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik memegang peranan yang paling menentukan dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan. Dengan semakin majunya teknologi terutama di bidang informatika, robotika, penemuan dan inovasi di segala bidang, dibutuhkan tenaga pendidik yang mampu menjawab tantangan jaman, disamping pengembangan karakter dan penanaman rasa cinta tanah air pada seluruh siswa di semua tingkatan. Tantangan ini semakin berat dengan banyaknya pengaruh buruk yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia antara lain semakin lemahnya pemahaman terhadap budaya bangsa, nilai-nilai “ke-Bhineka Tunggal Ika-an” dan nasionalisme, serta semakin tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme yang bisa berdampak pada kondusifitas Kabupaten Kudus. Untuk itu, pola pikir dan pola pengajaran kepada siswa harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman.

b. Kesehatan

Permasalahan yang cukup serius di bidang kesehatan adalah angka kematian bayi pada tahun 2019 yaitu 8,15 per 1000 kelahiran hidup dan ibu melahirkan yang masih relatif tinggi yaitu 72,90 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya untuk menurunkan angka tersebut adalah dengan melakukan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan dengan mengedepankan peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kudus termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. Pemulihan kesehatan masyarakat dengan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2021 dengan tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat.

2. Tata kelola pemerintahan

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai

instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mencapai target nilai A pada evaluasi SAKIP dimana kondisi pada tahun 2018 sebesar 68,19, maka Pemerintah Kabupaten Kudus perlu meningkatkan kinerja yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.

3. Kehidupan yang tertib, aman dan nyaman.

Aspek kondusifitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program pembangunan pada tahun 2020. Kehidupan yang toleran dan kondusif menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib yang dapat terwujud melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan.

Angka kriminalitas pada tahun 2019 sebesar 0,01 cenderung relative stabil dan turun dari tahun 2018 sebesar 0,02. Dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kudus terus melaksanakan sinergitas dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat. Penciptaan kondusifitas wilayah ini juga diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial.

4. Daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha.

Kebijakan pengembangan usaha yang berbasis kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, membuka kesempatan kerja

yang luas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitasi sarana dan prasarana usaha, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), permodalan, pelayanan perizinan yang mudah, penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan akses pemasaran serta peningkatan daya saing perlu dikembangkan secara berkesinambungan.

Penduduk miskin di Kabupaten Kudus mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 6,98% (59.990 jiwa) pada tahun 2018 menjadi 6,68% (58.000 jiwa) pada tahun 2019. Diperlukan sebuah formula yang dapat menurunkan angka kemiskinan di Kudus pada tahun-tahun mendatang mendekati 5%. Angka kemiskinan dapat dipengaruhi oleh angka pengangguran yang memicu persoalan kependudukan lain, seperti kriminalitas dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran di Kudus pada tahun 2019 sebesar 3,86% atau sebesar 18.720 jiwa.

5. Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Berdasarkan potensi bencana (banjir, tanah longsor, angin putting beliung dan kebakaran) Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori 13 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang di Jawa Tengah, namun demikian tetap diperlukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Kondisi geografis Kabupaten Kudus yang memiliki gunung dan dataran rendah serta cuaca yang cenderung panas menyebabkan bencana alam seperti di atas akan terus terjadi. Karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk siaga bencana dan meminimalisir akibat dari bencana alam yang terjadi. Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana harus dilakukan secara optimal dan terencana dengan baik. Selain pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur yang menjangkau ke seluruh wilayah perlu dilakukan guna menciptakan konektivitas antar wilayah dengan tujuan untuk memperkecil ketimpangan wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat daya saing ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penebangan hutan di kawasan mata air di Gunung Muria tidak hanya menyebabkan resiko tanah longsor dan banjir yang dapat melanda daerah-daerah di Kudus, tapi juga menyebabkan keringnya mata air di kawasan Gunung Muria, sehingga berimbas pada penurunan debit air sungai dan kekeringan di dataran rendah di wilayah Kudus. Peningkatan pencemaran lingkungan akibat limbah industri juga semakin banyak terjadi di wilayah Kudus. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah perkotaan mengalami pencemaran dan pendangkalan yang parah. Untuk itu diperlukan tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut, usaha-usaha mengatasi kerusakan lingkungan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama *stakeholders*, akademisi, serta peran aktif masyarakat.

Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan.

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati Kudus telah menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022. Adapun kegiatan-kegiatan pembangunan daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan sebagai berikut :

1. Pendidikan
 - a. Program Pengelolaan Pendidikan :
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
 - b. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan :
 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
2. Kesehatan
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat :
 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan :
- Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota
 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Di Wilayah Kabupaten/ Kota
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman:
- Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Di Produksi oleh Industri Rumah Tangga
 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan :
- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/ Kota
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Penataan Bangunan Gedung
 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- g. Program Penyelenggaraan Jalan
 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.
- h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Program Pengembangan Perumahan
 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.
 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
 - b. Program Kawasan Permukiman
 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha.
 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha.
 - c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
 - b. Program Penanggulangan Bencana
 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.
6. Sosial
- a. Program Pemberdayaan Sosial
 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Rehabilitasi Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza Di Luar Panti Sosial
 - c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Program Penanganan Bencana
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
7. Tenaga Kerja
- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - c. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
 - d. Program Hubungan Industrial

- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Program Perlindungan Perempuan
 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - e. Program Perlindungan Khusus Anak
 - Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Pangan
- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah

- Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
- Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.
 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi.
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.
10. Pertanian
- a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
- Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Penatagunaan Tanah
- Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota.
11. Lingkungan Hidup
- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.
 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - i. Program Pengelolaan Persampahan
 - Pengelolaan Sampah.
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Program Pendaftaran Penduduk
 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
 - b. Program Pencatatan Sipil
 - Pelayanan Pencatatan Sipil.
 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
 - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.
 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Program Penataan Desa
 - Penyelenggaraan Penataan Desa.
 - b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa.
 - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
 - d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Program Pengendalian Penduduk
 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal.

- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
15. Perhubungan
- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.
 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
16. Komunikasi dan Informatika
- a. Program Informasi dan Komunikasi Publik
- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Aplikasi Informatika
- Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
17. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- a. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan

- Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
- c. Program Pengembangan UMKM
 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
18. Penanaman Modal
- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - b. Program Promosi Penanaman Modal.
 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
19. Kepemudaan dan Olahraga
- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
20. Statistik
- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

21. Persandian
 - a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
22. Kebudayaan
 - a. Program Pengembangan Kebudayaan
 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - c. Program Pengelolaan Permuseuman
 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
23. Perpustakaan
 - a. Program Pembinaan Perpustakaan
 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
24. Kearsipan
 - a. Program Pengelolaan Arsip
 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
25. Kelautan dan Perikanan
 - a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - b. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
26. Pariwisata
 - a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - b. Program Pemasaran Pariwisata
 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
27. Pertanian
- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Pembangunan Prasarana Pertanian
 - c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - e. Program Penyuluhan Pertanian
 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
28. Kehutanan
- a. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota
29. Energi dan Sumber Daya Mineral
- a. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
 - Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten/Kota
30. Perdagangan
- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

- Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Program Pengembangan Ekspor
 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
31. Perindustrian
- a. Program perencanaan dan pembangunan industri
 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - b. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota
 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
32. Transmigrasi
- a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
33. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Administrasi Tata Pemerintahan
 - Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - b. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
34. Fungsi Penunjang Pemerintahan pada Pemerintahan Sekretariat DPRD
- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - Pembahasan Kebijakan Anggaran

- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - Fasilitasi Tugas DPRD
35. Fungsi Penunjang Perencanaan
- a. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
36. Fungsi Penunjang Keuangan
- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
37. Fungsi Penunjang Kepegawaian
- a. Program Kepegawaian Daerah
 - Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN
 - Mutasi dan Promosi ASN
 - Pengembangan Kompetensi ASN
 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

38. Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
39. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
 - a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi
40. Fungsi Penunjang Pengawasan
 - a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - Pendampingan dan Asistensi
41. Fungsi Penunjang Kewilayahan
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
42. Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kudus tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun sampai dengan Tahun 2023.

Selanjutnya strategi dan arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

Table 1.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga pendidik
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
			Pemberian BOS dan beasiswa
			Pemberian tambahan penghasilan guru non PNS
			Peningkatan pengelolaan perpustakaan
			Peningkatan jumlah koleksi perpustakaan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi ibu dan bayi
			Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap penyakit menular dan tidak menular
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras Kesehatan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan pembinaan kepemudaan Penerapan pola hidup sehat dan pemassalan olahraga Peningkatan penggunaan kontrasepsi jangka panjang Peningkatan kemandirian ekonomi kerakyatan Peningkatan produksi dan produktivitas pangan Peningkatan pola konsumsi masyarakat Peningkatan perlindungan sosial Pemberian tambahan penghasilan tenaga pendidik keagamaan non PNS
Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Penataan manajemen perubahan Penataan perundang-undangan Penataan dan penguatan organisasi Penataan ketatalaksanaan Penataan sistem manajemen SDM aparatur Penguatan pengawasan Optimalisasi pembangunan Zona Integritas

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Peningkatan peran APIP dalam penjaminan mutu dan konsultasi
			Penguatan akuntabilitas kinerja
			Peningkatan kualitas pelayanan publik
			Peningkatan verifikasi dan validasi data kependudukan
			Integrasi perencanaan dan penganggaran
			Optimalisasi monitoring dan evaluasi
			Optimalisasi rasio kemandirian keuangan daerah
			Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah
			Peningkatan kedisiplinan aparatur
			Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur
			Optimalisasi penerapan hasil inovasi
			Optimalisasi jejaring penelitian dan pengembangan
			Peningkatan penyelenggaraan persandian
			Peningkatan jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku
			Penguatan kebijakan internal SPBE
			Penguatan tata kelola SPBE
			Penguatan layanan SPBE
			Peningkatan diseminasi informasi

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	Peningkatan penegakan Perda
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi
			Pembinaan mental dan peningkatan implementasi aktivitas ibadah
			Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran
			Peningkatan komunikasi kelompok masyarakat dan toleransi umat beragama
			Peningkatan kondusifitas melalui pemerataan CSR dan pemanfaatan zakat, infak dan sodaqoh
			Peningkatan aktualisasi budaya dan adat istiadat
			Peningkatan pengelolaan bangunan bersejarah dan cagar budaya
Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan
			Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan
			Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan
			Pembangunan taman hutan raya
			Peningkatan produksi dan produktivitas koperasi, usaha kecil dan menengah

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Peningkatan informasi dan akses pasar tenaga kerja
			Peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengembangan wirausaha baru
			Peningkatan diseminasi ketenagakerjaan
			Peningkatan pembinaan industri kecil dan menengah
			Peningkatan fasilitasi transmigrasi
			Peningkatan perlindungan konsumen
			Peningkatan pemasaran hasil produk lokal secara konvensional maupun online
			Peningkatan pengelolaan pasar
			Peningkatan pengendalian manajemen bahan pokok penting dan strategis
			Peningkatan ekonomi domestik dan fasilitasi tata kelola ekspor impor
			Peningkatan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana
			Peningkatan pemberdayaan perempuan kepala keluarga
			Peningkatan pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
			Peningkatan akses dan kualitas perlindungan anak

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Meningkatnya daya saing investasi daerah	Peningkatan nilai realisasi investasi
		Peningkatan pelayanan perijinan satu pintu	
		Peningkatan pengelolaan pariwisata	
		Peningkatan manajemen pertanahan	
		Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan drainase
		Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum	
		Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi	
		Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman	
		Penurunan luasan kawasan kumuh	
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat, organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa	
		Pembangunan kawasan perdesaan	
		Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintahan desa	
		Peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas	
		Peningkatan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan	
Meningkatnya keseimbangan	Peningkatan daya dukung dan daya tampung LH		

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	Peningkatan pencegahan pencemaran dan pengawasan lingkungan hidup Peningkatan pengelolaan persampahan Peningkatan ruang terbuka hijau Fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral Peningkatan jasa ekosistem

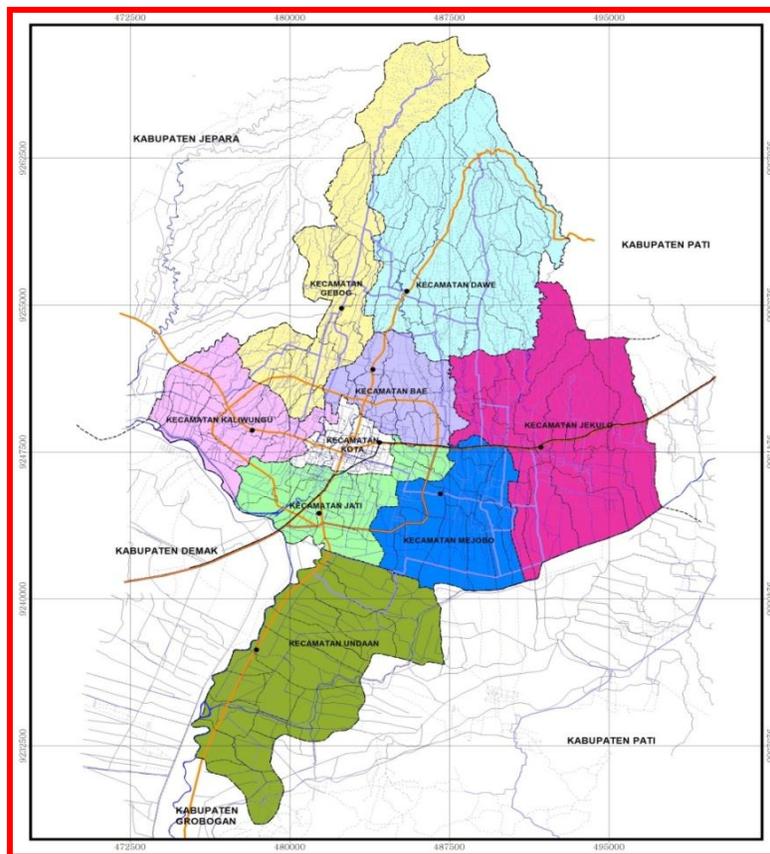
1.3 DATA UMUM DAERAH

1. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dengan total seluas 42.516 Ha atau sekitar 1,31% luas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah administratif berbatasan dengan wilayah kabupaten di sekitar sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1:

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati
- Sebelah Timur : Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Barat : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak

Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada 06°51' - 07°16' Lintang Selatan dan 110° 36' - 110°50' Bujur Timur. Posisi Kabupaten Kudus juga terletak pada jalur perekonomian nasional yaitu dilewati jalan nasional pantura sehingga sangat strategis. Kondisi wilayah Kabupaten Kudus merupakan daerah yang berdekatan dengan pesisir Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati serta sebagian di bagian Utara merupakan pegunungan Muria dan Pati Ayam.



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Kudus Berdasar Wilayah Kecamatan Sumber : RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032

Adapun data luas wilayah dan pembagian administrasi wilayah Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kabupaten Kudus 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jml Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Dukuh	Jml RW	Jml RT
1	Kaliwungu	3.268	15	0	48	67	442
2	Kota	1.047	16	9	34	110	497
3	Jati	2.629	14	0	52	79	386
4	Undaan	7.177	16	0	33	63	357
5	Mejobo	3.677	11	0	33	69	341
6	Jekulo	8.291	12	0	45	85	445
7	Bae	2.332	10	0	38	51	285
8	Gebog	5.510	11	0	80	82	435
9	Dawe	8.584	18	0	71	110	583
Jumlah		42.515	123	9	434	716	3.771

Sumber : Kudus Dalam Angka 2020, Kecamatan Dalam Angka 2020 (Perda Kabupaten Kudus No 1 Tahun 2015)

Sebagaimana tertera pada Tabel 1.2, wilayah Kabupaten Kudus terdiri atas 9 kecamatan, yang terbagi dalam 9 kelurahan dan 123 desa, 434 dukuh, 716 RW dan 3.771 RT.

Sedangkan untuk kerentanan tanah di Kabupaten Kudus yang dilihat dari kemiringannya, wilayah Kabupaten Kudus memiliki beragam kemiringan, mulai dari 0 sampai 40°. Kecamatan yang memiliki wilayah pada kemiringan yang beragam adalah Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. Seluas 6139,51 Ha wilayah Kecamatan Jekulo berada pada kemiringan (0-2)°, 1115,1 Ha luas berada pada kemiringan (3-15)°, kemudian 176,35 Ha berada pada kemiringan (16-40)° serta 860,72 Ha yang berada pada tingkat kemiringan yang sangat curam. Sedangkan untuk Kecamatan Kaliwungu, Kota Kudus, Jati, serta Mejobo terletak pada kemiringan datar atau (0-2)°.

Kabupaten Kudus dapat dibagi menjadi 4 zona kerentanan gerakan tanah, sebagai berikut :

a) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah

Terdapat pada daerah datar sampai sedikit landai dengan kemiringan lereng 0-5% sampai dengan <15%, wilayahnya meliputi

Kecamatan Undaan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo. Batuan terdiri dari endapan alluvial dan sebagian tuf, tuf pasir dari Formasi Tuf Muria. Lahan umumnya digunakan sebagai permukiman, sawah, pasar, tambak dan perkantoran.

b) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah

Terdapat pada daerah datar sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 5% sampai dengan 15%, di lembah sungai bagian atas kadar lereng sampai >50%, wilayahnya meliputi sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Mejobo. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasir kadang dari Formasi Tuf Muria. Lahan umumnya digunakan sebagai hutan sejenis, sawah, tegalan dan permukiman.

c) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah

Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 30-50% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi daerah Gunung Pati Ayam sebelah utara dan Kecamatan Gebog. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasir, breksi andesit dari Formasi Tuf Muria, lava dari Formasi Lava Muria dan Batupasir-Gamping dari Formasi Patiayam. Lahan umumnya digunakan sebagai hutan sejenis, hutan heterogen dan pemukiman.

d) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi

Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antar 50-70% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan puncak Muria bagian selatan. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasir, breksi andesit dan lava dari Formasi Lava Muria, batupasir dari Formasi Pati Ayam. Lahan umumnya digunakan sebagai tegalan, hutan heterogen.

2. Jumlah Penduduk

Komposisi penduduk laki-laki di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 sebanyak 433.374 orang atau 49,97% dan perempuan sebanyak 433.831 atau sekitar 50,03%. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah penduduk sebanyak 867.637 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 433.716 orang atau sekitar 49,99% dan perempuan sebanyak 433.921 orang atau 50,01%. Kondisi ini menunjukkan perkembangan jumlah penduduk perempuan meningkat lebih banyak dibanding laki-laki. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin

Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022

Tahun	Laki – laki		Perempuan		Total
	Orang	%	Orang	%	
2018	419.212	49.23	432.266	50,77	851.478
2019	428.161	49.78	431.894	50,22	860.055
2020	432.754	49.97	433.215	50.03	865.969
2021	433.374	49,97	433.831	50,03	867.205
2022	433.802	49,97	434.277	50,03	868.079

Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2022 (Dinas Dukcapil)

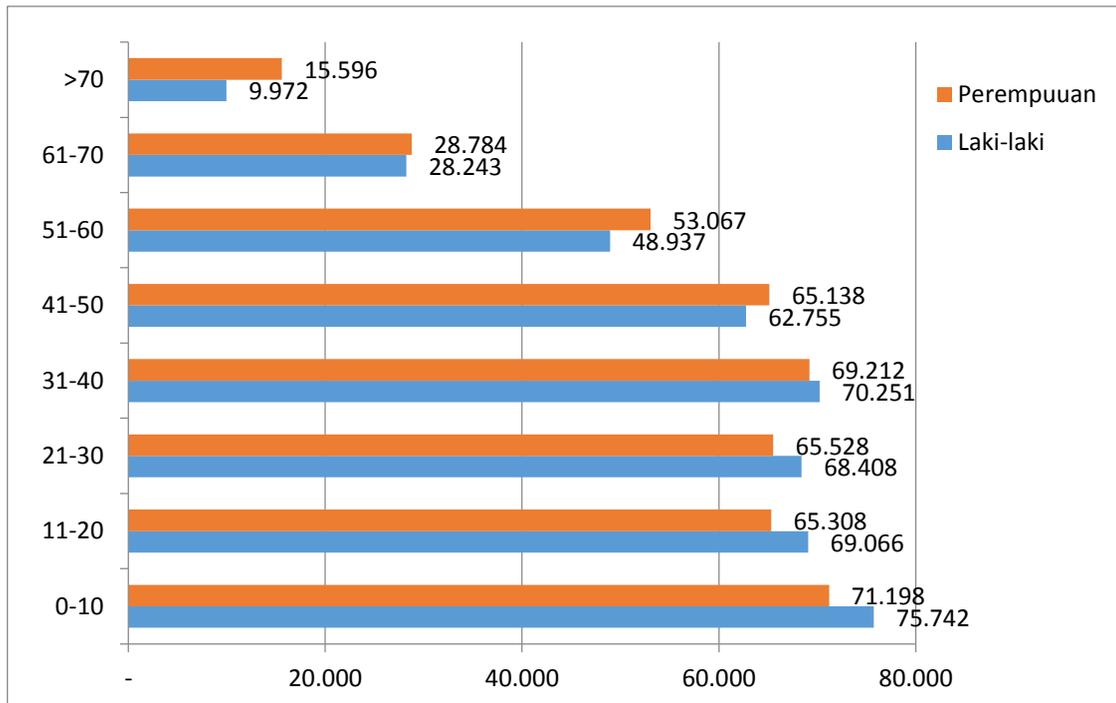
Sedangkan komposisi penduduk menurut kelompok usia di Kabupaten Kudus pada Tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada usia yang lebih muda lebih besar daripada kelompok usia lebih tua, hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk masih positif, dan menjadi bonus demografi bagi ketersediaan tenaga kerja. Dalam bentuk piramida, kondisi tersebut masih normal, sedangkan bentuk piramida terbalik mengindikasikan terjadinya pola *Aging Population* pada suatu daerah yang dapat berdampak pada *Dependency Ratio* (Angka Ketergantungan). Di Kabupaten Kudus pola piramida masih normal sehingga Angka Ketergantungan masih cukup baik dan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Kudus. Data komposisi penduduk dapat dilihat sesuai tabel-tabel berikut ini :

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2022

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
≤ 10	67.866	63.823	131.689
11-20	70.906	66.520	137.426
21-30	68.273	65.247	133.520
31-40	68.111	66.431	134.542
41-50	64.670	66.779	131.449
51-60	50.896	55.7718	106.614
61-70	31.146	32.597	63.743
> 70	11.934	17.162	29.096
JUMLAH	433.802	434.277	868.079

Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2022 (Dinas Dukcapil)

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2022



Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2022 (Dinas Dukcapil)

Pada Tabel 1.5 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada kelompok usia lebih muda khususnya pada rentang usia 11-20 tahun masih lebih besar dari kelompok usia yang lain dengan Jumlah penduduk sebesar 137.426 jiwa terdiri perempuan 66.520 dan laki-laki 70.906, sedangkan kelompok usia tertinggi kedua ada pada rentang usia 31-40 tahun sebesar 134.542 jiwa terdiri dari perempuan 66.431 dan laki-laki 68.111.

Table 1.6 Komposisi Penduduk menurut *Dependensi Rasio* di Kabupaten Kudus Tahun 2022

Tahun	≤14	15-64	>65	Jumlah	Rasio Ketergantungan
2018	197.987	603.611	49.880	851.478	41,07
2019	190.002	620.486	62.181	860.055	40,65
2020	201.581	613.933	50.455	865.969	41,05

2021	201.884	613.489	51.832	867.205	41,36
2022	189.271	618.301	60.507	868.079	40,40

Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2022 (Dinas Dukcapil)

Pembagian penduduk menurut kelompok umur merupakan potret struktur penduduk setempat yang menggambarkan potensi penduduk produktif dan rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan merupakan rasio antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk kelompok penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun). Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 40,40.

Sedangkan untuk menggambarkan distribusi tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Kudus dapat dilihat dari jumlah penduduk sesuai jenjang pendidikan berdasarkan catatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus. Keberhasilan pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir dan budaya masyarakat terhadap minat dan apresiasi pendidikan. Animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi yang makin luas, sebagaimana terlihat pada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tertera dalam rincian tabel 1.7.

Tabel 1.7 Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

Tingkat pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
Tidak/Belum Sekolah	178.808	207.199	215.520	225.946	235.344
Tidak/Belum Tamat SD	65.291	63.716	64.338	62.373	59.661
Tamat SD/ sederajat	255.704	245.652	236.051	229.125	219.953
Tamat SLTP/ sederajat	144.251	144.957	146.140	144.005	140.876
Tamat SLTA/ sederajat	150.853	154.220	157.367	157.921	161.995
Akademi / Sarjana	40.411	44.311	46.553	47.835	50.250
Jumlah Penduduk	835.318	860.055	865.969	867.205	868.079

Sumber : DKB Semester 1 Tahun 2022 (Dinas Dukcapil)

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa jenjang pendidikan yang paling banyak di Kabupaten Kudusn pada tahun 2022 adalah pada jenjang tidak/belum tamat sekolah yaitu 235.344 penduduk. Jumlah penduduk yang lulus SLTA/Sederajat lebih banyak daripada penduduk yang lulus SLTP/Sederajat, Diploma maupun Strata. Banyaknya jumlah lulusan SLTA/Sederajat tersebut menggambarkan berhasilnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang berpendidikan Akademi/Sarjana mengalami peningkatan 2.415 orang atau naik 5,05 % dibandingkan tahun 2021.

3. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah penduduk dasar tahun sebelumnya.

Di Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tampak pertumbuhan penduduk berada di kisaran 0,14 % sampai dengan 1,19 %, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.8 di bawah ini.

Tabel 1.8 Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah	Laju Pertumbuhan
2018	851.478	1,17
2019	860.055	1,01
2020	865.969	0,69

2021	867.205	0,14
2022	868.079	0,10

Diolah dari : DKB semester 1 tahun 2022 (Dinas Dukcapil)

Terlihat pada tabel di atas bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun terus bertambah tetapi mengalami kecenderungan untuk pelambatan laju.

4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten sebanyak 6.568, menurun dibandingkan keadaan pada akhir Tahun 2021 sebesar 6.486 orang Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian rasio antara jumlah pegawai dan jumlah penduduk pada Tahun 2022 sebesar 0,75 persen.

Kondisi ini belum ideal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mengingat sebagaimana pernah diungkapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sedikitnya rasio Pegawai Negeri Sipil di daerah dan jumlah penduduk adalah 1,5%

Adapun penyebaran Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus tergambar pada tabel 1.9 di bawah ini yang menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil di setiap Perangkat Daerah Kerja.

Tabel 1.9 Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Kudus Tahun 2022

NO	OPD/UNIT KERJA	JML PEGAWAI
1	SEKRETARIAT DAERAH	137
2	SEKRETARIAT DPRD	26
3	BAPPEDA	33
4	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	72
5	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	42
6	INSPEKTORAT DAERAH	45
7	DINAS SOSIAL, PPPA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	35
8	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	147
9	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	45

NO	OPD/UNIT KERJA	JML PEGAWAI
10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	91
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	87
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	25
13	DINAS PERDAGANGAN	117
14	SATPOL PP	49
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	22
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	26
17	DINAS PERHUBUNGAN	74
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	42
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	27
21	KEC KOTA	98
22	KEC JEKULO	21
23	KEC GEBOG	19
24	KEC DAWE	25
25	KEC KALIWUNGU	19
26	KEC JATI	19
27	KEC UNDAAN	19
28	KEC MEJOBBO	20
29	KEC BAE	17
30	BPBD	20
31	BADAN KESBANGPOL	20
32	DINAS KESEHATAN	731
33	RSUD	488
34	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	3805
Jumlah		6.486

Sumber: BKPP Kabupaten Kudus Tahun 2022

5. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 diarahkan pada optimalisasi

pendapatan daerah melalui intensifikasi pemantauan dengan memperhatikan kondusivitas pelaksanaan berusaha pasca pandemi di Kabupaten Kudus. Kebijakan optimalisasi pendapatan daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing komponen pendapatan. Untuk kebijakan pada akun Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan atas kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan daerah sesuai peraturan perundangan-perundangan. Kedua, optimalisasi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pusat dan instansi vertikal. Ketiga, optimalisasi juga dilakukan dengan menjaga kelancaran arus data dan komunikasi antara pusat dan daerah.

Strategi kebijakan pendapatan daerah tahun 2021 merupakan bauran kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan untuk membangun basis pendapatan yang kuat menuju kemandirian fiskal daerah. Kebijakan optimalisasi PAD dilaksanakan melalui beberapa langkah yaitu (i) perluasan cakupan wilayah penegakan pemungutan pajak daerah untuk memenuhi harapan atas rasa keadilan wajib pajak; (ii) penetapan harga yang wajar terhadap obyek pajak; (iii) pemberian insentif dan apresiasi kepada wajib pajak; (iv) penggunaan teknologi informasi dan perluasan penerapan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah; (v) penguatan kapasitas pemungutan pajak daerah; dan (vi) perbaikan penyediaan layanan publik secara berkesinambungan kepada masyarakat.

Pada TA 2022, realisasi total pendapatan daerah (**berdasarkan data SIMDA pada tanggal 20 Januari 2023**) mencapai Rp2.072.666.999.383,00 atau sebesar 101,62% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.039.641.707.439,00. Pendapatan tersebut paling besar bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp1.658.338.656.274,00, selanjutnya PAD sebesar Rp412.612.343.109,00,00, dan terakhir Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp1.716.000.000,00. Realisasi tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Kudus terhadap Pendapatan Transfer dengan proporsi sebesar 80,01% dari total pendapatan. Selanjutnya, kontribusi PAD adalah sebesar 19,91% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 0,08%. Secara rinci, pendapatan daerah kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 1.10 di bawah ini.

Tabel 1.10 Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kudus TA 2022

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Pendapatan Asli Daerah	405.622.452.000	416.454.707.766	102,67
Pajak Daerah	157.040.386.000	167.300.451.315	106,53
Retribusi Daerah	29.460.617.000	24.797.976.244	84,17
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.688.534.000	10.688.535.585	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	208.432.915.000	213.667.744.622	102,51
Pendapatan Transfer	1.629.519.255.439	1.562.610.365.077	95,89
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	<i>1.476.316.558.439</i>	<i>1.385.211.821.105</i>	<i>93,83</i>
Dana Bagi Hasil (DBH)	254.419.178.000	279.196.280.839	109,74
DAU	747.504.503.000	741.118.818.488	99,15
Dana Alokasi Khusus	312.306.843.439	202.810.687.778	64,94
DID	15.963.044.000	15.963.044.000	100,00
Dana Desa	146.122.990.000	146.122.990.000	100,00
<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	<i>153.202.697.000</i>	<i>177.398.543.972</i>	<i>115,79</i>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	143.549.697.000	171.893.652.772	119,75
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	9.653.000.000	5.504.891.200	57,03
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.500.000.000	1.716.000.000	38,13
<i>Pendapatan Hibah</i>	<i>4.500.000.000</i>	<i>1.716.000.000</i>	<i>38,13</i>
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.500.000.000	1.716.000.000	38,13
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	2.039.641.707.439	1.980.781.072.843	97,11

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data SIMDA per 20 Januari 2023)

6. Realisasi belanja menurut jenis belanja

Kebijakan Belanja diprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja bagi hasil dan belanja barang dan jasa administrasi perkantoran. Sedangkan belanja untuk hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan kepada pemerintah desa serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Adapun target dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.2.580.511.409.364,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.223.830.622.851,00 atau mencapai 86,18%. Adapun komposisi realisasi belanja dapat dilihat pada Tabel 1.11. berikut.

Tabel 1.11 Komposisi Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1.	Belanja Operasi	1.837.039.734.684	1.567.978.190.976	85,35
2.	Belanja Modal	456.116.596.645	379.328.767.594	83,16
3.	Belanja Tak Terduga	18.665.058.035	7.934.031.867	42,51
4.	Belanja Transfer	268.690.020.000	268.589.632.414	99,96
Jumlah		2.580.511.409.364	2.223.830.622.851	86,18

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 14 Januari 2022)

Tampak dari perbandingan antara rencana Anggaran dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus dengan kemampuan pendapatan sebesar Rp.1.986.888.213.950,00 dengan kewajiban untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp.2.268.883.977.950,00, maka terjadi kondisi defisit anggaran yang mencapai Rp. (281.995.764.000,00). Keadaan defisit tersebut selanjutnya ditutup dari pembiayaan Pemerintah.

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Yang pada intinya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Struktur Pembiayaan

Sedangkan dilihat dari strukturnya, sisi pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, mencakup:

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adapun Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.12 di bawah ini:

Tabel 1.12 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2022

NO	URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	%
	PEMBIAYAAN DAERAH			
1	Penerimaan Pembiayaan	546.563.701.925	546.563.701.925	100,00
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	546.563.701.925	546.563.701.925	100,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	5.694.000.000	2.910.000.000	51,11
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.694.000.000	2.910.000.000	51,11
	Pembiayaan Netto	540.869.701.925	543.653.701.925	100,51

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 14 Januari 2022)

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 KEBIJAKAN UMUM

Pemulihan pasca pandemi Covid-19 menjadi fokus kebijakan Pemerintah Daerah yang berdampak pada sosial ekonomi, baik makro maupun mikro. Dalam rangka mengantisipasi dinamika perekonomian pasca pandemi tersebut, pengelolaan keuangan daerah pun mengalami berbagai penyesuaian untuk menjaga kondisi fiskal daerah yang kredibel dan berkesinambungan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang terjadi sepanjang tahun 2022 tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019).

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran APBD. Pada tanggal 24 Desember 2021, ditetapkan Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022. Menindaklanjuti Perda tersebut, pada tanggal 27 Desember 2021 ditetapkan Perbup Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022. Setelah Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik disetujui, pada tanggal 17 Pebruari 2022 Perbup Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 yang juga menampung Bantuan Keuangan dari Provinsi, DAK Non Fisik BOKB Dinsos, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Sekolah Swasta. Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan:

1. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 tanggal 07 April 2022 Peraturan Bupati ini mengatur Pergeseran Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP)
2. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan tanggal 28 April 2022, Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sesuai PMK 215

3. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan tanggal 07 Juni 2022. Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pergeseran Belanja Tidak Terduga tindak Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Pergeseran Belanja untuk TPP THR dan Gaji 13
4. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 ditetapkan tanggal 28 Juni 2022. Peraturan Bupati ini mengatur Pergeseran Belanja Tidak Terduga untuk Dinas Pertanian sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta Kesiapan Hewan Kurban Menelang Hari raya Idul Adha 1443 H .
5. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan tanggal 09 Nopember 2022. Peraturan Bupati ini mengatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021, dan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor.HK.02.02/I/2939/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa bantuan Lainnya Dalam Bentuk Uang Untuk Pemenuhan Prasarana Alat Kesehatan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

Beberapa penetapan peraturan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2022 tersebut diarahkan agar kondisi yang ada tidak menjalar menjadi sebuah krisis ekonomi yang menurut Krugman (1999). Beberapa langkah yang dilakukan sebagai kebijakan kontra-siklus mengatasi pandemi antara lain dengan mewujudkan kemudahan berusaha, memperbaiki iklim usaha, mempertahankan kepercayaan pasar dan bisnis, meningkatkan program jaring pengaman sosial, menjaga tingkat suku bunga, memberikan kepastian hukum, dan menggiatkan edukasi publik. Langkah-langkah tersebut diwujudkan secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Kudus sesuai kewenangannya

dengan dukungan Pemerintah Pusat melalui program dan kegiatan dalam APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.

2.2 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mendukung tercapainya pembangunan nasional melalui upaya-upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah dan menyelenggarakan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah daerah perlu memastikan mempunyai sumber-sumber pendapatan yang cukup dan tumbuh berkelanjutan (*sustainable revenue growth*) dalam rangka mendanai berbagai belanja daerahnya.

2.3 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan perpajakan kepada daerah, Pemda memiliki keleluasaan dalam hal pemungutan atas pajak dan retribusi yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Sebaliknya, Pemda dilarang melakukan pungutan di luar yang ditetapkan dalam UU tersebut.

Dalam kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi, Pemkab Kudus tetap melakukan upaya-upaya pemungutan dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian tersebut antara lain adalah pengurangan aktivitas penagihan secara langsung ke lapangan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dan pemberian insentif perpajakan. Hal-hal yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah untuk akun Pendapatan Pajak Daerah antara lain:

1. Penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB P2 secara selektif agar lebih mendekati harga pasar;
2. Penyesuaian harga dasar dan nilai perolehan untuk Pajak Air Tanah;
3. Penyusunan kajian optimalisasi pendapatan asli daerah;
4. Penyusunan *road map* percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah;
5. Penagihan dan penertiban pajak daerah;
6. Pengelolaan piutang pajak daerah;
7. Pembangunan baner konstruksi untuk reklame;
8. Sosialisasi dan edukasi pajak daerah;
9. Pemutakhiran dan pemeliharaan sistem informasi pajak daerah;
10. Penyelenggaraan forum konsultasi publik terkait pengelolaan pendapatan daerah; dan

11. Penyelenggaraan forum koordinasi dan evaluasi antar OPD yang menghasilkan penerimaan daerah.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan terkait pendapatan yang bersumber dari Hasil Retribusi Daerah adalah:

1. Memberikan pelayanan publik sesuai SPM dan protokol kesehatan;
2. Sosialisasi, pembinaan, pendampingan, dan pemantauan atas kegiatan pemungutan retribusi;
3. Bekerja sama dengan lembaga lain terkait (perguruan tinggi, instansi vertikal, dsb);
4. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal;
5. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada;
6. Melakukan penagihan piutang;
7. Melakukan penertiban dan penegakan hukum;
8. Mencari lahan parkir baru yang potensial;
9. Perbaikan dan pemutakhiran pengelolaan basis data.

Optimalisasi pendapatan yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dilakukan melalui kebijakan antara lain pembinaan pengelolaan BUMD, pengawasan kinerja manajemen BUMD, dan penambahan penyertaan modal pada BUMD. Sedangkan untuk akun Lain-Lain PAD Yang Sah, beberapa langkah yang dilakukan antara lain optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Langkah-langkah optimalisasi untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan dengan cara koordinasi, perbaikan dan rekonsiliasi data. Hal ini dilakukan karena semua akun pendapatan ini bersumber dari transfer baik dari Pusat (Transfer Ke Daerah dan Dana Desa - TKDD) maupun dari Provinsi (Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Gubernur).

Hal yang turut membantu, mulai pertengahan tahun 2020, Koordinator Wilayah VII Komisi Pemberantasan Korupsi (Korwil VII KPK) memberikan pendampingan dalam rangka upaya optimalisasi pendapatan asli daerah. Selain itu, bekerja sama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah, Pemkab Kudus melakukan penyusunan kajian optimalisasi pendapatan asli daerah. Kolaborasi dan pendampingan yang dilakukan pada tahun 2022 membuka perspektif dan semangat baru pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Kudus, sekaligus juga penataan ulang manajemen pendapatan daerah di Kabupaten Kudus.

2.4 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Tabel 2.1 diketahui bahwa target PAD ditetapkan sebesar Rp405.622.452.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp412.612.343.109,00 atau 101,72%. Secara umum, penerimaan PAD dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan untuk semua jenis pendapatan. Komponen Pendapatan Pajak Daerah memiliki capaian tertinggi sebesar 106,63%, disusul kemudian Lain-Lain PAD Yang Sah (101,52%), Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (88,50%), dan terakhir Hasil Retribusi Daerah (81,82%).

Adapun jika dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing jenis PAD sebagaimana pada Tabel 2.2 di bawah ini, struktur PAD Kabupaten Kudus TA 2022 didominasi oleh Lain-Lain PAD Yang Sah (51,28%) disusul Pendapatan Pajak Daerah sebesar 40,58%, Hasil Retribusi Daerah sebesar 5,84%, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 2,29%.

Tabel 2.1 Kontribusi Masing-Masing Jenis PAD Kab Kudus TA 2022

JENIS PENDAPATAN	REALISASI (Rp)	PROPORSI (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	412.612.343.109	100,00
Pendapatan Pajak Daerah	167.448.269.394	40,58
Hasil Retribusi Daerah	24.105.792.404	5,84
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.459.247.784	2,29
Lain-lain PAD Yang Sah	211.599.033.527	51,28

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah dalam APBD TA 2022 ditetapkan sebesar Rp157.040.386.000,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, realisasi pendapatan pajak daerah adalah sebesar Rp167.448.269.394,00 atau melampaui target dengan capaian sebesar 106,63%. Secara umum sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.2, kinerja realisasi pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain peningkatan NJOP PBB P2 secara selektif, pemantauan transaksi pajak secara elektronik, penyesuaian harga dasar air tanah, sosialisasi, pemeriksaan, dan penagihan.

Table 2.2 Capaian Pendapatan Pajak Daerah Kab Kudus TA 2022

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Pajak Hotel	3.366.740.000	3.840.954.061	114,09
Pajak Restoran	10.406.843.000	13.071.609.937	125,61
Pajak Hiburan	465.040.000	609.164.986	130,99
Pajak Reklame	3.432.431.000	3.525.954.097	102,72
Pajak Penerangan Jalan	58.448.701.000	59.904.820.254	102,49
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	0	0
Pajak Parkir	352.634.000	402.099.510	114,03
Pajak Air Tanah	3.474.266.000	3.873.690.581	111,50
Pajak Sarang Burung Walet	7.849.000	9.772.000	124,50
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	40.835.655.000	41.993.050.105	102,83
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	36.250.227.000	40.069.335.784	110,54
TOTAL	157.040.386.000	167.448.269.394	106,63

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dari target sebesar Rp29.460.617.000,00 terealisasi sebesar Rp24.797.976.244,00 atau 84.17% dari target. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Adapun perincian kinerja Retribusi Daerah adalah sebagaimana pada Tabel 2.3

Tabel 2.3 Capaian Hasil Retribusi Daerah Kab. Kudus TA 2022

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Retribusi Jasa Umum	10.024.799.695	10.104.923.389	100,80
Retribusi Jasa Usaha	15.991.511.305	12.408.292.099	77,59
Retribusi Perizinan Tertentu	3.444.306.000	2.284.760.756	66,33
TOTAL	29.460.617.000	24.105.792.404	81,82

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

Retribusi Jasa Umum dari target Rp10.024.799.695,00 dapat terealisasi sebesar Rp 10.104.923.389,00 atau sebesar 81,82% dari target. Dari 11 (sebelas) jenis Retribusi Jasa Umum terdapat 6 (enam) jenis yang tidak mencapai target, yaitu Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (51.47%), Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (87.25%), Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (85.82%), Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (99.78%), Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (42.19%), dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (51.47%). Tidak

tercapainya target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor disebabkan oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai. Adapun rendahnya Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan imbas adanya permasalahan kewenangan antar instansi.

Tabel 2.4 Capaian Hasil Retribusi Jasa Umum Kabupaten Kudus
TA 2022

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.711.631.416	2.829.009.435	104,33
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	2.317.000	1.192.500	51,47
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.146.910.500	1.000.640.740	87,25
Retribusi Pelayanan Pasar	4.688.816.779	5.136.267.814	109,54
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	890.135.000	763.905.000	85,82
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	55.000.000	55.005.500	100,01
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	-	-
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	165.500.000	165.142.400	99,78
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	364.489.000	153.760.000	42,19
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.711.631.416	2.829.009.435	104,33
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	2.317.000	1.192.500	51,47
TOTAL	10.024.799.695	10.104.923.389	100,80

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

Retribusi Jasa Usaha dari target sebesar Rp13.473.798.400,00 dapat terealisasi sebesar Rp14.393.173.556,97 atau sebesar 106,82% dari target yang telah ditetapkan. Terdapat 8 (delapan) jenis Retribusi Jasa Usaha yang tidak memenuhi target, yaitu Retribusi PKD-Laboratorium (70,31%), Retribusi PKD-Pemakaian Alat (46,19%), Retribusi Terminal-Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum (90,75%), Retribusi Terminal-Tempat Kegiatan Usaha (73,40%), Retribusi Tempat Khusus Parkir (60,97%), Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (55,04%), Retribusi Rumah Potong Hewan (94,55%), Retribusi Tempat Rekreasi (99,98%), dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (41,64%). Tidak tercapainya target dari akun retribusi ini dikarenakan kebijakan pembatasan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah pada masa pandemi Covid-19. Hasil Retribusi Jasa Usaha yang terinci sebagaimana Tabel 2.5.

Table 2.5 Capaian Hasil Retribusi Jasa Usaha Kab. Kudus TA 2022

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.941.309.305	7.468.235.199	68,26
Retribusi Terminal	150.849.000	121.272.400	80,39
Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.539.882.000	1.605.396.000	104,25
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	275.897.000	282.500.000	102,39
Retribusi Rumah Potong Hewan	51.823.000	51.924.000	100,19
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.970.057.000	2.835.394.000	95,47
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	61.694.000	43.570.500	70,62
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.941.309.305	7.468.235.199	68,26
Retribusi Terminal	150.849.000	121.272.400	80,39
Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.539.882.000	1.605.396.000	104,25
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	275.897.000	282.500.000	102,39
Retribusi Rumah Potong Hewan	51.823.000	51.924.000	100,19
TOTAL	15.991.511.305	12.408.292.099	77,59

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

Retribusi Perizinan Tertentu target sebesar Rp2.249.262.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp2.861.870.970,00 atau sebesar 127,24% dari target yang telah ditetapkan. Retribusi Perizinan Tertentu dapat mencapai target antara lain karena gencarnya sosialisasi, pendampingan, dan pemantauan terhadap penggunaan sistem online (OSS - Online Single Submission). Hasil Retribusi Perizinan Tertentu yang terinci sebagaimana Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Capaian Hasil Retribusi Jasa Usaha Kab. Kudus TA 2022

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.232.462.000	2.834.470.970	126,97
Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	16.800.000	27.400.000	163,10
TOTAL	2.249.262.000	2.861.870.970	127,24

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp8.371.225.490,00 dari target sebesar Rp9.277.165.000,00 atau sebesar 90,23% dari target yang telah ditetapkan. Hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta yang terinci sebagaimana Tabel 2.7. Tidak tercapainya target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dikarenakan kondisi pandemi yang berdampak pada melemahnya sebagian bisnis yang dikelola BUMD.

Table 2.7 Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Kudus TA 2022

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
PD BPR Bank Pasar	204.521.000	0	0,00
PD BPR BKK Kudus	562.786.000	0	0,00
PDAM Tirta Dharma	1.760.396.000	1.458.924.343	82,87
Bank Jateng	6.749.462.000	6.912.301.147	102,41
TOTAL	9.277.165.000	8.371.225.490	90,23

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp. 323.764.800.221,00 dari target sebesar Rp. 195.967.480.000,00 atau sebesar 165,21% dengan rincian sebagaimana dalam **Tabel 2.8**.

Tabel 2.8 Capaian Lain-Lain PAD Yang Sah Kab Kudus TA 2022

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	571.494.199,00	0
Hasil Penjualan Aset Lainnya	1.242.413.000,00	108.010.000,00	8,69
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	120.000.000,00	100.000.000,00	83,33
Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0,00	34.594.900,00	0,00
Jasa Giro	5.988.295.000,00	3.850.699.720,00	64,30
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	9.712.305.000,00	10.821.917.776,00	111,42
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	1.151.477.848,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	448.187.037,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	917.117.000,00	760.559.396,00	82,93
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	12.911.000,00	39.821.439,00	308,43
Pendapatan dari Pengembalian	99.016.000,00	470.961.837,00	475,64
Pendapatan BLUD	177.874.397.000,00	304.985.630.961,00	171,46
Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0,00	407.045.108,00	0,00

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.026.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	14.400.000,00	0,00
Lain-Lain PAD Yang Sah	195.967.480.000,00	323.764.800.221,00	165,21

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

2.5 DANA TRANSFER

Target Pendapatan Transfer TA 2021 ditetapkan sebesar Rp1.548.266.507.950,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.583.730.741.223,00 atau sebesar 102,29%. Target penerimaan ini terdiri Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditargetkan sebesar Rp1.387.168.960.950,00 terealisasi sebesar Rp1.403.607.437.771,00 atau sebesar 101,19%. Tingginya realisasi ini disumbang oleh tingginya realisasi Dana Bagi Hasil yang mencapai 109,25%. Hal yang sama juga dialami Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terealisasi 111,81% atau sebesar Rp180.123.303.452,00 dari target sebesar Rp161.097.547.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer yang melebihi target khususnya pada akun Dana Bagi Hasil menunjukkan perekonomian yang sedang bangkit dari dampak pandemi.

Tabel 2.9 Capaian Dana Transfer Kab Kudus TA 2022

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
PENDAPATAN TRANSFER	1.548.266.507.950	1.658.338.656.274	101,77
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.387.168.960.950	1.477.044.543.502	100,05
Dana Bagi Hasil	254.419.178.000	279.196.280.839	109,74
Dana Alokasi Umum	747.504.503.000	741.118.818.488	99,15
Dana Alokasi Khusus	312.306.843.439	294.643.410.175	94,34
Dana Insentif Daerah	15.963.044.000	15.963.044.000	100,00
Dana Desa yang bersumber dari APBN	146.122.990.000	146.122.990.000	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	153.202.697.000	181.294.112.772	118,34
Bagi Hasil Pajak Provinsi	143.549.697.000	171.893.652.772	119,75
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	9.653.000.000	9.400.460.000	97,38

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 14 Januari 2022)

2.6 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Tabel 2.10 menunjukkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp71.117.310.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp51.046.111.000,00 atau sebesar 71,78% dari target yang ditetapkan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundangan-undangan (untuk tahun 2021 adalah target Bantuan Operasional Sekolah dari APBN). Dari kedua akun tersebut yang tidak tercapai adalah Pendapatan Hibah. Pendapatan Hibah ini merupakan skema hibah sesuai PP 2/2012 yang diperoleh sebagai bagian dari penguatan PDAM melalui insentif pemasangan sambungan rumah (SR) untuk masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR). Pendapatan ini selanjutnya diteruskan sebagai penanaman modal pemerintah daerah kepada PDAM. Tidak tercapainya target penerimaan ini karena pemasangan SR yang masih di bawah target yang ditetapkan dalam perjanjian hibah daerah.

Tabel 2.10 Capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Kudus TA 2022

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
Pendapatan Hibah	4.500.000.000	1.716.000.000	38,13
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
TOTAL	4.500.000.000	1.716.000.000	38,13

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

2.7 ANGGARAN DAN REALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PER URUSAN

Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka dianggarkan alokasi belanja bagi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis masing-masing urusan pemerintahan.

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk belanja dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun 2022 sebesar Rp. 2.580.511.409.364,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 2.231.543.091.851,00 atau mencapai 86,48 %.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2022 tersebut tersebar untuk membiayai pelaksanaan 32 (Tiga Puluh Dua) Urusan ditambah Fungsi Penunjang Urusan, terbagi menjadi 6

(enam) Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar, 18 (Delapan Belas) Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dan 8 (Delapan) Urusan Pilihan serta Fungsi Penunjang Urusan. Adapun komposisi realisasi belanja per urusan dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut ini :

TABEL 2.11
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PER URUSAN TA 2022

NO	URUSAN	ANGGARAN DAN REALISASI		
		Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	%
A	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.633.337.836.152	1.416.083.513.550	86,70
1.	Pendidikan	686.156.197.082	601.593.245.019	87,68
2.	Kesehatan	664.583.115.740	546.077.477.334	82,17
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	102.274.637.313	96.908.401.244	94,75
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	63.371.898.184	60.184.902.690	94,97
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	15.235.898.602	13.792.607.961	90,53
6.	Sosial	101.716.089.231	97.526.879.302	95,88
B	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	187.869.849.196	163.150.001.599	86,84
7.	Tenaga Kerja	27.316.046.685	18.147.958.277	66,44
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.011.273.226	778.988.340	77,03
9.	Pangan	3.553.541.350	3.531.221.075	99,37
10.	Pertanahan	425.000.000	276.405.840	65,04
11.	Lingkungan Hidup	11.920.443.871	11.370.421.388	95,39
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.686.632.973	9.040.240.225	93,33
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.672.108.082	9.921.256.960	85,00
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.494.332.800	3.292.921.875	38,77
15.	Perhubungan	23.203.492.982	21.808.665.640	93,99
16.	Komunikasi & Informatika	35.780.188.171	34.413.667.525	96,18
17.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	4.152.764.860	3.415.999.100	82,26
18.	Penanaman Modal	12.314.831.621	10.550.337.867	85,67
19.	Kepemudaan dan Olahraga	16.663.951.329	16.356.608.050	98,16
20.	Statistik	67.382.600	57.289.080	85,02
21.	Persandian	111.596.660	46.630.579	41,78
22.	Kebudayaan	15.857.174.956	14.967.000.712	94,39
23.	Perpustakaan	30.950.000	30.829.000	99,61
24.	Kearsipan	5.608.137.030	5.143.560.066	91,72

C	Urusan Pilihan	125.114.206.109	67.235.169.469	53,74
	25. Kelautan dan Perikanan	564.799.404	545.682.820	96,62
	26. Pariwisata	5.540.248.219	5.085.652.012	91,79
	27. Pertanian	26.863.067.097	25.193.795.354	93,79
	28. Kehutanan	7.000.000	6.720.115	96,00
	29. Energi dan Sumber Daya Mineral	1.950.000	1.950.000	100,00
	30. Perdagangan	36.159.245.957	28.098.442.775	77,71
	31. Perindustrian	55.972.895.432	8.297.926.393	14,82
	32. Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100,00
D	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	634.189.517.907	585.074.407.233	92,26
	33. Administrasi Pemerintahan	120.264.291.057	113.581.042.337	94,44
	34. Pengawasan	10.176.789.954	9.417.472.848	92,54
	35. Perencanaan	11.203.947.531	10.363.684.330	92,50
	36. Keuangan	315.451.114.941	301.086.629.324	95,45
	37. Kepegawaian	11.614.182.379	10.197.561.614	87,80
	38. Pendidikan dan Pelatihan	1.240.087.340	849.631.620	68,51
	39. Penelitian dan Pengembangan	335.670.000	321.293.673	95,72
	40. Sekretariat DPRD	97.155.331.604	75.482.332.424	77,69
	41. Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	59.707.909.020	57.077.186.102	95,59
	42. Kesatuan Bangsa dan Politik	7.040.194.081	6.697.572.961	95,13
	JUMLAH BELANJA	2.580.511.409.364	2.231.543.091.851	86,48

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

2.8 PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGELOLAAN KEUANGAN

Permasalahan

Pengelolaan pendapatan daerah TA 2022 di Kabupaten Kudus masih dipengaruhi adanya kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Secara rinci, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam kegiatan pengelolaan pendapatan daerah TA 2022 antara lain:

- 1) Kesadaran masyarakat baik selaku Wajib Pajak maupun sebagai Wajib Pungut dalam membayar pajak dan retribusi masih rendah;
- 2) Selisih NJOP PBB P2 dalam SPPT dibandingkan dengan nilai jual riil yang cukup tinggi;
- 3) Nilai acuan tanah dalam transaksi jual beli sebagai dasar penghitungan BPHTB belum tersedia;
- 4) Pengelolaan data dan sistem informasi yang kurang memadai;
- 5) Pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah kurang memadai;

- 6) Pengelolaan BUMD yang kurang optimal;
- 7) Pemanfaatan aset daerah kurang optimal;
- 8) Kapasitas sumber daya yang terbatas..

Alternatif Solusi

Dari rumusan masalah yang teridentifikasi, terdapat beberapa alternatif solusi yang diupayakan dalam rangka menyikapi permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Mengadakan penyuluhan, sosialisasi, layanan konsultasi, dan pembinaan secara berkesinambungan serta melaksanakan pendekatan secara terus menerus terhadap wajib pajak/retribusi dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Melakukan penyesuaian NJOP PBB P2 lebih mendekati harga pasar;
- 3) Mengkaji ketersediaan acuan nilai tanah sebagai dasar penghitungan BPHTB;
- 4) Melakukan pemutakhiran data dan mengembangkan sistem informasi sebagai bagian sistem pendukung keputusan;
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam meningkatkan pengendalian dan pengawasan aktivitas perpajakan di daerah, termasuk menyusun road map percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebagai bagian sistem pengendalian dan pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 6) Memperkuat pembinaan dan pengawasan BUMD melalui perekrutan dewan pengawas yang lebih baik;
- 7) Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar memberikan hasil yang optimal;
- 8) Mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya secara berkelanjutan;
- 9) Melakukan koordinasi yang lebih baik terkait dana-dana transfer dan mengidentifikasi variabel-variabel penghitungan alokasi untuk memproyeksikan pendapatan transfer ke depan.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensi sebuah negara kesatuan, diperlukan adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah diselenggarakan diantaranya melalui asas desentralisasi. Sedangkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan umum dapat didistribusikan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Dalam rangka desentralisasi, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 9 ayat (4) yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Lebih jauh dijabarkan pada Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren pada pasal 11 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Selanjutnya pembagian kewenangan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ditindaklanjuti dengan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib sejumlah 24 Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 6 (Enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 18 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selain urusan wajib sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten juga memiliki opsi untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sebanyak 8 Urusan Pemerintahan Pilihan. Adapun pelaksanaan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan adalah sebagai berikut:

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Penjabaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Kudus tertuang dalam Program dan Kegiatan yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus. Selanjutnya capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana di bawah ini, yang antara lain memuat:

- Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
- Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan Pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung Pemerintahan sesuai target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.
- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

RINGKASAN URUSAN WAJIB RINGKASAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Wajib yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus meliputi 24 Jenis Urusan yang terdiri dari 6 (enam) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta 18 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Khusus untuk capaian penyelenggaraan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pelaporannya juga disampaikan melalui Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus terdiri atas Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Sosial, serta Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Selanjutnya penyelenggaraan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sekolah terakreditasi A	74,16 %	74,16 %	Sumber Dana dari APBN (BOP PAUD, Dikmas, BOS SD dan SMP) yang pencairan langsung ke sekolah/lembaga sehingga dalam penSPJan menunggu Rekonsiliasi dari Pemerintah Pusat	Untuk Capaian Kinerja agar dipertahankan di tahun depan sedangkan untuk realisasi anggaran agar lebih ditingkatkan lagi supaya seimbang dengan capaian kinerja	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Infrastruktur SD dalam kondisi baik	74 %	74 %			
					Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang memenuhi Kompetensi	2800 orang	2800 orang			
					Jumlah Pendidik SD yang Bersertifikasi	2700 orang	2700 orang			
					Persentase sekolah terakreditasi A	74 %	74 %			
				Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru	2 ruang	2 ruang			
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	1 ruang	1 ruang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang terbangun	1 ruang	1 ruang			
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang terbangun (DAK)	1 orang	1 orang			
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang Perpustakaan yang terbangun	2 orang	2 orang			
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terbangun	23 sekolah	23 sekolah			
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terbangun (DAK)	1 sekolah	1 sekolah			
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah swasta yang terbangun	1 ruang	1 ruang			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	jumlah ruang kelas yang direhab	77 ruang	77 ruang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Jumlah ruang kelas yang direhab (DAK)	4 ruang	4 ruang			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terehab	8 paket	8 paket			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terehab	2 sekolah	2 sekolah			
				Pengadaan Mebel Sekolah	Penambahan Jumlah Mebel sekolah	800 set	800 set			
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Peraga Siswa (SD)	1 sekolah	1 sekolah			
					Jumlah Alat Peraga Praktik TIK (SD)	294 sekolah	294 sekolah			
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah dokumen pedoman penyusunan kalender pendidikan dasar	1 dokumen	1 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					dokumen dapodik dan kelulusan jenjang sekolah dasar	2 dokumen	2 dokumen			
					Nilai rata-rata kelulusan sekolah dasar	1 kegiatan	1 kegiatan			
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	jumlah sekolah yang dimerger	2 sekolah	2 sekolah			
					Jumlah sekolah terakreditasi	1 kegiatan	1 kegiatan			
					Dokumen SPM jenjang sekolah dasar	1 dokumen	1 dokumen			
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah prestasi lomba jenjang sekolah dasar tk. provinsi. nasional dan internasional	1 kegiatan	1 kegiatan			
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	dokumen pendidik sekolah dasar pns dan non pns yang bersertifikasi pendidik	4 dokumen	4 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima BOS APBD Kabupaten	425 sekolah	425 sekolah			
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah penerima BOS	400 sekolah	400 sekolah			
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium yang terbangun (DAK)	2 ruang	2 ruang			
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	dokumen hasil Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. BOS Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Pengelolaan Sarpras Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.	48 dokumen	48 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Peningkatan Mutu PTK Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai standar (realisasi dan capaian fisik.anggaran.iku sasaran.iku program beserta analisis.rekom. data dukungnya)					
					Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang memenuhi Kompetensi	1050 orang	1050 orang			
					JUmlah Pendidik SMP yang bersertifikasi Pendidik	1100 orang	1100 orang			
					Jumlah tenaga penunjang yang memenuhi kompetensi	900 orang	900 orang			
				Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru (SMP)	1 paket	1 paket			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Ruang Perpustakaan	1 paket	1 paket			
				Pembangunan Laboratorium	Pembangunan Ruang Laboratorium	2 paket	2 paket			
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terbangun	3 sekolah	3 sekolah			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	jumlah ruang kelas yang direhab	2 ruang	2 ruang			
					Jumlah ruang kelas yang direhab (DAK)	2 ruang	2 ruang			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang terehab	1 sekolah	1 sekolah			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Ruang laboratorium yang terehab	2 ruang	2 ruang			
					Jumlah Ruang laboratorium yang terehab (DAK)	2 ruang	2 ruang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jamban, Lapangan Upacara, Mushola dan Pagar sekolah yang terehab	3 paket	3 paket			
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terehab (DAK)	1 sekolah	1 sekolah			
				Pengadaan Mebel Sekolah	pengadaan mebel siswa (SMP)	1400 set	1400 set			
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa kurang mampu yg menerima beasiswa	541 siswa	520 siswa			
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah dokumen pedoman penyusunan kalender pendidikan sekolah menengah pertama	1 dokumen	1 dokumen			
					dokumen dapodik dan kelulusan jenjang sekolah menengah pertama	2 dokumen	2 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Nilai rata-rata kelulusan tingkat SMP	1 kegiatan	1 kegiatan			
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah terakreditasi	50 sekolah	50 sekolah			
					Jumlah Dokumen SPM jenjang sekolah menengah pertama	1 dokumen	1 dokumen			
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah prestasi lomba jenjang sekolah menengah pertama tk. provinsi. nasional dan internasional	1 kegiatan	1 kegiatan			
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	dokumen pendidik sekolah menengah pertama pns dan non pns yang bersertifikasi pendidik	4 dokumen	4 dokumen			
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	laporan jumlah siswa penerima BOS	4 dokumen	4 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah penerima BOS	50 sekolah	50 sekolah			
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Infrastruktur PAUD dalam kondisi baik	2900 ruang	2900 ruang			
					Jumlah Lembaga PAUD yang terakreditasi	200 lembaga	200 lembaga			
					Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang memenuhi Kompetensi	250 orang	250 orang			
					Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang sesuai Kompetensi	24 dokumen	24 dokumen			
					Jumlah pendidik PAUD yang bersertifikasi	50 orang	50 orang			
					Jumlah Pendidik yang bersertifikasi	0	0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang terbangun	4 lembaga	4 lembaga			
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang terbangun	11 lembaga	11 lembaga			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terehab	8 lembaga	8 lembaga			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Lembaga yang Mendapat Hibah Rehabilitasi/ Pembangunan Kamar Mandi, UKS, Perpustakaan, Dapur PAUD	7 lembaga	7 lembaga			
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Lembaga yang Mendapat Hibah Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	1 lembaga	1 lembaga			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Jumlah Lembaga yang mendapat bantuan pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) DAK Fisik	32 lembaga	32 lembaga			
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	jumlah dokumen pedoman penyusunan kalender PAUD	1 dokumen	1 dokumen			
					Jumlah peserta sosialisasi proses belajar PAUD	100 orang	100 orang			
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Dokumen Akreditasi PAUD	4 dokumen	4 dokumen			
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik PAUD non ASN/PNS yang diberi tunjangan	1430 orang	1430 orang			
					Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan kompetensi berjenjang	300 pendidik	300 pendidik			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	- Fasilitasi Kegiatan BOP PAUD, - Fasilitasi Kegiatan Lomba - Lomba PAUD, - Fasilitasi Kegiatan Monitoring PAUD	3 kegiatan	3 kegiatan			
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pelaksanaan pengelolaan oprasional penyelenggaraan PAUD	1 tahun	1 tahun			
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan. Peningkatan Mutu PTK sesuai standar (realisasi dan capaian fisik.anggaran.iku sasaran.iku program beserta analisis.rekom. data dukungnya)	1 tahun	1 tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PKBM yang terakreditasi	1 tahun	1 tahun			
					jumlah dokumen pedoman penyusunan kalender Pendidikan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen			
					pelatihan kecakapan hidup peserta didik pendidikan kesetaraan	52 orang	52 orang			
					Publikasi Bidang PAUD DIKMAS	3 paket	3 paket			
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Sosialisasi Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK)	65 orang	65 orang			
					Rakor Penulisan Ijazah Pendidikan Kesetaraan	65 orang	65 orang			
					Monitoring Evaluasi Kegiatan Ujian Modul Pendidikan Kesetaraan	16 lembaga	16 lembaga			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta sosialisasi Dapodik PAUD dan Dikmas	68 orang	68 orang			
					Monitoring Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan	16 lembaga	16 lembaga			
					Sosialisasi Implementasi Kurikulum Pendidikan Kesetaraan	50 orang	50 orang			
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Pengelolaan dana Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (BOP)	24 lembaga	24 lembaga			
				<i>Program Pengendalian Perizinan Pendidikan</i>	<i>Fasilitasi Perijinan PAUD dan Dikmas</i>	<i>1 tahun</i>	<i>1 tahun</i>			
				Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Fasilitasi lembaga yang mengajukan persyaratan yang sesuai	1 kegiatan	1 kegiatan			
					Indeks kepuasan	83 %	83 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					masyarakat					
				Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pendidik yang mengikuti Bintek Penyelenggaraan PAUD	100 orang	100 orang			
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan		<i>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	<i>Cakupan pelayanan pengendalian penyakit</i>	100 %	72,94 %	Kegiatan yang bersumber anggaran dari DBHCHT ada penundaan pelaksanaan karena menunggu penetapan DPPA hasil desk/ verifikasi sesuai dengan PMK 215/PMK.07/2021 sehingga baru bisa mulai dilaksanakan pada Bulan Mei (triwulan II); ketersediaan barang sesuai dengan standar/ spesifikasi dari Kemenkes; ada rincian kegiatan	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan	
				<i>Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat</i>	100 %	95,4 %				
				<i>Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)</i>	100 %	100 %				
				<i>Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun</i>	18,79 %	5,85 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Terlaksananya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	20 lokasi	20 lokasi	yang dialokasikan anggaran lebih dari dua sumber dana sehingga tidak bisa direalisasikan sehingga mempengaruhi dalam pencapaian target realisasi keuangan		
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Puskesmas/Pustu	6 unit	6 unit			
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat antropometri	1 paket	1 paket			
					Jumlah pengadaan sarana air bersih	1 paket	1 paket			
					Jumlah pengadaan set laboratorium	1 paket	1 paket			
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat telekonsultasi USG 2D Digital	1 paket	1 paket			
					Jumlah pengadaan sistem informasi penguatan penurunan AKI AKB	1 paket	1 paket			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Jumlah penyediaan alat Labkes	1 paket	1 paket			
				Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah pengadaan obat	3 jjenis	3 jjenis			
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jmlh pengadaan bahan habis pakai/ reagen	4 jenis	4 jenis			
				Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fas. Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya kegiatan P3K dan pemeliharaan PSC 119	12 bulan	12 bulan			
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alkes/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala alat kesehatan alat penunjang medik	4 jenis	4 jenis			
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas	Jumlah pelaksanaan monitoring distribusi alkes, obat, vaksin dan BMHP	20 lokasi	20 lokasi			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Kesehatan Lainnya						
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah KabKota	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	9 kec	9 kec			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17118 bumil	16329 bumil			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16340 ibu bersalin	16340 ibu bersalin			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15562 bayi	15409 bayi			
				Pengelolaan Pelayanan	Jumlah balita yang mendapatkan	77103 balita	70179 balita			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Kesehatan Balita	elayanan kesehatan sesuai standar					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah siswa usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	41205 siswa	37736 siswa			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	576104 orang	276645 orang			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88188 orang	65868 orang			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	umlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	231173 orang	120302 orang			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah penderita Diabetes Melitus yg mendapatkan	17933 orang	16541 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penderita Diabetes Melitus	pelayanan kesehatan sesuai standar					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10620 kasus	7743 kasus			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dg risiko terinfeksi HIV yg mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	19549 kasus	19121 kasus			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	2 kejadian	2 kejjadian			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah ibu hamil KEK yg mendapat makanan tambahan	219 bumil	219 bumil			
					Jumlah balita kurus yang yang mendapat makanan	300 balita	300 balita			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					tambahan					
					Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	4950 bayi	4950 bayi			
					Jumlah ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah	16910 bumil	16910 bumil			
					Jumlah remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah	22250 siswa	22250 siswa			
					Jumlah pemberian PMT penyandang status sosial	15 paket	15 paket			
					Jumlah pemberian PMT Penyuluhan Rumah Gizi	25 paket	25 paket			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pekerja/ calon jamaah haji/ anak sekolah yang dilakukan pengukuran/ tes kebugaran	2100 orang	2100 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	715 lokasi	715 lokasi			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah tenaga promosi kesehatan yang mengikuti pelatihan media promosi kesehatan	31 orang	31 orang			
					Jumlah sosialisasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	11 kali	11 kali			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Pembinaan Kesehatan Tradisional dan Akupuntur	19 puskesmas	19 puskesmas			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yg ditanggulangi kurang dr 24 jam	2 kejadian	2 kejadian			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2166 orang	1578 orang			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada penyakit menular (kusta, diare, malaria, DBD, dll) dan penyakit tidak menular lainnya	19 puskesmas	19 puskesmas			
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	85 %	85 %			
				Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan pada orang dengan masalah NAPZA	19 puskesmas	19 puskesmas			
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen	jumlah pengambilan dan pengiriman	50 sampel	50 sampel			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	spesimen penyakit					
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan STBM	132 desa/kel	132 desa/kel			
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang dilakukan penilaian reakreditasi	19 puskesmas	19 puskesmas			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah bayi umur 0-11 bulan yang yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	15105 bayi	15105 bayi			
					Jumlah desa/ kelurahan yang terpenuhi cakupan UCI	132 desa/kel	132 desa/ kel			
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dr 24 jam	2 kejadian	2 kejadian			
				Penyelenggaraan Sistem Informasi	Terlaksananya Pengelolaan	20 lokasi	20 lokasi			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Kesehatan secara Terintegrasi	Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi					
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen informasi kesehatan	4 dokumen	4 dokumen			
				Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Pembayaran jasa jaringan internet Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	12 bulan	12 bulan			
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit Tipe C dan D serta klinik yang memenuhi syarat perizinan	9 lokasi	9 lokasi			
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah rumah sakit kelas C dan D yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka perizinan	9 lokasi	4 lokasi			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang meningkat status akreditasinya	19 puskesmas	19 puskesmas			
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Rumah Sakit untuk pelayanan rujukan	7 dokumen	7 dokumen			
				<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	<i>Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan</i>	92,3 %	96,73 %			
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah praktek mandiri tenaga kesehatan yang memenuhi syarat perijinan	171 lokasi	150 lokasi			
				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah praktik mandiri dokter, perawat, bidan, terapis yang memenuhi izin sesuai standar	171 lokasi	150 lokasi			
					Jumlah tenaga kesehatan yang memenuhi syarat	1400 orang	420 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					perizinan					
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	19 puskesmas	19 puskesmas			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	20 orang	20 orang			
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya koordinasi dan monitoring tenaga kesehatan non PNS	9 kec	9 kec			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jenis tenaga kesehatan yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi	9 jenis	9 jenis			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Kabupaten/Kota						
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemetaan rencana kebutuhan tenaga kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
					Jumlah pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan ASN di lingkup dinas kesehatan, UPT/UPTD, RSUD	2 kali	2 kali			
				<i>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</i>	<i>cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan</i>	91,3 %	96,73 %			
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang	Jumlah P-IRT yang memenuhi syarat perijinan	100 IRT	60 IRT			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri rumah tangga yang dilakukan pembinaan dan sertifikasi	100 IRT	60 IRT			
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	810 lokasi	785 lokasi			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya kegiatan pengawasan/pemeriksaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	810 lokasi	785 lokasi			
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan	9 lokasi	9 lokasi			
				Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya pengawasan/pemeriksaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	9 lokasi	9 lokasi			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah pemeriksaan produk makanan minuman yang beredar	100 lokasi	60 lokasi			
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah pemeriksaan produk makanan minuman yang beredar	100 lokasi	60 lokasi			
				Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah penertbitan sertifikasi perizinan Industri Rumah Tangga	100 lokasi	60 lokasi			
				<i>Program Pemberdayaan Masyarakat</i>	<i>cakupan pelayanan kesehatan</i>	100 %	95,4 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				<i>Bidang Kesehatan</i>	<i>masyarakat</i>					
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/ kel yang dilakukan pembinaan kader kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader	132 desa/kel	132 desa/kel			
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah desa/ kelurahan yang dilakukan pembinaan kader kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader	132 desa/kel	132 desa/kel			
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3 jenis	3 jenis			
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	15 kali	10 kali			
					Jumlah tenaga promosi	25 orang	25 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					kesehatan yang mengikuti pelatihan pengelolaan media sosial institusi dan teknologi informasi					
					Jumlah jenis media publikasi promosi kesehatan	4 jenis	3 jenis			
					Jumlah media publikasi promosi kesehatan	4 kegiatan	3 kegiatan			
					Jumlah publikasi kampanye Germas	15 kali	10 kali			
					Jumlah Tenaga Promkes yang mengikuti pelatihan pengelolaan media sosial institusi dan Teknologi Informas	25 orang	25 orang			
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah desa siaga aktif mandiri	21 desa/kel	21 desa/kel			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/Kota						
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah desa siaga aktif mandiri	21 desa/kel	21 desa/kel			
					jumlah desa siaga aktif mandiri	21 desa	0			
		RSUD dr. LOEKMONO HADI		<i>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	<i>Cakupan Ketersediaan Sarpras Kesehatan Rujukan</i>	100 %	93,84 %	1. BLUD harus mempunyai dana SiLPA untuk menjamin liquiditas BLUD. 2. Kurangnya waktu bagi penyedia. 3. Sistem INAKES dibuka setelah beberapa bulan pelaksanaan.	Kegiatan dilaksanakan sesuai target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan	
					<i>Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>	100 %	165,48 %			
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan rujukan	100 %			93,84 %
					Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan yang	100 %			93,84 %

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	tersedia					
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSUD	100 %	165,48 %			
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah kunjungan pasien di RSUD	134711 pasien	222924 pasien			
				<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	<i>Terbayarnya Insentif Nakes Penanganan Covid-19</i>	100 %	61,54 %			
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	Meningkatnya pelayanan penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2022 (Non ASN)	13 bulan	8 bulan			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai	Terbayarnya Tambahan Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dalam rangka	1 bulan	1 bulan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Standar	penanganan Pandemi Covid-19 Th2021 (Non ASN)					
					Terbayarnya Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 Th 2022 (Non ASN)	12 bulan	7 bulan			
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		<i>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</i>	<i>Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik</i>	84 %	90,02 %	Kegiatan yang bersifat kontraktual banyak keterlambatan dalam proses lelang	lebih ditingkatkan capaian kinerja yang sudah baik di tahun sebelumnya. lakukan perencanaan lebih matang mengantisipasi permasalahan kegiatan kontraktual/lelang cermati kembali formulasi dan target indikator-indikator program, kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU Bupati maupun	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan SDA dan Jaringan Pengairan Lainnya	1144 meter	343 meter			
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan	Jml Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan	1 dokumen	1 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penampung Air Lainnya	Penampung Air Lainnya				OPD, serta tingkatkan fungsi sinergi dan koordinasi dengan pihak eksternal terkait.	
				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	264 m	343 m			
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah jaringan irigasi yg dibangun	1144 m	15672,16 m			
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 unit	2 unit			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah peningkatan jaringan irigasi permukaan	1862 meter	1618,46 meter			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	11644	14053,7			
				Operasi dan Pemeliharaan	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan	252 km	252 km			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Jaringan Irigasi Permukaan	Jaringan Irigasi Permukaan					
				Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Operasional Unit Pengelola Irigasi	1 unit	1 unit			
				<i>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</i>	<i>Persentase penduduk berakses air minum (Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari)</i>	99 %	98,25 %			
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	5 unit	5 unit			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jml Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 dokumen	1 dokumen			
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan	jml peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan	551 SR	460 SR			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Perdesaan	perdesaan					
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jmlh Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	2 kel masy	2 kel masy			
				<i>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</i>	<i>Prosentase Infrastruktur persampahan dalam kondisi baik</i>	50 %	50 %			
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kab/Kota	5 unit	5 unit			
				Pembangunan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Jumlah Pembangunan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	6250 RT	6250 RT			
				<i>Program Pengelolaan dan Pengembangan</i>	<i>Persentase rumah tinggal bersanitasi</i>	100 %	100 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				<i>Sistem Air Limbah</i>						
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota	100 %	100 %			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen			
				<i>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</i>	<i>Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat</i>	65 %	65 %			
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase	1 dok	1 dok			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2118 m	2085,49 m			
				Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah saluran drainase perkotaan yang ditingkatkan	145 m	145 m			
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	5 km	5 km			
				<i>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</i>	<i>Persentase Rekomendasi teknis perijinan pembangunan yang sesuai standart pelayanan</i>	55 %	55 %			
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Berita Acara Advice Panning dan Berita Acara TABG	10 dokumen	11 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 dokumen tasi	1 dokumentasi			
				Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 unit	6 unit			
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik	87 %	95,45 %			
					Persentase jumlah jembatan kabupaten dalam	90,46 %	91,06 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					<i>kondisi mantap</i>					
					<i>Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap</i>	<i>91,43 %</i>	<i>93,34 %</i>			
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap	14,8 km	35,69 km			
				Pembangunan Jalan	Jumlah Pembangunan Jalan	7,43 km	17,49 km			
				Rehabilitasi Jalan	Jumlah Rehabilitasi Jalan	7,37 km	18,2 km			
				Pembangunan Jembatan	Jumlah Pembangunan Jembatan	6 unit	7 unit			
				Penggantian Jembatan	Jumlah Pergantian Jembatan	2 unit	2 unit			
				Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Rehabilitasi Jembatan	1 unit	1 unit			
				Penanggulangan Bencana/	Jumlah Pemeliharaan Alat	1 unit	1 unit			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Tanggap Darurat	berat					
				<i>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</i>	<i>Persentase ketaatan rencana tata ruang</i>	100 %	100 %			
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	100 %	100 %			
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen			
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	2 kali	2 kali			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata	Dokumen Perencanaan Tata Ruang Daerah	100 %	100 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 bulan	12 bulan			
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		<i>Program Pengembangan Perumahan</i>	<i>Cakupan ketersediaan rumah layak huni</i>	98,2 %	97,25 %	1. pencemaran lingkungan 2. Semakin meningkatnya backlog perumahan dan tingginya harga perumahan	evaluasi faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja, dan evaluasi target kinerja tahun ini yang belum	
					<i>Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni</i>	100 %	100 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					(SPM) <i>Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni (SPM)</i>	100 %	100 %	berpotensi adanya permukiman kumuh 3. Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang meningkat mempengaruhi kinerja pengelolaan persampahan 4. Keterbatasan lahan dalam peningkatan luas ruang terbuka hijau, overkapasitas TPA	memenuhi target maupun penetapan target kinerja yang terlalu rendah sehingga belum memenuhi kriteria SMART-C sebagai upaya perbaikan perencanaan kegiatan di tahun mendatang dengan penetapan target yang lebih menantang	
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyiapan pelaksanaan SPM Bidang Perumahan sesuai standar	1 dokumen	1 dokumen			
				Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota atau yang terkena relokasi program	1 dokumen	1 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Kabupaten/Kota yang terverifikasi					
					Pendataan perumahan di lokasi rawan bencana	1 paket	1 paket			
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Presentase okupansi rusunawa	50,25 %	46,21 %			
				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	1 dokumen	1 dokumen			
			Pembayaran tenaga rusunawa		288 OB	288 OB				
			Pengelolaan rusunawa		1 tahun	1 tahun				
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Presentase pengesahan siteplan sesuai standar pelayanan	100 %	0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 laporan	1 laporan			
					Fasilitasi dokumen siteplan	1 kegiatan	0			
				<i>Program Kawasan Permukiman</i>	<i>Persentase lingkungan permukiman kumuh</i>	<i>0,04 %</i>	<i>0,02 %</i>			
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas kawasan kumuh yang tertangani	136,51 Ha	136,81 Ha			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Pere majaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/ peremajaan permukiman	1 laporan	1 laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					kumuh					
					Sosialisasi penanganan permukiman kumuh	1 kegiatan	1 kegiatan			
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Presentase RTLH yang diperbaiki	100 %	0			
				Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	0	0			
				<i>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</i>	<i>Cakupan ketersediaan rumah layak huni</i>	<i>98,2 persen</i>	<i>97,25 persen</i>			
					<i>Persentase kawasan lingkungan permukiman yang layak</i>	<i>99,08 persen</i>	<i>99,98 persen</i>			
				Urusan Penyelenggaraan	Presentase	10 %	10 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				PSU Perumahan	perbaiki PSU					
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	2 lokasi	2 lokasi			
					Pembayaran rekening listrik LPJU	12 bulan	12 bulan			
					Pembayaran tenaga pemeliharaan LPJU	300 OB	299 OB			
					Material LPJU	21 jenis	21 jenis			
					Pemasangan LPJU	1 paket	1 paket			
					Pengawasan pemasangan LPJU	1 paket	0			
					Perencanaan pemasangan LPJU	1 paket	1			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas</i>	75 %	91,71 %	Masih belum memadainya dukungan dana operasional, sarana prasarana penunjang kegiatan serta kualitas SDM yang belum mencukupi sehingga pelaksanaan kegiatan belum maksimal.	Dengan adanya perubahan Renstra OPD agar target program/kegiatan /sub kegiatan juga disesuaikan, Diperlukan upaya optimalisasi ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah	
					<i>Cakupan penegakan Perda dan Perkada</i>	83 %	100 %			
					<i>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota</i>	83 %	100 %			
					<i>Rasio Linmas per Jumlah RT</i>	1,34 orang/RT	1,36 orang/RT			
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	15 jenis	8 jenis			
Pencegahan Gangguan Ketenteraman	Jumlah Pencegahan Gangguan	30 kali	26 kali							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini					
					Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Pembinaan dan Penyuluhan	6 kali	164 kali			
					Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Pelaksanaan Patroli	100 kali	211 kali			
					Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum melalui Pengamanan dan Pengawasan	20 kali	146 kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Tenaga Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	60 orang	62 orang			
				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban	133 kali	133 kali			
					Jumlah Penanganan Unjuk Rasa	20 kali	2 kali			
					Jumlah Penanganan Kerusuhan Massa	20 kali	0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota	316 kali	31 kali			
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Satlinmas yang meningkat kompetensinya	400 orang	300 orang			
					Jumlah anggota linmas yang diberdayakan	300 orang	400 orang			
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Satpol PP dan Satlinmas yang meningkat kapasitasnya di Bidang HAM	200 orang	400 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	1 kali	1 kali			
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiba Umum dalam keadaan baik	0 unit	0			
					Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Keadaan baik	31 stel	31 stel			
				Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	9 dokumen	9 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	3 kasus	0			
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Strategi Penegakan Perda dan Perkada	3 strategi	3 strategi			
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah peserta sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati / walikota	25 orang	25 orang			
					sosialisasi melalui publikasi kegiatan penegakan perda dan perkada	1 kali tayang	1 kali tayang			
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pembinaan pengawasan dan penyuluhan perda dan perkada tentang trantibum	100 kali	59 kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Operasi KTR dan KTM	86 kali	75 kali			
				<i>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	<i>Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten</i>	<i>85 persen</i>	<i>100 persen</i>			
			<i>Cakupan penanganan penyelamatan non kebakaran kabupaten</i>		<i>100 %</i>	<i>100 %</i>				
			<i>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</i>		<i>85 persen</i>	<i>100 persen</i>				
			<i>Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi</i>		<i>100 %</i>	<i>100 %</i>				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					<i>Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)</i>	<i>7 menit</i>	<i>15,75 menit</i>			
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	31 kejadian	66 kejadian			
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota	21 kasus kejadian	66 kasus (kejadian)			
					Jumlah Pengadaan Sarpras Damkar	3 unit	63 unit			
					Jumlah Pemeliharaan Sarpras Damkar	3 unit	0			
					Jumlah TKP Damkar	26 orang	26 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	300 obyek	96 obyek			
				Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Layanan Pemeriksaan APAR	1200 unit	6751 unit			
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		<i>Program Penanggulangan Bencana</i>	<i>cakupan pelayanan penanggulangan bencana</i>	100 %	100 %	Penghitungan anggaran belanja Gaji pada BPBD Kabupaten Kudus dirasa terlalu tinggi disesuaikan dengan ASN yang ada, sehingga mengakibatkan capaian realisasi anggaran tidak dapat maksimal	Penentuan target program/kegiatan /sub kegiatan, agar benar-benar diperhitungkan antara pagu, jadwal dan target pada IKU OPD yang telah ditentukan. Adanya perubahan Renstra OPD agar target program/kegiatan /sub kegiatan juga disesuaikan. Perlu dilaksanakan upaya untuk mengoptimalkan ketersediaan data	
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1 paket	1 paket				
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen				
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten yang terlaksana	1000 orang	1000 orang				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1 paket	1 paket		dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah.	
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	1 dokumen	1 dokumen			
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 desa	1 desa			
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	12 bulan	12 bulan			
				Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Penanganan Darurat	1 tahun	1 tahun			
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat	1 kali	1 kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Kabupaten/Kota	(TRC) Bencana					
				Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Penyusunan Rencana Kontijensi	1 dokumen	1 dokumen			
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	0			
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1 paket	1 paket			
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Perbaikan perahu karet	1 tahun	1 tahun			
					perbaikan chain saw	6 unit	6 unit			
					perbaikan pompa air	5 unit	5 unit			
					perbaikan felbed	35 unit	35 unit			
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana	12 bulan	12 bulan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Logistik bahan bangunan	6 jenis	6 jenis			
					Logistik pangan	6 jenis	6 jenis			
					Logistik air bersih	520 m ³	520 m ³			
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		<i>Program Penanganan Bencana</i>	<i>cakupan pelayanan penanggulangan bencana</i>	100 %	100 %	Penghitungan anggaran belanja Gaji pada BPBD Kabupaten Kudus dirasa terlalu tinggi disesuaikan dengan ASN yang ada, sehingga mengakibatkan capaian realisasi anggaran tidak dapat maksimal	Penentuan target program/kegiatan /sub kegiatan, agar benar-benar diperhitungkan antara pagu, jadwal dan target pada IKU OPD yang telah ditentukan. Adanya perubahan Renstra OPD agar target program/kegiatan /sub kegiatan juga disesuaikan. Perlu dilaksanakan upaya untuk mengoptimalkan	
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	terbentuknya desa tangguh bencana	1 desa	1 desa			
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana	3 kali	3 kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
									ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah	
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar	85 persen	85 persen	Tidak tersedia data base (untuk mengantisipasi kebutuhan tidak terduga)	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan	
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang aktif menangani PMKS	10 lembaga	10 lembaga				
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang aktif menangani PMKS	8 lembaga	10 lembaga				
				Honorarium TKSK	9 orang	9 orang				
				Pembinaan kepada LK3	1 kegiatan	1 kegiatan				
				Pembinaan kepada panti	10	10				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					sosial swasta	lembaga	lembaga			
					Pendataan lembaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif menangani PMKS	1 dokumen	1 dokumen			
					Fasilitasi program keluarga harapan	12 bulan	12 bulan			
				<i>Program Rehabilitasi Sosial</i>	<i>Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar</i>	<i>45 %</i>	<i>88,85 %</i>			
					<i>Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial</i>	<i>30,4 persen</i>	<i>31,71 persen</i>			
					<i>Persentase PMKS yang mengalami graduasi setelah mendapat bantuan kebutuhan dasar</i>	<i>15 persen</i>	<i>10,5 persen</i>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah disabel terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Pengemis, Gelandangan yang mendapat rehabilitasi sosial	249 orang	249 orang			
				Penyediaan Permakanan	Jumlah pemberian nutrisi kepada penyandang disabilitas dan lansia kurang mampu	50 orang	50 orang			
				Penyediaan Sandang	Jumlah pemberian sandang kepada penyandang disabilitas terlantar dan anak kurang mampu	50 orang	50 orang			
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat alat	72 orang	72 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					bantu					
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PGOT yang dikembalikan kepada keluarga	10 orang	10 orang			
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas intelektual yang mendapat pelatihan ketrampilan	50 orang	50 orang			
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan pengaduan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial	15 orang	15 orang			
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Operasional penanganan PGOT di panti singgah	12 bulan	12 bulan			
				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS yang mendapat layanan rujukan ke panti Sosial	20 orang	20 orang			
				Rehabilitasi Sosial	Jumlah PMKS selain korban	999 orang	999 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	HIV/AIDS yang mendapat layanan rehabilitasi sosial					
					Jumlah Penyandang Cacat penerima bansos (dalam lembaga)	104 orang	104 orang			
					Jumlah anak terlantar penerima bansos di dalam Panti Sosial	895 orang	895 orang			
					Jumlah anak yatim piatu dan kelayan panti sosial yang mendapat bansos	4148 orang	4148 orang			
					Jumlah Pejuang dan Janda Pejuang DHC 45 yang mendapat santunan bansos	74 orang	74 orang			
					Jumlah Hibah kepada JPPA Kab. Kudus	1 lembaga	1 lembaga			
					Jumlah hibah kepada lembaga	2 lembaga	2 lembaga			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Operasional bansos pemakaman bagi Keluarga tidak mampu	12 bulan	12 bulan			
					Operasional penanggulangan bencana	1 kegiatan	1 kegiatan			
					Operasional Bansos kepada DHC 45	1 kegiatan	1 kegiatan			
					Operasional Bansos kepada anak yatim piatu	1 kegiatan	1 kegiatan			
				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Hibah Kepada PMI	1 lembaga	1 lembaga			
					Hibah Kepada Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kabupaten Kudus	1 lembaga	1 lembaga			
					Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim Piatu dan Kelayan Panti Sosial	4148 orang	4167 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Bantuan Sosial Santunan Terhadap Pejuang dan Janda Pejuang 45	74 orang	74 orang			
					Bantuan Sosial Bagi Penyandang Cacat (PENCA) Kabupaten Kudus	6 lembaga	6 lembaga			
					Bantuan Sosial Untuk Kegiatan Panti - Panti Sosial	10 lembaga	10 lembaga			
				<i>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</i>	<i>persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial</i>	<i>75 %</i>	<i>92,06 %</i>			
					<i>Rasio PMKS</i>	<i>7,67 persen</i>	<i>8,99 persen</i>			
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PMKS dan PSKS tersusun	1 dok	1 dok			
					Pemberian BLT 149.518 jiwa	6 bulan	6 bulan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Pemberian BLT BBM dalam rangka penanganan dampak inflasi 9.700 jiwa	3 bulan	3 bulan			
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan PMKS dan PSKS	0	0			
					Pendataan DTKS	1 dok	1 dok			
					Pendataan penerima hibah dan Bansos	0	0			
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pemberian BLT 149.518 jiwa	6 bulan	6 bulan			
					Pemberian BLT BBM dalam rangka penanganan dampak inflasi 9.700 jiwa	3 bulan	3 bulan			
				<i>Program Penanganan Bencana</i>	<i>Cakupan penanganan korban bencana alam/ sosial</i>	<i>100 persen</i>	<i>100 persen</i>			
				Perlindungan Sosial Korban	Jumlah korban bencana alam dan	535 org	535 org			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	sosial yang mendapat perlindungan sosial					
				Penyediaan Makanan	Jumlah logistik makanan yang tersalurkan kepada Korban Bencana Alam/sosial	300 orang	28407 orang			
				Penyediaan Sandang	Jumlah logistik sandang yang tersalurnsalurkan kepada korban bencana alam/sosial	200 orang	200 orang			
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang terlayani	20 orang	40 orang			
				<i>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</i>	<i>Persentase TMP terpelihara</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>			
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jenis jasa pemeliharaan TMP	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah TMP yang terpelihara	1 tokasi	1 tokasi			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Operasional taman makam pahlawan	12 bulan	12 bulan			
				Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Honorarium tenaga pengamanan TMP	1 orang	1 orang			

3.1.2. Pelaksanaan Urusan Waib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		<i>Program Perencanaan Tenaga Kerja</i>	<i>Persentase Perusahaan yang Telah Menyusun Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja</i>	<i>0,3 persen</i>	<i>0,3 persen</i>	Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber pada DBHCHT baru dilaksanakan di Triwulan II setelah DPA DBH CHT disahkan dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan PMK. 215-2021. Beberapa kegiatan yang bersumber dari DBHCHT tidak bisa dilaksanakan karena terkendala regulasi.	Utk Renja OPD pada triwulan/tahun berikutnya, Dinas Nakerperinkop UKM dapat meneruskan kegiatan-kegiatan yang dapat memajukan UMKM sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, serta lebih kreatif dalam menyusun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat pengangguran.	
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Pelaporan Penyusunan RTK	1 dok	1 dok			
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi penyusunan RTK	3 perusahaan	3 perusahaan			
				<i>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>	<i>Presentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</i>	<i>0,04 %</i>	<i>0,7 %</i>			
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	1 dok	1 dok			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Institusional	352 org	352 org			
					Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Keliling (MTU)	4368 org	2608 org			
					Jumlah Peserta Uji Kompetensi	576 org	160 org			
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Pembinaan LPKS	1 dok	1 dok			
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang mendapatkan pembinaan	5 LPKS	5 LPKS			
				<i>Program Penempatan Tenaga Kerja</i>	<i>persentase pencari kerja yang sudah bekerja</i>	48 %	47,62 %			
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jmlh Dokumen laporan triwulanan pelayanan antar kerja	1 dok	1 dok			
				Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pengelola Bursa Kerja Khusus (BKK)	60 orang	60 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					yang Mendapat Sosialisasi dan Pembinaan BKK					
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	1 dok	1 dok			
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jmlh Dokumen Laporan Triwulanan Pengelolaan Informasi pasar kerja	1 dok	1 dok			
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Informasi Pasar Kerja yang disebarluaskan	4000 loker	3509 loker			
					Jumlah Perusahaan yang difasilitasi dalam rekrutmen tenaga kerja	6 perusahaan	6 perusahaan			
				<i>Program Hubungan Industrial</i>	<i>Persentase Kasus yang terselesaikan</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>			
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan	Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Triwulanan Pengesahan Peraturan Perusahaan, Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama					
				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan	12 dok	12 dok			
				Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah dokumen Perjanjian kerja yang didaftarkan	5 dok	5 dok			
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah dokumen Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Pengupahan	1 dok	1 dok			
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,	Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Pencegahan dan	1 dok	1 dok			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Kab. Kudus					
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit di Perusahaan yang diberdayakan	1 LKS	1 LKS			
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Persentase perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	100 persen	100 persen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Kabupaten/Kota						
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh serta non afiliasi yang terverifikasi	1 organisasi	1 organisasi			
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dihasilkan oleh Lembaga kerjasama kerjasama Tripartit	1 dok	1 dok			
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan sesuai standart	10 perusahaan	10 perusahaan			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,		<i>Program Pengarusutamaan Gender</i>	<i>Persentase perempuan yang bekerja</i>	87 %	92,03 %	Tidak tersedia data base (untuk mengantisipasi	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		<i>dan Pemberdayaan Perempuan</i>	<i>Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD</i>	<i>29 persen</i>	<i>55,5 persen</i>	kebutuhan tidak terduga)	dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan	
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kab/Kota yang telah dilatih PUG	61 lembaga	61 lembaga				
				Jumlah Program PUG di Pemda yang sudah dievaluasi melalui Analisis Gender Tingkat Kab/Kota	24	24				
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				NA PUG, Peringatan Hari Kartini, Peringatan Hari Ibu	1	1				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah perempuan yang diberdayakan melalui pelatihan wirausaha	25	19						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Kewenangan Kabupaten/Kota						
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Perempuan Yang Mendapat Pelatihan Keterampilan	19 kelompok	19 kelompok			
				<i>Program Perlindungan Perempuan</i>	<i>Cakupan perempuan korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit layanan terpadu</i>	<i>100 persen</i>	<i>100 persen</i>			
					<i>Rasio KDRT</i>	<i>0,016 persen</i>	<i>0,002 persen</i>			
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah petugas pelayanan terpadu yang mendapat pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	30 orang	30 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Jmlh kebijakan/ program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah	1 program	1 program			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Pelayanan Terpadu Yang Mendapat Pelatihan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	10 orang	10 orang			
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit layanan terpadu	10 kasus	6 kasus			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1 lembaga	1 lembaga			
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani pada unit layanan terpadu	8 kasus	6 kasus			
				<i>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</i>	<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Dalam Bekerja</i>	<i>65,8 persen</i>	<i>63,98 persen</i>			
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sistem informasi gender dan anak tersusun	1 dok	1 dok			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SIGA yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen			
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Strata Kabupaten Layak Anak	2 tingkat	1 tingkat			
				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Workshop pier group, konsultasi kekerasan anak, sosialisasi PATBM, Pencetakan buku PATBM, peringatan hari anak	4 kegiatan	4 kegiatan			
					Jumlah lembaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang terbina	1 lembaga	1 lembaga			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Konsultasi Kekerasan anak, Perlindungan Anak berbasis masyarakat (PATBM)	1 kegiatan	1 kegiatan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	KIE dalam rangka menuju kabupaten layak anak	1 kegiatan	1 kegiatan			
					Jumlah lembaga layanan perlindungan anak terbina	6 lembaga	6 lembaga			
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KIE dalam rangka menuju Kabupaten Layak Anak	1 kegiatan	1 kegiatan			
					Peringatan Hari Anak	1 kegiatan	1 kegiatan			
					Forum Anak	1 kali	1 kali			
					Pelatihan Konvensi Hak Anak	1 kali	1 kali			
				<i>Program Perlindungan Khusus Anak</i>	<i>Cakupan anak korban kekerasan yang ditangani pada unit pelayanan terpadu P2TP2A</i>	<i>100 persen</i>	<i>100 persen</i>			
				Penyediaan Layanan bagi	KIE kepada kelompok forum	9 kec	9 kec			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	anak					
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat pendampingan	10 org	10 org			
					KIE dalam rangka menuju KLA, Perayaan Hari ANak Nasional, KLA	2 kegiatan	2 kegiatan			
					Roadshow Forum Anak Tingkat Kecamatan	1 kali	1 kali			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</i>	<i>persentase ketersediaan pangan utama</i>	100 %	194 %	Adanya serangan Penyakit Mulut dan Kuku pada sektor peternakan, namun semua sudah dapat diatasi	Tindakan-tindakan preventif dapat dilakukan sebagai upaya persiapan pelaksanaan kegiatan lebih baik dan peningkatan kinerja	
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan	Jumlah lumbung pangan yang difasilitasi	18 unit	18 unit			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Daerah Kabupaten/Kota						
				Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Terlaksananya pemeliharaan gudang cadangan pangan	1 paket	1 paket			
					Tersedianya peralatan pertamanan pompa air	1 unit	1 unit			
					Tersedianya gerobak sampah	1 buah	1 buah			
					Tersedianya mesin potong rumput gendong	1 unit	1 unit			
					Terlaksana Pembangunan Lantai Jemur	3 unit	3 unit			
					Terlaksananya Pemabangunan Rumah RMU	3 unit	3 unit			
					Tersedianya Bed Drayer	3 unit	3 unit			
					terlaksana Pembangunan Lumbung Pangan	3 unit	3 unit			
				<i>Program</i>	<i>persentase</i>	<i>100 %</i>	<i>194 %</i>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				<i>Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</i>	<i>ketersediaan pangan utama</i>					
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	90 %	100 %			
				Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersusunnya neraca bahan makanan	1 paket	1 paket			
					Terlaksananya sosialisasi/pelatihan	15 orang	15 orang			
				Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	24 OB	24 OB			
					Inisiasi pembentukan Toko Tani Center di Kabupaten	1 paket	0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Pembinaan Kelompok Usaha Pangan Masyarakat	4 klp	4 klp			
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan pangan utama (beras/gabah)	30 ton	33,3 ton			
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya gabah kering giling	5 ton	33,3 ton			
				Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan cadangan pangan	1 paket	1 paket			
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah masyarakat yang paham tentang konsumsi B2SA	120 orang	120 orang			
				Pemberdayaan Masyarakat	Lomba masakan khas daerah	1 kali	1 kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya lomba cipta menu Tk. Provinsi Jawa Tengah	1 kali	1 kali			
					Terlaksananya edukasi konsumsi B2SA bagi anak usia dini	100 orang	100 orang			
					Tertibnya administrasi kegiatan	1 paket	1 paket			
					jumlah tenaga administrasi yang tersedia	12 OB	12 OB			
				<i>Program Penanganan Kerawanan Pangan</i>	<i>persentase penanganan daerah rawan pangan</i>	<i>95 %</i>	<i>100 %</i>			
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan pangan yang difasilitasi	18 desa/kel	18 desa/kel			
				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan	Terlaksananya penyaluran bantuan pangan di daerah rawan pangan	9 kec	9 kec			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota						
				<i>Program Pengawasan Keamanan Pangan</i>	<i>persentase keamanan pangan</i>	89 %	86,5 %			
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Presentase gapoktan penghasil pangan segar yang terfasilitasi tentang keamanan pangan	100 %	100 %			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya uji laboratorium residu pestisida pangan segar	1 paket	1 paket			
					Terlaksananya sosialisasi BMR pestisida dan keamanan pangan segar	35 orang	35 orang			
					Tersedianya leaflet penyebaran informasi	75 lembar	0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					keamanan pangan					
					Terlaksananya pembinaan keamanan pangan	9 kec	9 kec			
					Tertibnya administrasi kegiatan	1 paket	1 paket			
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		<i>Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan</i>	<i>Persentase penyelesaian administrasi pertanahan</i>	73,19 %	80,78 %	Kegiatan yang bersifat kontraktual banyak keterlambatan dalam proses lelang	lebih ditingkatkan capaian kinerja yang sudah baik di tahun sebelumnya. lakukan perencanaan lebih matang mengantisipasi permasalahan kegiatan kontraktual/lelang , cermati kembali formulasi dan target indikator-indikator program,	
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1 dok	1 dok			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1 dok	1 dok		kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU Bupati maupun OPD, serta tingkatkan fungsi sinergi dan koordinasi dengan pihak eksternal terkait.	
				<i>Program Penatagunaan Tanah</i>	<i>Prosentase Tersedianya Tanah</i>	100 %	100 %			
				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Tersedianya Tanah untuk Jalan lingkar utara timur	100 %	100 %			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kab/Kota	Jumlah Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kab/Kota	1 dok	1 dok			
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN		<i>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</i>	<i>indeks kualitas lingkungan hidup</i> <i>Indeks kualitas lahan</i>	66,56 indeks 59,54 indeks	54,88 indeks 28,22 indeks	1. pencemaran lingkungan 2. Semakin meningkatnya	evaluasi faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja, dan evaluasi target	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
		HIDUP		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Presentase dokumen RPPLH yang disusun sesuai standar	100 %	100 %	backlog perumahan dan tingginya harga perumahan berpotensi adanya permukiman kumuh 3. Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang meningkat mempengaruhi kinerja pengelolaan persampahan 4. Keterbatasan lahan dalam peningkatan luas ruang terbuka hijau, overkapasitas TPA	kinerja tahun ini yang belum memenuhi target maupun penetapan target kinerja yang terlalu rendah sehingga belum memenuhi kriteria SMART-C sebagai upaya perbaikan perencanaan kegiatan di tahun mendatang dengan penetapan target yang lebih menantang	
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kab/Kota yang disusun	1 dokumen	1 dokumen				
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Presentase dokumen KLHS yang disusun sesuai standar	100 %	100 %				
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/Kota yang disusun	1 dokumen	1 dokumen				
			<i>Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	<i>66,56 indeks</i>	<i>54,88 indeks</i>				
				<i>Indeks kualitas air</i>	<i>49,64 indeks</i>	<i>43,75 indkes</i>				
				<i>Indeks kualitas udara</i>	<i>92,71 indeks</i>	<i>79,63 indeks</i>				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Presentase Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota yang disusun sesuai standar	100 %	100 %			
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	1 dokumen	1 dokumen			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen			
				<i>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</i>	<i>Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	8,19 %	8,1074 %			
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Presentase Keanekaragaman Hayati (Taman KEHATI+RTH) dalam Kondisi Baik	100 %	100 %			
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas taman KEHATI di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	2,3 Ha	2,3 Ha			
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan	839,28 Ha	839,28 Ha			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Kabupaten/Kota					
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penanganan volume sampah	73 persen	75,06 persen			
					Persentase dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3	35 %	39,29 %			
				Penyimpanan Sementara Limbah B3	Presentase dokumen rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan yang sesuai standar	100 %	100 %			
				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jml lap kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	1 laporan	1 laporan			
					Jumlah fasilitasi pengelolaan limbah B3	6	22			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				<i>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)</i>	<i>Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</i>	42 %	48,25 %			
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase izin lingkungan yang diawasi	42 %	48,25 %			
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah	1 laporan	1 laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Daerah Kab/Kota					
					Jumlah pengawasan kegiatan usaha dan/atau kegiatan izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	130 perusahaan	152 perusahaan			
				<i>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	<i>Persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup</i>	<i>20 persen</i>	<i>65,96 persen</i>			
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk	Jumlah peningkatan komunitas pecinta lingkungan	1 kelompok	10 kelompok			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jml lembaga/ kelompok masyarakat/instansi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	22 lembaga	22 lembaga			
					Pendamping bank sampah	1 kegiatan	1 kegiatan			
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen			
					Pendamping kelompok pecinta lingkungan hidup	1 kegiatan	1 kegiatan			
				<i>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	<i>Persentase penerima penghargaan bidang lingkungan hidup</i>	80 %	85,71 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					<i>Persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup</i>	20 %	65,96 %			
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah penerimaan penghargaan dibidang lingkungan hidup	1 kelompok	12 kelompok			
				Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/ embaga masyarakat/ dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	1 entitas	1 entitas			
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	<i>Persentase penanganan pengaduan</i>	100 %	100 %			
					<i>Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha</i>	42 %	48,25 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					<i>dan / atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</i>					
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Presentase tindaklanjut pengaduan bidang PPLH	100 %	100 %			
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 dokumen	1 dokumen			
					Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan	100 %	100 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				<i>Program Pengelolaan Persampahan</i>	<i>Persentase penanganan volume sampah</i>	<i>73 persen</i>	<i>38,63 persen</i>			
				Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	73 %	38,63 %			
				Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota	121865,69 ton	63592,81 ton			
					Pembayaran tenaga persampahan	2160 OB	2160 OB			
					Penanganan sampah	1 tahun	1 tahun			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	1 unit	1 unit			
					Pengelolaan TPA	1 tahun	1 tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		<i>Program Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</i>	<i>100 persen</i>	<i>98,89 persen</i>	1. Keterbatasan ketersediaan anggaran untuk peremajaan pengadaan sarpras pelayanan adminduk (pelayanan di Dinas, 9 Kecamatan, Mall Pelayanan Publik dan Jemput Bola); 2. Belum optimalnya pelayanan perekaman dan pencetakan KTP, karena kondisi sarpras yang tidak memadai/ rusak dimana umur ekonomisnya lebih dari 10 tahun); 3. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat bahwa Dana	Secara keseluruhan capaian kinerja dan realisasi anggaran di triwulan 4 tahun 2022 sudah masuk kategori sangat tinggi (93%) namun bila dilihat dari realisasi anggaran per kegiatan/sub kegiatan ada kegiatan/sub kegiatan yang realisasi anggaran masih dibawah 90% mohon untuk menjadi catatan dan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun depan. untuk tahun depan mohon agar bisa dipertahankan atau ditingkatkan capain kinerja dan realisasi anggaran.	
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sesuai standar	169000 dokumen	139444 dokumen			
				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar	9000 dokumen	7149 dokumen			
					Jumlah penerbitan dokumen KTP sesuai standar	65000 dokumen	62427 dokumen			
					Jumlah penerbitan dokumen Kartu Keluarga sesuai standar	70000 dokumen	57161 dokumen			
					Jumlah penerbitan dokumen KIA sesuai standar	25000 dokumen	12707 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk	12 dokumen	12 dokumen	<p>Pelayanan Admindukcapil (DAK Nonfisik) APBN TA 2022 bagi Kabupaten/Kota tidak lagi diberikan, sehingga mempengaruhi operasional pelayanan adminduk;</p> <p>4. Ketersediaan blanko KTP yang disediakan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui mekanisme hibah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus mengalami trend yang semakin menurun drastis yang berdampak pada rendahnya penerbitan KTP Tahun 2022;</p> <p>5. Dampak penerapan dari</p>		
				Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah penyediaan bahan operasional habis pakai pelayanan pendaftaran penduduk	100 unit	100 unit			
					Jumlah Tenaga Kontrak Perorangan (TKP) pelayanan pendaftaran penduduk	396 orang/bln	396 orang/bln			
				<i>Program Pencatatan Sipil</i>	<i>Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun</i>	<i>100 unit</i>	<i>98,49 unit</i>			
				Pelayanan Pencatatan Sipil	Jml penerbitan dokumen pencatatan sipil	40000 dokumen	30105 dokumen			
				Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jml pelayanan penerbitan akta kelahiran dan kematian yang sesuai standar	32000 lbr	24863 lbr			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Jml penduduk yang terdata pencatatan perkawinannya sesuai prosedur	89000 orang	181024 orang	kebijakan implementasi SIAK Terpusat Tahun 2022 dari Pemerintah Pusat, Dinas Dukcapil Kab/Kota memiliki keterbatasan pengelolaan database kependudukan dimana penyajian data kependudukan skala kabupaten terbatas sesuai dengan template yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat.		
					Jumlah penyediaan formulir pencatatan sipil	275 rim	275 rim			
					Jumlah penyediaan toner dan refill pelayanan pencatatan sipil	70 unit	70 unit			
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil	12 dokumen	12 dokumen			
				Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah penyediaan bahan operasional habis pakai pelayanan pencatatan sipil	660 unit	660 unit			
					Jumlah penyediaan jilid register akta pencapil	910 set	610 set			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Jumlah Tenaga Kontrak Perorangan (TKP) pelayanan pencatatan sipil	168 orang/bln	168 orang/bln			
				<i>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Cakupan pengelolaan database kependudukan</i>	<i>100 persen</i>	<i>100 persen</i>			
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar	12 instansi	11 instansi			
				Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jml perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan data kependudukan	2 dokumen	5 dokumen			
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12 dokumen	12 dokumen			
				Fasilitasi terkait Pengelolaan	Jumlah penyediaan	30 unit	30 unit			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Informasi Administrasi Kependudukan	bahan operasional habis pakai PIAK					
					Jumlah penyediaan peralatan pelayanan KTP	32 unit	32 unit			
					Jumlah Tenaga Kontrak Perorangan (TKP) pengelolaan SIAK	48 orang/bln	48 orang/bln			
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		<i>Program Penataan Desa</i>	<i>jumlah TMMD/ Karya bhakti yg dilaksanakan</i>	<i>3 desa</i>	<i>3 desa</i>	DPPA yang di tandatangan dibulan Oktober membawa dampak pada jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga mengakibatkan penyerapan tidak maksimal	mohon agar penuangan anggaran diperhitungkan dengan cermat agar hasil di akhir periode dapat terserap maksimal	
				<i>Persentase Penyelenggaraan Penatan Desa</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>				
				Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya Penataan Desa	3 desa	3 desa			
				Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah TMMD/ Karya Bhakti yang dilaksanakan	3 desa	3 desa			
				<i>Program Peningkatan Kerjasama Desa</i>	<i>Jumlah fasilitasi dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan kawasan</i>	<i>1 produk hukum kawasan pedesaan</i>	<i>1 produk hukum kawasan pedesaan</i>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					<i>pedesaan</i>					
					<i>prosentase peningkatan kawasan pedesaan</i>	75 %	75 %			
				Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	1 produk hukum	1 produk hkum			
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Produk Hukum Kawasan Pedesaan	1 produk hukum	1 produk hukum			
				<i>Program Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Menurunnya Persentase desa yang bermasalah</i>	<i>20 persen</i>	<i>20 persen</i>			
					<i>Terlaksananya Program Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>1 produk hukum/ juknis⁴</i>	<i>14 produk hukum/ juknis</i>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	14 produk hukum	14 produk hukum			
				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Produk Hukum tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 produk hukum	2 produk hukum			
					Jumlah pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa	1 kali	1 kali			
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Desa	2 produk hukum	2 produk hukum			
					Jumlah produk hukum desa yang difasilitasi penyusunannya	3 kali	3 kali			
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Produk Hukum tentang Penyusunan Perencanaan	2 produk hukum	2 produk hukum			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Desa	Pembangunan Desa					
					Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	2 desa	2 desa			
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Produk Hukum tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	2 produk hukum	2 produk hukum			
					Jumlah aparat pemerintah desa yang mengikuti Bimtek tentang pengelolaan keuangan dan aset desa	123 orang	123 orang			
					Jumlah aplikasi yang dikelola	2 aplikasi	2 aplikasi			
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang terlaksana	123 desa	123 desa			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	1018 orang	1018 orang			
				Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Produk Hukum tentang Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 produk hukum	2 produk hukum			
					Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan musyawarah desa (Musdes)	2 kali	1 kali			
					Jumlah monitoring dan evaluasi hasil Musyawarah Desa (Musdes)	4 kali	2 kali			
				Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah produk hukum tentang evaluasi dan pengawsan peraturan desa	2 produk hukum	2 produk hukum			
					Jumlah pelaksanaan pengawasan dan	1 kali	1 kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					evaluasi peraturan desa					
				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang terfasilitasi	9 desa	9 desa			
					Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan perekonomian masyarakat dan infrastruktur desa	9 desa	9 desa			
				Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	7 desa	7 desa			
				Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah produk hukum tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 produk hukum	2 produk hukum			
					Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengisian dan pemberhentian perangkat desa	5 kali	5 kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Jumlah rapat koordinasi fasilitasi pengangkatan/pe mberhentian perangkat desa	5 kali	5 kali			
				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa berdasarkan IDM, Prodeskel dan EPDeskel	132 desa/ kel	132 desa/kel			
					Jumlahn rapat fasilitasi pemutakhiran data profil dan evaluasi perkembangan desa	5 kali	5 kali			
					Jumlah monitoring dan evaluasi fasilitasi pemutakhiran data profil dan evaluasi perkembangan desa	18 kali	18 kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kab/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Penugasan Urusan/Kewenangan Kab/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	9 kec	9 kec			
					Jumlah fasilitasi pencairan proposal Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan SK Gubernur dan Bupati	100 %	100 %			
				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9 kec	9 kec			
					Jumlah dokumen penetapan pemenang lomba desa	1 dokumen	1 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				<i>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</i>	<i>Persentase Meningkatnya kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa</i>	75 %	75 %			
					<i>Jumlah kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa</i>	0	0			
					<i>Persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa</i>	7 kegiatan	7 kegiatan			
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	7 kegiatan	7 kegiatan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 kegiatan	1 kegiatan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Jumlah Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kel dan Masyarakat Hukum Adat	9 kali	9 kali			
					Jumlah rapat dan monev penataan administrasi lembaga desa	9 kali	9 kali			
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kel dan Masyarakat	Jumlah peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kel dan Masyarakat Hukum Adat	1 kegiatan	1 kegiatan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Hukum Adat						
					Jumlah pembinaan Posyandu/Pemilihan Posyandu terbaik	9 posyandu	9 posyandu			
					Jumlah bimtek peningkatan kapasitas kader lembaga desa	123 orang	123 orang			
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	123 desa	0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
					Jumlah fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/keln (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	123 desa	0			
					Jumlah pembuatan/ maintenance aplikasi kelembagaan desa	2 aplikasi	0			
					Jumlah desiminasi	2 aplikasi	0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					informasi aplikasi kelembagaan desa					
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	123 kali	123 kali			
					Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	24 kali	24 kali			
					Jumlah rapat koordinasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa	24 kali	24 kali			
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat	Jumlah Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat	1 kegiatan	1 kegiatan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Guna	Guna					
					Jumlah identifikasi / monitoring dan evaluasi teknologi tepat guna di desa	9 kali	9 kali			
					Jumlah pembinaan posyantekdes	20 posyantek	20 posyantek			
				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan			
					Jumlah pencaanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 lokasi	1 lokasi			
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	132 kali	132 kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Jumlah pembinaan PKK	5 kali	5 kali			
					Jumlah lomba PKK	3 kali	3 kali			
					Jumlah rapat pleno	12 kali	12 kali			
					Jumlah rapat koordinasi	10 kali	10 kali			
					Jumlah orientasi kader	1 kali	1 kali			
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		<i>Program Pengendalian Penduduk</i>	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	<i>2,02 persen</i>	<i>2,08 persen</i>	Tidak tersedia data base (untuk mengantisipasi kebutuhan tidak terduga)	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan	
				<i>Laju Pertumbuhan Penduduk</i>	<i>1 persen</i>	<i>0,05 persen</i>				
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dgn Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen hasil penyerasian kebijakan pembangunan daerah kab/kota Program Bangga Kencana	1 dok	0				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Sosialisasi Program KKBPK Kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan			
					Jumlah dok hasil penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kab/Kota Program Bangga Kencana	1 dok	0			
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dok	0		
					Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan	Jumlah dok Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan	1 dok	0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pembangunan Keluarga	Keluarga					
					NA Grand Design Pembangunan Keluarga	1 dok	0			
				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	1 dok	1 dok			
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dok	1 dok			
				<i>Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)</i>	<i>Cakupan PUS yang ber-KB aktif</i>	<i>71 persen</i>	<i>64,32 persen</i>			
					<i>Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang</i>	<i>14 persen</i>	<i>10,73 persen</i>			
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional	1 kegiatan	1 kegiatan			
					Jumlah PUS yang aktif ber-KB	112000 PUS	83270 PUS			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS yang aktif ber-KB MKJP	16300 PUS	8937 PUS			
				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dab Mitra Kerja	7 organisasi	0			
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dokumen KIE Prog Bangga Kencana sesuai Kearifan Lokal	1 dokumen	1 dokumen			
				Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dok promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media massa cetak dan elektronok serta media luar ruang	1 dokumen	1 dokuumen			
				Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya	Pelaksanaan Peringatan Hari Keluarga Nasional	1 kegiatan	1 kegiatan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	(HARGANAS)					
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Minilokakarya (Minilok)	12 laporan	1 laporan			
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	1 laporan	1 laporan			
				Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	0			
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas	Rasio petugas lapangan KB/PLKB setiap desa/kel	24 persen	26,5 persen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Lapangan KB (PKB/PLKB)						
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader institusi masyarakat (IMP)	980 orang	0			
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Jumlah pendistribusian kebutuhan alkon serta pelaksanaan pelayanan KB Ke Faskes	50 faskes	50 faskes			
					Jumlah alkon mix kontrasepsi yang tersedia di gudang alkon	67930 buah/set/gross	19353 buah/set/gross			
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah laporan Pengendalian pendistribusian Alkon dan sarana penunjang yan KB kepada Faskes	30 faskes	30 faskes			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yg mengikuti Kesertaan penggunaan MKJP	1803 orang	1425 orang			
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Rehabilitasi Gedung	7 unit	7 unit			
					Jumlah Pengadaan Alat Bina Keluarga Balita (BKB) KIT Stunting	10 unit	10 unit			
				Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengadaan Alat KIT Stunting Siap Nikah Anti Stunting	20 unit	20 unit			
					Jumlah Perlengkapan Gedung	7 unit	7 unit			
					Jumlah Sarana Kendaraan Dinas	22 unit	22 unit			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Sepeda Motor					
					Jumlah Sticker Kendaraan Dinas Sepeda Motor	22 unit	22 unit			
					Jumlah Pengadaan Alat Kontrasepsi	5 unit	5 unit			
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	10 laporan	0			
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Peran serta mitra kerja dalam kegiatan safari Keluarga Berencana (KB)	3 organisasi	3 organisasi			
					Jumlah stakeholder/pem angku kepentingan dan mitra kerja yang berperan aktif dalam program KKBPK	7 lembaga	7 lembaga			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB	21 kampung	21 kampung			
				<i>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</i>	<i>Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)</i>	<i>13,5 persen</i>	<i>15,69 persen</i>			
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS terbina	45 kelompok	45 kelompok			
					Persentase Kesertaan KB di Kab/Kota dengan Kesertaan Rendah	44 persen	0			
					Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	46,35 persen	0			
					Jumlah PUS Unmeet need	20150 PUS	20310 PUS			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1962 orang	1962 orang			
					Operasional calon pengantin di desa	15000 pasang	0			
					Opeasional pendampingan ibu hamil di desa	112400 orang	0			
					Operasional pendampingan pasca operasional	28772 orang	0			
					Operasional survailance stunting tingkat desa (paket data pelaporan)	22800 orang	0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 kelompok	5 kelompok			
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan Rata - Rata Kendaraan Bermotor di Jalan Perkotaan	38 km/jam	38 km/jam	Anggaran perubahan di bulan November sehingga pelaksanaan kegiatan terhambat, / proses penetapan DPPA	tingkatkan capaian kinerja yang sudah baik di tahun 2022, fungsi-fungsi koordinasi dan kerjasama antar bidang lebih intens dalam rangka mencapai tujuan RPJMD, optimalisasi penerimaan PAD serta penyelenggaraan LLAJ secara lebih optimal dan	
					Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Daerah Rawan Kecelakaan	88 %	88 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					<i>Kontribusi Retribusi Perparkiran dan Terminal terhadap PAD</i>	0,019	0,0019		akuntabel	
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan dan review lalu lintas	3 dok	3 dok			
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	mamin rapat	70 orang	70 orang			
			ATK		4 jenis	4 jenis				
			cetak film foto 4r		200 lembar	0				
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Honor penanggungjawa b pengelola keuangan	10 bulan	10 bulan			
			bahan bakar dan pelumas		10160 liter	6055 liter				
			suku cadang		4 jenis	4 jenis				
					ATK	2 jenis	2 jenis			
					Hvs	6 rim	6 rim			
					bahan komputer	2 jenis	2 jenis			
					Jasa konsultastudi kinerja ruas jalan	1 kegiatan	1 kegiatan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Perjalanan Dinas Biasa	13 orang	13 orang			
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan keselamatan LLAJ	1 dok	1 dok			
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Update Database Perlengkapan Jalan	1 kegiatan	1 kegiatan			
					Penyusunan DED ITCS	1 kegiatan	1 kegiatan			
					Honor penanggungjawab pengelola keuangan	6 orang	6 orang			
					Rambu bersuar	4 jenis	4 jenis			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	bahan bakar	6972 liter	6972 liter			
					Pemeliharaan CCTV	26 unit	26 unit			
					Honor penanggungjawab pengelola keuangan	10 bulan	10 bulan			
					isi tabung gas	95 tabung	95 tabung			
					pemeliharaan marka jalan	2 jenis	2 jenis			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					suku cadang	4 jenis	4 jenis			
					komponen rambu-rambu	3 jenis	3 jenis			
					sewa peralatan aplikator marka	4889 m2	4889 m2			
					pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	323 unit	323 unit			
					pengadaan alat peraga peralatan logam mesin	1 unit	1 unit			
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan Perparkiran dan Terminal	1 dok	1 dok			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rehabilitasi kantor terminal Jetak	40 m2	40 m2			
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah dokumen administrasi dan Pelaporan Perparkiran dan Terminal	1 dok/keg	1 dok/keg			
					Jumlah pembangunan fasilitas parkir	1 lokasi	1 lokasi			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Jumlah fasilitas parkir yang di bangun	1 lokasi	1 lokasi			
					Jumlah pembangunan fasilitas parkir	1 lokasi	1 lokai			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Sarana Oprasional UPTD Perparkiran	3 unit	3 unit			
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah uji berkala kendaraan bermotor yang dikeluarkan	18650 uji	18650 uji			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	pengadaan kartu uji/smartcard	7900 set	7900 set			
					Hvs	20 rim	20 rim			
					ATK	2 jenis	2 jenis			
					Pemeliharaan	Bahan komputer	3 jenis	3 jenis		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	12 unit	12 unit			
					ATK	4 jenis	4 jenis			
					Hvs	10 rim	10 rim			
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah dokumen perencanaan keselamatan LLAJ	1 dok	1 dok			
				Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Studi Daerah Rawan Kecelakaan	1 kegiatan	1 kegiatan			
					Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan	6 set	6 set			
					Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	200 orang	200 orang			
					Perjalanan Dinas Luar Daerah	10 orang	10 orang			
					Mamin jamuan tamu	10 orang	10 orang			
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi angkutan umum	1 dok	1 dok			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bus mudik yang disediakan	2 unit	2 unit			
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sewa Bus Besar	2 unit	2 unit			
					Perjalanan Dinas Biasa	4 orang	4 orang			
				Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Makanan dan Minuman Rapat	25 orang	25 orang			
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi angkutan umum	1 dok	1 dok			
					Jumlah pelaku pengusaha dan pengemudi angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang yang mengikuti sosialisasi	50 org	50 org			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi kepada pelaku (pengusaha dan pengemudi) angkutan umum, serta dok. Study/kajian terkait angkutan jalan/load faktor	50 orang	5 orang0			
					Perjalanan Dinas Biasa	24 orang	24 orang			
					Honor penanggung jawab pengelola keuangan	8 bulan	8 bulan			
					ATK	6 jenis	6 jenis			
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		<i>Program Informasi dan Komunikasi Publik</i>	<i>Cakupan informasi yang di publikasikan melalui berbagai media</i>	<i>100 persen</i>	<i>100 persen</i>	- Masih belum jelasnya juknis mengenai Manajemen SPBE - Pelaksanaan audit aplikasi dan infrastruktur menunggu dari penetapan auditor dari Inspektorat - Pelaksanaan audit keamanan	Agar dicermati lagi penentuan target capaian pada subkegiatan maupun kegiatan bahkan program, karena beberapa capaian lebih dari 100% bahkan 400%. Hal ini akan merusak data analisis. Dugaan sementara adalah	
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan informasi dan publikasi	1 tahun	1 tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	belum bisa dilaksanakan dikarenakan belum ada juknis dari BSSN - Peraturan Presiden tentang Arsitektur SPBE Nasional yang baru ditetapkan 20 Desember 2022 sehingga perlu evaluasi Kembali arsitektur SPBE Kabupaten Kudus yang disusun sebelum penetapan Arsitektur Nasional. - Minimnya tingkat validitas data statistik sektoral yang terkumpul - Kurangnya SDM yang menguasai keamanan informasi	kurang cermatnya Dinas Kominfo menetapkan target capaian.	
					Jumlah analisis berita tentang Kabupaten Kudus	12 analis	12 analis			
				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah liputan kegiatan pemerintah daerah	200 kegiatan	455 kegiatan			
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten yang dikelola	824 konten	320 konten			
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang dilayani	15 pemohon	54 pemohon			
					Jumlah bintek PPID pembantu	20 OPD	20 OPD			
					Jumlah monev PPID pembantu	1 kali	1 kali			
				Layanan	Jumlah	6 kali	4 kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Hubungan Media	konferensi pers					
					Jumlah pers tour	1 kali	1 kali			
				Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah FK Metra	4 kali	4 kali			
					Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan	2 pemangku	2 pemangku			
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM pengelola informasi dan komunikasi publik yang kompeten	58 orang	58 orang			
				Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan sarpras pendukung informasi dan komunikasi publik	20 unit	20 unit			
				<i>Program Aplikasi Informatika</i>	<i>Tata Kelola SPBE</i>	<i>2,43 indeks</i>	<i>1,9 indeks</i>			
			<i>Kebijakan internal SPBE</i>		<i>3,06 indeks</i>	<i>2,3 indeks</i>				
			<i>Layanan SPBE</i>		<i>2,7 indeks</i>	<i>3,49 indeks</i>				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terhubung jaringan fiber optik	20 unit kerja	14 unit kerja			
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah unit kerja yang terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah daerah	20 unit kerja	209 unit kerja			
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan e-government	10 aplikasi	16 aplikasi			
					Presentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	85 %	87 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan	1 aplikasi	3 aplikasi			
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Prosentase Layanan SPBE	50 %	73 %			
					Jumlah unsur SPBE	1 dokumen	2 dokumen			
				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah SDM pengelola penghubung sistem layanan pemerintah	8 orang	8 orang			
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan IT	4 orang	4 orang			
					Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi	6 orang	6 orang			
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI,		<i>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</i>	<i>persentase koperasi aktif</i>	<i>88,75 persen</i>	<i>88,75 persen</i>	Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber pada DBHCHT baru	Utk Renja OPD pada triwulan/tahun berikutnya, Dinas	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
	USAHA KECIL, DAN MENENGAH	USAHA KECIL DAN MENENGAH		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Koperasi yang Telah Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan, Pendidikan, Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi	1 dok	1 dok	dilaksanakan di Triwulan II setelah DPA DBH CHT disahkan dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan PMK. 215-2021. Beberapa kegiatan yang bersumber dari DBHCHT tidak bisa dilaksanakan karena terkendala regulasi.	Nakerperinkop UKM dapat meneruskan kegiatan-kegiatan yang dapat memajukan UMKM sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, serta lebih kreatif dalam menyusun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat pengangguran.	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengelola Koperasi yang memahami dan mengetahui Perkoperasian	60 orang	60 orang				
				Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)	225 orang	225 orang				
				<i>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</i>	<i>Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha</i>	<i>0,7 persen</i>	<i>0,62 persen</i>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen laporan triwulanan pendataan dan pemberdayaan usaha mikro dan	1 dok	1 dok			
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Mengikuti Pelatihan Pengembangan Usaha	30 org	30 org			
					Jumlah wirausaha yang menerima hibah bantuan modal usaha	84 kelompok	81 kelompok			
					Pengelolaan Kegiatan Hibah dan Usaha Mikro	1 dok	1 dok			
				<i>Program Pengembangan Umkm</i>	<i>Persentase Perkembangan Usaha Mikro,</i>	<i>5,5 persen</i>	<i>5,16 persen</i>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					<i>Kecil dan Menengah</i>					
				Pengembangan Usaha Mikro dgn Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Pengembangan Usaha Mikro	1 dok	1 dok			
				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Aplikasi Marketplace UMKM yang Tersedia	1 kegiatan	1 kegiatan			
					Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Pemasaran Melalui Online	35 orang	35 orang			
					Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Pembinaan Legalitas Usaha	35 orang	35 orang			
					Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Sosialisasi Pembiayaan dengan Lembaga	35 orang	35 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Keuangan					
					Fashion On The Street	1 kgt	1 kgt			
					Kudus Expo UMKM	1 kgt	1 kgt			
					Terlaksananya Bantuan Alat untuk UMKM	1 kegiatan	1 kegiatan			
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		<i>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</i>	<i>Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal</i>	<i>100 persen</i>	<i>100 persen</i>	1. Kondisi perekonomian pasca pandemi covid 19 belum sepenuhnya pulih sehingga minat masyarakat untuk berinvestasi masih rendah. 2. Realisasi LKPM masih rendah dan jauh dari target dikarenakan kewenangan kabupaten hanya terbatas pada perusahaan berskala kecil sehingga realisasi LKPM nya kecil	Utk triwulan dan Renja OPD selanjutnya, kami sarankan untuk melakukan: 1. Optimalisasi pelaksanaan SOP yang telah disusun sehingga memudahkan pelaksanaan tugas selanjutnya 2. Rekam data hasil pelaksanaan pekerjaan mohon dapat ditertibkan, sehingga dapat digunakan oleh pihak lain yang membutuhkan	
				Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas/Insentif di bidang penanaman modal	1 dokumen	0			
				Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insenti	Jumlah dokumen kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	1 dokumen	0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				f dan Kemudahan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang ditetapkan					
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah sistem yang dikelola	1 sistem	1 sietem			
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan tentang perencanaan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen			
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah data terbaru dalam peta potensi dan peluang investasi	2 data	2 data			
				<i>Program Promosi Penanaman Modal</i>	<i>Persentase peningkatan jumlah investor</i>	<i>8 persen</i>	<i>-34 persen</i>			
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi penanaman modal	1 kali	1 kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen			
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Promosi	3 jenis	2 jenis			
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan Pembangunan dan lingkungan yang sesuai dengan standar pelayanan	55 %	70,75 %			
					Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai dengan standar pelayanan	80 %	86,84 %			
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Jumlah perizinan terbit sesuai dengan standar pelayanan	2392 SK	5424 SK			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota						
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan Perizinan dan non perizinan yang dilayani sesuai standar pelayanan	2392 permohonan	7309 permohonan			
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terbangunnya gedung MPP Tahap 2	1 gedung	1 gedung			
					Jumlah perizinan yang memenuhi komitmen dasar dan operasional	50 izin	23 izin			
					Jumlah data (dokumen) fasilitasi pelayanan perizinan pendukung	26 dokumen	26 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					program					
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah aduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perijinan dan non perijinan yang telah ditindaklanjuti sampai selesai	15 pengaduan	6 pengaduan			
				<i>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>realisasi investasi yang dilaporkan</i>	<i>3,3 triyun</i>	<i>1,09 trilyun</i>			
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan penyampaian LKPM	500 perusahaan	579 perusahaan			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan	Jumlah Perusahaan yang memahami penyampaian	270 perusahaan	341 perusahaan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penanaman Modal	LKPM					
					Jumlah dokumen laporan realisasi dan pembinaan investasi pendukung program	5 dokumen	5 dokumen			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang terevaluasi	230 perusahaan	206 perusahaan			
					Jumlah dokumen pengawasan Penanaman Modal Pendukung Program	17 dokumen	17 dokumen			
				<i>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>	<i>Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis</i>	<i>100 persen</i>	<i>100 persen</i>			
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Jumlah sistem informasi yang dikelola	2 aplikasi	2 aplikasi			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				pada Tingkat Daerah Kab/Kota						
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data penanaman modal yang terupdate	12 dokumen	12 dokumen			
					Jumlah sistem informasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola	2 aplikasi	2 aplikasi			
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</i>	<i>Persentase organisasi kepemudaan yang aktif</i>	95,95 %	95,95 %	Sumber Dana dari APBN (BOP PAUD, Dikmas, BOS SD dan SMP) yang pencairan langsung ke sekolah/ lembaga sehingga dalam penSPJan menunggu Rekonsiliasi dari Pemerintah Pusat.	Untuk Capaian Kinerja agar dipertahankan di tahun depan sedangkan untuk realisasi anggaran agar lebih ditingkatkan lagi supaya seimbang dengan capaian kinerja.	
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula,	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri	100 orang	100 orang			
					Penyadaran pemuda yang berperilaku menyimpang	100 orang	100 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				dan Pemuda Kader Kab/Kota						
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wira Usaha Pemula yang ikut pelatihan	100 orang	100 orang			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Publikasi Kegiatan Pembinaan Kepemudaan Media Televisi	12 tayang	12 tayang			
					Publikasi Kepemudaan Media Cetak	9 paket	9 paket			
					Publikasi Kepemudaan Merdia Online	19 kali	19 kali			
				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Seleksi Peserta Paskibraka Kabupaten Kudus	400 orang	400 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen hasil Pembinaan kelembagaan dan peningkatan peran serta kepemudaan sesuai standar (realisasi dan capaian fisik. anggaran. iku sasaran. iku program beserta analisis. rekom. data dukungnya)	12 dokumen	12 dokumen			
					Jumlah Lembaga Kepramukaan yang terbantu	12 dokumen	12 dokumen			
					Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaaan dan sosial	12 dokumen	12 dokumen			
					Jumlah pemuda yang berwirausaha	12 dokumen	12 dokumen			
				Koordinasi, Sinkronisasi & Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau	Jumlah Pemuda yang ikut Pelatihan dan Pendataan OKP	48 orang	48 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha						
				Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Publikasi Kepemudaan di Media Cetak	4 tayang	4 tayang			
					Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian dan Ketrampilan Bagi Pemuda	74 orang	74 orang			
					Pelatihan Dasar Kepemimpinan untuk Pelajar dan Pemuda	197 orang	197 orang			
					Publikasi Kepemudaan di Media Online	30 tayang	30 tayang			
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1 lembaga	1 lembaga			
					Pelatihan Wirausaha Muda Berbasis Online Rumah Wirausaha Indonesia	74 orang	74 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</i>	<i>cakupan pembinaan olahraga</i>	92 %	92 %			
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kebersihan Area Sport Center Wergu Wetan Kudus 29 orang	12 bulan	12 bulan			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kebersihan Area Sport Center Wergu Wetan Kudus 29 orang	12 bulan	12 bulan			
					Terpeliharanya Sarana Prasarana Olahraga	1 lokasi	1 lokasi			
					Terpeliharanya lampu penerangan Area Balai Jagong/Sport Center	1 paket	1 paket			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Event Olahraga Tingkat Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan			
				Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Pevelenggaraan event olahraga Tingkat Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan			
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	dokumen hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi sesuai standar (realisasi dan capaian fisik. anggaran. iku sasaran. iku program beserta analisis.rekom. data dukungnya)	12 dokumen	12 dokumen			
			Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi		12 dokumen	12 dokumen				
			Jumlah Perolehan medali event Olahraga Provinsi, Nasional dan internasional		12 dokumen	12 dokumen				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Pembinaan atlit POPDA yang maju ke Tingkat Jawa Tengah	196 orang	196 orang			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Pendataan olahraga	27 orang	27 orang			
					Publikasi keolahragaan di media cetak	18 paket	18 paket			
					Publikasi olahraga media televisi	12 menit	12 menit			
					Publikasi media online	39 kali	39 kali			
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Laporan prestasi Organisasi Keolahragaan	4 dokumen	4 dokumen			
					organisasi olahraga yang berprestasi	4 dokumen	4 dokumen			
					Laporan Prestasi Organisasi Keolahragaan	3 tingkat	0			
				Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Laporan prestasi Organisasi Keolahragaan	4 dokumen	4 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		<i>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</i>	<i>cakupan pelayanan data statistik sektoral</i>	100 %	100 %	<p>- Masih belum jelasnya juknis mengenai Manajemen SPBE</p> <p>- Pelaksanaan audit aplikasi dan infrastruktur menunggu dari penetapan auditor dari Inspektorat</p> <p>- Pelaksanaan audit keamanan belum bisa dilaksanakan dikarenakan belum ada juknis dari BSSN - Peraturan Presiden tentang Arsitektur SPBE Nasional yang baru ditetapkan 20 Desember 2022 sehingga perlu evaluasi Kembali arsitektur SPBE Kabupaten Kudus yang disusun sebelum penetapan Arsitektur Nasional.</p> <p>- Minimnya tingkat validitas data statistik sektoral</p>	Agar dicermati lagi penentuan target capaian pada subkegiatan maupun kegiatan bahkan program, karena beberapa capaian lebih dari 100% bahkan 400%. Hal ini akan merusak data analisis. Dugaan sementara adalah kurang cermatnya Dinas Kominfo menetapkan target capaian.	
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah publikasi data statistik sektoral	20 data	254 data			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 dokumen	1 dokumen			
					Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral	80 %	100 %			
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	60 orang	60 orang							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
								yang terkumpul - Kurangnya SDM yang menguasai keamanan informasi		
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		<i>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</i>	<i>persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah</i>	<i>18 persen</i>	<i>82 persen</i>	- Masih belum jelasnya juknis mengenai Manajemen SPBE - Pelaksanaan audit aplikasi dan infrastruktur menunggu dari penetapan auditor dari Inspektorat - Pelaksanaan audit keamanan belum bisa dilaksanakan dikarenakan belum ada juknis dari BSSN - Peraturan Presiden tentang Arsitektur SPBE Nasional yang baru ditetapkan 20 Desember 2022 sehingga perlu evaluasi Kembali arsitektur SPBE Kabupaten Kudus yang disusun sebelum penetapan	Agar dicermati lagi penentuan target capaian pada subkegiatan maupun kegiatan bahkan program, karena beberapa capaian lebih dari 100% bahkan 400%. Hal ini akan merusak data analisis. Dugaan sementara adalah kurang cermatnya Dinas Kominfo menetapkan target capaian.	
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan keamanan informasi	5 OPD	5 OPD			
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah sistem elektronik yang menerapkan keamanan informasi	3 aplikasi	5 aplikasi			
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah sistem elektronik yang telah diaudit	2 aplikasi	2 aplikasi			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Arsitektur Nasional. - Minimnya tingkat validitas data statistik sektoral yang terkumpul - Kurangnya SDM yang menguasai keamanan informasi		
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		<p><i>Program Pengembangan Kebudayaan</i></p> <p>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</p>	<p><i>persentase seni / budaya yang diaktualisasikan</i></p> <p>jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kab/kota</p> <p>Peningkatan jumlah sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya</p> <p>jumlah kelompok seni budaya yang diaktualisasi</p> <p>jumlah peserta sarasehan/ pelatihan budaya</p>	<p>67 persen</p> <p>4 dokumen</p> <p>1 buah</p> <p>23 kelompok</p> <p>25 orang</p>	<p>108 persen</p> <p>4 dokumen</p> <p>0</p> <p>25 kelompok</p> <p>50 orang</p>	<p>Terkait DPPA yang di tandatangan dibulan Oktober membawa dampak pada jadwal kegiatan menyebabkan realisasi target dan serapan anggaran tidak sesuai, ada kegiatan yang kurang waktu sehingga terpaksa tidak dilaksanakan</p>	<p>Utk Renja OPD pada triwulan/tahun berikutnya, Bappeda berharap Dinas Budpar lebih kreatif dan giat dalam memajukan pariwisata di Kab. Kudus. Perlunya pembenahan tempat-tempat wisata yang saat ini agak terlupakan. Pariwisata Kudus harus lebih bersemangat dalam menciptakan objek-objek wisata baru sekaligus</p>	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					jumlah dokumen usulan warisan budaya tak benda	2 dokumem	3 dokumen		merestorasi destinasi lama yang dulunya menjadi primadona wisatawan.	
					jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diaktualisasi	2 jenis	3 jenis			
					jumlah anggota lembaga adat yang dibina	5 oarng	3 orang			
					Jumlah SDM Kesenian dan bahasa yang dibina	36 orang	31 orang			
				<i>Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya</i>	<i>persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu</i>	19 %	48 %			
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	4 dokumen	4 d okumen			
				Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	jumlah objek diduga cagar budaya yang diidentifikasi dan didaftarkan sesuai ketentuan	180 obyek	69 obyek			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penetapan Cagar Budaya	jumlah cagar budaya yang diregistrasikan ke Regnas	2 dokumen	4 dokumen			
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan CB Tk Kab/Kota	4 dokumen	4 dokumen			
				Pelindungan Cagar Budaya	jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	34 buah	218 buah			
				<i>Program Pengelolaan Permuseuman</i>	<i>persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu</i>	19 %	48 %			
				Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan Museum Kab/Kota	4 dokumen	4 dokumen			
				Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	jumlah koleksi museum yang dilindungi	0	124 buah			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					jumlah dokumen kajian koleksi museum	1 dokuuen	2 dokumen			
					jumlah sarana dan prasarana pelestarian koleksi museum yang dipelihara	55 unit	27 unit			
				Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	jumlah kunjungan (orang) di obyek Museum dan Taman Budaya	309181	61500			
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum dan taman budaya	3 lokasi	3 lokasi			
					jumlah kunjungan (orang) di obyek museum dan taman budaya	309181 orang	61500 orang			
					Jumlah PAD	10882310 00 rupiah	691435500 rupiah			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
		KECAMATAN KALIWUNGU					0	pada penghujung tahun bersamaan dengan dimulainya musim hujan, terdapat kegiatan (pasar rakyat) menjadikan kebersihan/ kenyamanan lokasi stand kurang optimal. Namun demikian, prinsip efektivitas dapat tetap dicapai, baik berupa pesan pembangunan yang hendak disampaikan ke masyarakat, maupun bantuan yang diberikan, serta dapat menjadikan pengungkit bagi kegiatan perekonomian masyarakat sektor UMKM.	usahakan penentuan target harus diperhitungan dengan baik agar hasil yang akan dicapai maksimal seperti tahun2 sebelumnya	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
		KECAMATAN KOTA KUDUS		<i>Program Pengembangan Kebudayaan</i>	<i>cakupan pengembangan kebudayaan (Kota)</i>	100 %	100 %	Belum ada faktor penghambat yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022	perlu dipertimbangkan sebaik-baiknya capaian kinerja di tahun selanjutnya agar hasil dapat dicapai maksimal seperti tahun sebelumnya	
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian kesenian tradisional di Kecamatan Kota	1 kegiatan	1 kegiatan				
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Festival seni budaya yang dilaksanakan	1 kali	1 kali				
		KECAMATAN JATI		<i>Program Pengembangan Kebudayaan</i>	<i>cakupan pengembangan kebudayaan (jati)</i>	100 %	100 %	Berbarengan dengan kegiatan diakhir tahun yang sangat padat serta terjadi bencana di wilayah Kecamatan Jati sehingga penyerapan anggaran kurang maksimal	tetapkan target yang sesuai dengan kemampuan OPD, agar hasil maksimal	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kesenian tradisional dalam daerah kabupaten/kota	1 kali	1 kali			
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terfasilitasinya perkembangan keragaman budaya daerah	1 kegiatan	1 kegiatan			
		KECAMATAN UNDAAN		<i>Program Pengembangan Kebudayaan</i>	<i>cakupan pengembangan kebudayaan (undaan)</i>	100 %	100 %	kurangnya sarpras untuk peningkatan kinerja dan kelancaran administrasi kegiatan	tentukan target sesuai dengan rencana yang matang, agar hasil di akhir periode dapat tercapai maksimal	
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pentas seni dan budaya lokal	3 kegiatan	3 kegiatan			
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah fasilitasi penta seni dan pelestarian budaya lokal yang terlaksanan	3 kali	3 kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
		KECAMATAN MEJOBLO		<i>Program Pengembangan Kebudayaan</i>	<i>Cakupan Pengembangan Kebudayaan (Mejoblo)</i>	100 %	100 %	Terlambatnya proses penetapan DPPA sehingga pelaksanaan kegiatan terlambat	target tahun mendatang agar diperhitungkan sedemikian rupa agar capaian diakhir tahun tinggi	
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah festival seni dan budaya yang terlaksana	1 kegiatan	1 kegiatan			
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah festival seni dan budaya yang terlaksana	3 kegiatan	3 kegiatan			
		KECAMATAN JEKULO					0	Adanya Covid 19 membuat Percepatan Pelaksanaan Kegiatan menjadi kurang maksimal	pertimbangkan penentuan target kinerja di tahun mendatang agar diperkirakan dapat terserap maksimal sesuai jadwal kegiatan	
		KECAMATAN BAE					0	Terlambatnya Proses Penetapan DPPA sehingga Pelaksanaan Kegiatan Terlambat	Perhatikan target dimasa depan agar disesuaikan dgn kondisi saat itu, agar hasil yang diraih bisa maksimal seperti di tahun sebelumnya	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
		KECAMATAN GEBOG		<i>Program Pengembangan Kebudayaan</i>	<i>Cakupan Pengembangan Kebudayaan (Gebog)</i>	100 %	0	Waktu pelaksanaan anggaran perubahan yang kurang mencukupi sehingga kinerja perangkat daerah kurang maksimal, serta kurangnya sarana dan prasarana kantor	Ada ketidakseimbangan serapan antara fisik dan pagunya oleh karena itu diharapkan tahun mendatang dapat dihitunng dgn penuh perrimbangan agar hasil maksimal	
		KECAMATAN DAWE		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	1 kegiatan	0			
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya	1 kali	0			
				<i>Program Pengembangan Kebudayaan</i>	<i>cakupan pengembangan kebudayaan (dawe)</i>	100 %	50 %	Adanya penambahan perubahan di akhir tahun sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal	Pertimbangkn dgn matang penentuan target kinerja di th mendatang agar tercapai maksimal	
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	100 %	50 %			
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Festial seni dan budaya yang terlaksana	1 kali	0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		<i>Program Pembinaan Perpustakaan</i>	<i>persentase pengunjung perpustakaan per tahun</i>	<i>8,7 persen</i>	<i>1,69 persen</i>	Penetapan target kinerja pada triwulan IV sudah ada pencapaian 100 %, ada juga yang belum mencapai sesuai target , yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, sehingga untuk indikator yang rendah akan akan lebih mudah dalam pencapaian target kinerja, sedangkan target kinerja yg tinggi kemungkinan lebih sulit dalam pencapaian kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran dan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, sedangkan jika target kinerja	Dicermati kembali penentuan target, penentuan target didasarkan pada data series paling sedikit 3 tahun dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Dinarpus belum sepenuhnya melakukan itu. Kinerja secara umum tercapai 100% sehingga termasuk kategori sangat tinggi.	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2400 orang	14959 orang			
				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan	10 perpus	48 perpus			
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemustaka yang membaca buku	100 orang	100 orang			
				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan penunjang pelayanan dan promosi perpustakaan	10 kegiatan	10 kegiatan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah fasilitasi kegiatan masyarakat (Inklusi Sosial)	45 kali	230 kali	tinggi sehingga dalam capaian lebih sulit dicapai meskipun ada target yang tercapai meskipun baru pada triwulan II, perubahan target indikator perlu dilakukan agar realisasi capaian indikator dapat dicapai		
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		<i>Program Pengelolaan Arsip</i>	<i>persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal retensi arsip</i>	<i>22,58 persen</i>	<i>60,46 persen</i>	Penetapan target kinerja pada triwulan IV sudah ada pencapaian 100 %, ada juga yang belum mencapai sesuai target , yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, sehingga untuk indikator yang rendah akan akan lebih mudah dalam pencapaian target kinerja, sedangkan target kinerja yg tinggi kemungkinan	Dicermati kembali penentuan target, penentuan target didasarkan pada data series paling sedikit 3 tahun dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Dinarpus belum sepenuhnya melakukan itu. Kinerja secara umum tercapai 100% sehingga termasuk kategori sangat tinggi.	
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	15 OPD	26 OPD			
				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah pelaksanaan sosialisasi kearsipan di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus	2 kali	2 kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah pelaksanaan pembinaan kearsipan perangkat daerah	15 OPD	26 OPD	lebih sulit dalam pencapaian kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran dan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, sedangkan jika target kinerja tinggi sehingga dalam capaian lebih sulit dicapai meskipun ada target yang tercapai meskipun baru pada triwulan II, perubahan target indikator perlu dilakukan agar realisasi capaian indikator dapat dicapai		
				Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan kearsipan	9 kec	9 kec			
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola	10 OPD	10 OPD			
				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah akuisisi arsip inaktif Perangkat Daerah	50 Arsip	50 Arsip			

3.1.3. Pelaksanaan urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		<i>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</i>	<i>persentase peningkatan produksi perikanan</i>	98,9 %	98,9 %	Adanya serangan Penyakit Mulut dan Kuku pada sektor peternakan, namun semua sudah dapat diatasi	Tindakan-tindakan preventif dapat dilakukan sebagai upaya persiapan pelaksanaan kegiatan lebih baik dan peningkatan kinerja	
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah produksi perikanan budidaya	2182 ton	2195,1 ton			
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya pelatihan budidaya perikanan dan sekolah lapang	45 orang	45 orang			
					Perencanaan Teknis	1 paket	1 paket			
					Pengawasan teknis	1 paket	1 paket			
					Administrasi pendukung kegiatan	1 paket	1 paket			
Tersedianya tenaga administrasi 2 org x 12 bulan		24 OB	24 Ob							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Hibah Kolam Terpal Bundar D3 Fullset kepada Kelompok Surya Lele Desa Jati Kulon	6 unit	6 unit			
					Hibah Pengadaan Benih Lele kepada Kelompok Surya Lele Desa Jati Kulon	12000 ekor	12000 ekor			
					Hibah Pengadaan Ember Greeding kepada Kelompok Surya Lele Desa Jati Kulon	1 buah	1 buah			
					Hibah Pengadaan Pakan Ikan kepada Kelompok Surya Lele Desa Jati Kulon	930 kg	930 kg			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Hibah Pembangunan Kolam Permanen kepada Poktan Tani Ternak Rejo Makmur Desa Ngemplak	1 paket	1 paket			
					Hibah Pengadaan Alat Perikanan kepada Poktan Tani Ternak Rejo Makmur Desa Ngemplak	1 paket	1 paket			
					Hibah Pengadaan Benih Ikan Lele kepada Poktan Tani Ternak Rejo Makmur Desa Ngemplak	10000 ekor	10000 ekor			
					Hibah Pengadaan Pakan kepada Poktan Tani Ternak Rejo Makmur Desa Ngemplak	1000 kg	1000 kg			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	125000 ekor	125100 ekor			
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Tersedianya pakan ikan dan kelengkapan pembibitan	1 paket	1 paket			
					Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	12 OB	12 OB			
				<i>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</i>	<i>persentase peningkatan produksi perikanan</i>	<i>98,9 persen</i>	<i>98,9 persen</i>			
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	1845 ton	1853,55 ton			
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Forum Pokdakan dan Poklaksar	4 kali	4 kali			
					Pembinaan dan penumbuhan kelompok Pokdakan/Poklaksar	9 kec	9 kec			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Pelatihan dan sekolah lapang pengolahan hasil perikanan	45 orang	45 orang			
					Administrasi pendukung kegiatan	1 paket	1 paket			
					Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	12 OB	12 OB			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		<i>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</i>	<i>persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai</i>	<i>8 persen</i>	<i>8 persen</i>	Terkait DPPA yang di tandatangan dibulan Oktober membawa dampak pada jadwal kegiatan menyebabkan realisasi target dan serapan anggaran tidak sesuai, ada kegiatan yang kurang waktu sehingga terpaksa tidak dilaksanakan	Utk Renja OPD pada triwulan/tahun berikutnya, Bappeda mengharap Dinas Budpar lebih kreatif dan giat dalam memajukan pariwisata di Kab. Kudus. Perlunya pembenahan tempat-tempat wisata yang saat ini agak terlupakan. Pariwisata Kudus	
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota	4 dokumen	4 dokumen			
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	jumlah kunjungan wisata (orang) di obyek wisata	1902457 orang	691528 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah sarpras dalam pengelolaan kawasan wisata strategis yang dipelihara	4 unit	4 unit		harus lebih bersemangat dalam menciptakan objek-objek wisata baru sekaligus merestorasi destinasi lama yang dulunya menjadi primadona wisatawan.	
				Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah sarpras dalam pengelolaan kawasan wisata strategis yang diadakan	2 unit	2 unit			
					jumlah PAD Sektor pariwisata	2147483647 rupiah	2390389100 rupiah			
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	4 dokumen	4 dokumen			
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi pariwisata yang difasilitasi	4 desa	4 desa			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Kabupaten/Kota	jumlah SK Penetapan Desa Wisata	1 dokumen	0			
				<i>Program Pemasaran Pariwisata</i>	<i>persentase peningkatan promosi pariwisata</i>	<i>14 persen</i>	<i>14 persen</i>			
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota	4 dokuumen	4 dokumen			
				Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	jumlah destinasi wisata yang dipromosikan	24 obyek	24 obyek			
				<i>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>	<i>Persentase Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>	<i>5 persen</i>	<i>5 persen</i>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	jumlah laporan triwulanan kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	4 dokumen	4 dokumen			
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	jumlah pelaku/pekerja industri pariwisata yang dibina	190 orang	190 orang			
			jumlah pelaku/pekerja pada industri pariwisata (orang) yang tercatat		1147 orang	1147 orang				
			jumlah SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat kompetensinya		40 orang	40 orang				
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</i>	<i>persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perke</i>	98,52 %	102,9 %	Adanya serangan Penyakit Mulut dan Kuku pada sektor peternakan, namun semua	Tindakan-tindakan preventif dapat dilakukan sebagai upaya	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					<i>bunan</i>			sudah dapat diatasi	persiapan pelaksanaan kegiatan lebih baik dan peningkatan kinerja	
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah benih padi bersertifikat yang tersedia	3 ton	3,05 ton			
				Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Belanja bahan/bibit tanaman	180 kg	180 kg			
					Afministrasi pendukung kegiatan	1 pekt	1 pekt			
				<i>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	<i>persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan</i>	98,52	102			
				Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah petani yang meningkat ketrampilannya dibidang budidaya tanaman perkebunan	150 orang	150 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Terlaksananya pelatihan petani tebu	30 orang	30 orangn			
					Tertibnya administrasi kegiatan	1 paket	1 paket			
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah infrastruktur pertanian kondisi baik	450 km	461,2 km			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rehab JITUT	3 lokasi	3 lokasi			
					Pembangunan Irigrasi Tanah Dangkal	2 lokasi	2 lokasi			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha tani	33 lokasi	33 lokasi			
					Terlaksananya Perencanaan, Pengawasan dan Administrasi	1 paket	1 paket			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Tersedianya Combine Harvester	4 unit	5 unit			
					Jumlah Tenaga Administrasi Yang Tersedia	24 OB	24 Ob			
					Tersedianya Hand Traktor	4 unit	2 unit			
					Terlaksananya rehab Gedung Puskesmas Besito	1 paket	1 paket			
					tersedianya desaint perencanaan untuk kegiatan konstruktual	1 paket	1 paket			
				<i>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	<i>persentase peningkatan produksi peternakan</i>	95,24 %	86,1 %			
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam	Jumlah peningkatan populasi ternak besar	11199 ekor	10220 ekor			
					Jumlah populasi ternak	40983 ekor	40759 ekor			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Daerah Kabupaten/Kota	kecil					
					Jumlah populasi ternak unggas	11046463 ekor	12097593 ekor			
				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Tersedianya semen beku/ straw vaccin	550 dosis	550 dosis			
					Tersedianya N2 cair	840 liter	840 liter			
					Tersedianya obat-obatan ternak	1 paket	1 paket			
					Terlaksananya pembinaan dan peningkatan SDM petugas peternakan	1 paket	1 paket			
					Tertibnya administrasi kegiatan	1 paket	1 paket			
					Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	1 OB	1 OB			
					Hibah Ternak Kambing	1 paket	1 paket			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Tersedianya alat uji kualitas susu segar (Milk Analysir)	1 unit	1 unit			
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah hewan yang disembelih sesuai standart ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	1300 ekor	1350 ekor			
					Jumlah hewan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	135 ekor	160 ekor			
				Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Terselenggaranya operasional dan pengelolaan UPT Puskesmas	1 paket	1 paket			
					Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	10 OB	12 OB			
				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Terselenggaranya operasional dan pengelolaan Rumah Potong Hewan	1 paket	1 paket			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah wira usaha peternakan yang difasilitasi	150 orang	150 orang			
					Jumlah peningkatan sarpras peternakan	1 unit	0 unit			
					Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Terwujudnya pengembangan usaha agribisnis peternakan	1 paket			
					Terlaksananya pembinaan dan peningkatan teknologi sarana prasarana peternakan	1 paket	1 paket			
					Tertibnya administrasi kegiatan	1 paket	1 paket			
					Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	12 OB	12 Ob			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				<i>Program Pengendalian aan Penanggulangan Bencana Pertanian</i>	<i>persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/ perkebunan</i>	<i>98,52 persen</i>	<i>102 persen</i>			
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah penanaman bibit unggul tanaman buah-buahan	10000 batang	0			
					Jumlah petani yang meningkat ketrampilannya di bidang budidaya tanaman pangan dan hortikultura	200 orang	200 orang			
					Tersedianya obat-obatan pertanian	15000 kg	1500 kg			
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengembangan kawasan bawang merah sistem sungkup	4 Ha	2 Ha			
					Pengadaan pestisida dan herbisida	1500 liter	1500 liter			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Sekolah lapang Pengendalian Hama Penyakit Terpadu (SLPHT) Tanaman Pangan/ Hortikultura)	5 kelompok	5 kelompok			
					Sekolah lapang Good Agriculture Practice (SL-GAP) kencur	2 kelompok	0			
					Pelatihan kompetensi petugas statistik tanaman pangan/hortikultura	3 kali	0			
					Administrasi pendukung kegiatan	1 paket	1			
					Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	24 OB	24 OB			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				<i>Program Penyuluhan Pertanian</i>	<i>persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/ perkebunan</i>	<i>98,52 persen</i>	<i>102 persen</i>			
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah gapoktan yang difasilitasi dalam menyusun RDKK	123 kelp	112 kelp			
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan (penyusunan RDKK, pelatihan teknologi pertanian, lomba penyuluhan	1 paket	1 paket			
					Terlatihnya kader saka taruna bumi	50 orang	50 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Pelatihan dan bantuan modal usaha pada buruh tani	32 orang	0			
					Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	12 OB	12 OB			
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedianya sarpras pendukung BPP	2 paket	2 paket			
					Terlaksananya rehab BPP	2 BPP	2 BPP			
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		<i>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</i>	<i>persentase tutupan lahan</i>	<i>0,4 %</i>	<i>14,92 %</i>	1. pencemaran lingkungan 2. Semakin meningkatnya backlog perumahan dan tingginya harga perumahan berpotensi adanya permukiman kumuh 3. Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang meningkat mempengaruhi	evaluasi faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja, dan evaluasi target kinerja tahun ini yang belum memenuhi target maupun penetapan target kinerja yang terlalu rendah sehingga belum memenuhi kriteria SMART-C	
					<i>Persentase tutupan lahan tahura</i>	<i>10 persen</i>	<i>14,92 persen</i>			
				Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Jumlah tanaman dalam tahura	150	150			
				Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Jml perjanjian kerjasama penyelenggaraan TAHURA Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
								kinerja pengelolaan persampahan 4. Keterbatasan lahan dalam peningkatan luas ruang terbuka hijau, overkapasitas TPA	sebagai upaya perbaikan perencanaan kegiatan di tahun mendatang dengan penetapan target yang lebih menantang	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		<i>Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan</i>	<i>Cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral</i>	<i>100 persen</i>	<i>100 persen</i>	1. Kondisi perekonomian pasca pandemi covid 19 belum sepenuhnya pulih sehingga minat masyarakat untuk berinvestasi masih rendah. 2. Realisasi LKPM masih rendah dan jauh dari target dikarenakan kewenangan kabupaten hanya terbatas pada perusahaan berskala kecil sehingga realisasi LKPM nya kecil	Utk triwulan dan Renja OPD selanjutnya, kami sarankan untuk melakukan: 1. Optimalisasi pelaksanaan SOP yang telah disusun sehingga memudahkan pelaksanaan tugas selanjutnya 2. Rekam data hasil pelaksanaan pekerjaan mohon dapat ditertibkan, sehingga dapat digunakan oleh pihak lain yang membutuhkan	
				Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan langsung panas bumi	2 kali	2 kali			
				Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi perizinan	2 dokume	2 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN		<i>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD</i>	4,3 %	2,463 %	Tidak terdapat juknis untuk pelaksanaan RMU Revitalisasi Pasar Kalirejo tidak dilaksanakan karena terdapat penolakan pedagang Revitalisasi Taman Bojana tidak dilaksanakan karena pembatalan SPBJ karena waktu yang terlalu mepet Pada pengembangan usaha ekspor tidak dilaksanakan karena tidak ada event pameran Pada program stabilisasi harga terdapat belanja yang bukan merupakan komoditi bahan pokok Pada sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi	Untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya, Perangkat Daerah perlu meningkatkan upaya kinerjanya agar dapat lebih maksimal lagi, dan diusahakan lebih tinggi dari capaian pada tahun ini. Perangkat Daerah diharapkan untuk lebih memperhatikan satuan target indikator dan realisasi harus selaras (sama) serta agar lebih sesuai substansi kegiatan dan indikator program yang didukung. Selanjutnya agar penyusunan rencana triwulan antara capaian	
					<i>Cakupan Pengelolaan Pasar Rakyat</i>	90 %	90 %			
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/ direvitalisasi	11 unit	9 unit			
					Realisasi penerimaan retribusi	1193708900 0 rupiah	10863217531 rupiah			
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang Direvitalisasi dan dibangun	10 pasar	9 pasar			
					Jumlah Gudang yang direvitalisasi atau dibangun	1 gudang	0			
					Jumlah pasar yang dikelola	27 pasar	25 pasar			
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar	4,4 %	-37,764 %							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Penerimaan Retribusi Pasar	1083700000 rupiah	8892400222 rupiah	Perdagangan untuk realisasi pendapatan minus hal ini dikarenakan adanya permohonan keringanan biaya sewa PKD dari pedagang pasar kliwon dan pasar baru sehingga pemungutan sewa PKD di pasar kliwon dan pasar baru blm bisa dilakukan dan dengan formulasi penghitungannya = pertumbuhan realisasi pendapatan maka hasilnya adalah minus	kinerja dengan capaian realisasi anggaran lebih disinkronisasikan sehingga memperoleh keselerasan capaian kinerja dan anggaran yang lebih baik. Dengan adanya perubahan Renstra OPD agar target program/kegiatan/sub kegiatan juga disesuaikan, Diperlukan upaya optimalisasi ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah.	
					Penerimaan Retribusi Gudang	800000000 rupiah	0			
					Penerimaan Retribusi Trade Center	5300000000 rupiah	485754309 rupiah			
					Terlaksananya kebersihan pasar	100 %	80 %			
					Terlaksananya Keamanan pasar	100 %	80 %			
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	142 pengelola	142 pengelola			
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	142 pengelola	142 pengelola			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				<i>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</i>	<i>cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi</i>	95 %	94,34 %			
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota	Jumlah Pemantauan pendistribusian , pemantauan harga dan stock barang, operasi pasar	106 kali	106 kali			
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan pendistribusian barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan	48 kali	48 kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	48 kali	48 kali			
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pasar reguler dan operasi pasar khusus	10 kali	10 kali			
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota	36 dokumen	40 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Distributor Pupuk bersubsidi dan KPL yang diperiksa Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	134 kali	144 kali			
				Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jml Pengawasan terhadap pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Daerah Kab/Kota	12 kali	12 kali			
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jml pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi yang dilakukan	24 kali	24 kali			
				<i>program pengembangan ekspor</i>	<i>Nilai ekspor</i>	<i>162506900 0000 rupiah</i>	<i>1532503181 562,29 rupiah</i>			
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran	Jumlah promosi dan misi dagang bagi	4 dokumen	5 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	produk ekspor					
				Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan pengembangan ekspor	8 pelaku	2 pelaku			
				Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah promosi produk ekspor	1 kali	0			
				<i>Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</i>	<i>cakupan fasilitasi perlindungan konsumen</i>	90 %	75 %			
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah laporan pelaksanaan tera dan tera ulang dan realisasi retribusi tera	12 dokumen	11 dokumen			
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang	7843 UTTP	10499 UTTP			
					Penerimaan retribusi tera	117000000 rupiah	165113000 rupiah			
				Pengawasan/Peny	Jumlah peserta	100 orang	105 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				uluhan Metrologi Legal	sosialisasi					
					Jumlah temuan barang tidak layak edar	14 temuan	14 temuan			
					Jumlah masalah sengketa konsumen yang telah difasilitasi	2 sengketa	0			
				<i>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</i>	<i>cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal</i>	<i>60 persen</i>	<i>40 persen</i>			
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah laporan pelaksanaan produk dalam negeri dan Data Base PKL	1 dokumem	1 dokumen			
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri	2 kali	1 kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah sistem dan jaringan informasi PKL yang dikelola	1 aplikasi	1 aplikasi			
					Jumlah PKL yang berjualan di tempat yang diijinkan	5000 orang	4900 orang			
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		<i>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</i>	<i>persentase pertumbuhan IKM</i>	<i>0,35 persen</i>	<i>0,369 persen</i>	Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber pada DBHCHT baru dilaksanakan di Triwulan II setelah DPA DBH CHT disahkan dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan PMK. 215-2021. Beberapa kegiatan yang bersumber dari DBHCHT tidak bisa dilaksanakan karena terkendala regulasi.	Utk Renja OPD pada triwulan/tahun berikutnya, Dinas Nakerperinkop UKM dapat meneruskan kegiatan-kegiatan yang dapat memajukan UMKM sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, serta lebih kreatif dalam menyusun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk menurunkan	
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Triwulanan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	1 dok	1 dok				
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan	Tersedianya Mesin Pelinting Rokok MK 8 (reguler)	1 unit	0				
				Tersedianya Lampu Penerangan Jalan LIK-IHT	5 unit	5 unit				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Industri	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengecatan Ulang LIK - IHT	1 paket	1 paket		tingkat pengangguran.	
					Terlaksananya Pembangunan Taman dan Rehabilitasi Gapura LIK - IHT	1 paket	1 paket			
					Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Taman dan Rehabilitasi Gapura LIK - IHT	1 dokumen	1 dokuumen			
					Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Taman dan Rehabilitasi Gapura LIK - IHT	1 dokumen	1 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Terlaksananya Pembangunan Gedung Produksi LIK - IHT (Gedung L) dan Ruang Genset	1 unit	1 unit			
					Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Gedung Produksi LIK - IHT (Gedung L) dan Ruang Genset	1 dokumem	1 dokumen			
					Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Produksi LIK - IHT (Gedung L) dan Ruang Genset	1 dokumen	1 dokumen			
					Terlaksananya Pembangunan Gedung Produksi LIK - IHT (Gedung M)	1 unit	1 unit			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Gedung Produksi LIK - IHT (Gedung M)	1dokumem	1 dokumen			
					Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Produksi LIK - IHT (Gedung M)	1 dokumen	1 dokumen			
					Terlaksananya Pembangunan Gedung Produksi LIK - IHT (Gedung N)	1 unit	1 unit			
					Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Gedung Produksi LIK - IHT (Gedung N)	1 dokumen	1 dokumem			
					Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Produksi LIK - IHT (Gedung N)	1 dokumen	1 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Terlaksananya Pembangunan Rehabilitasi Mushola, Kantin dan Ruang Tunggu	1 unit	1 unit			
					Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Rehabilitasi Mushola, Kantin dan Ruang Tunggu	1 dokumen	1 dokumen			
					Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Rehabilitasi Mushola, Kantin dan Ruang Tunggu	1 dokumen	1 dokumen			
					Terlaksananya Pengadaan Mesin Pengolahan KIHT (Blending, Pengering, Perajang Tembakau)	3 jenis	3 jjeni			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Terlaksananya Pembangunan Renovasi Kanopi, Talang dan Kamar Mandi	1 kgt	0			
					Tersusunnya Perencanaan Renovasi Kanopi, Talang dan Kamar Mandi	1 kgt	1 kgt			
					Terlaksananya Pengawasan Renovasi Kanopi, Talang dan Kamar Mandi	1 kgt	1 kgt			
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen Studi kelayakan pembangunan Sentra IKM logam, Rekayasa mesin dan kopi (sesuai perpres 79/2019)	1 dok	0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Jumlah dokumen DED pembangunan Sentra IKM logam, Rekayasa mesin dan kopi (sesuai perpres 79/2019)	1 dok	0			
					Terlaksananya Kegiatan Operasional Laboratorium LIK-IHT	12 bulan	12 bulan			
					Terselenggaranya Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok	1 kgt	1 kgt			
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM IHT yang mendapat fasilitasi pelatihan GMP	30 IKM	30 IKM			
					Tersedianya lahan untuk Pembentukan Sentra IHT	10000 m2	0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Tersusunnya Dokumen Appraisal Tanah untuk Pembentukan Sentra IHT	1 dokumen	0			
					Terlaksananya Pembangunan Gedung SIHT	1 kgt	0			
				Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Laporan hasil monev rencana pembangunan industri	1 dok	1 dok			
				<i>Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota</i>	<i>persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan Izin Usaha Industri (IU)</i>	<i>30 pesen</i>	<i>30,77 persen</i>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Triwulanan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	1 dok	1 dok			
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah IKM Kudus yang mendapat pendampingan Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI dalam SIINAS	5 IKM	5 IKM			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				<i>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</i>	<i>Persentase Jumlah Perusahaan Industri yang Terpantau dalam Penyampaian Data melalui SIINAS</i>	<i>25 persen</i>	<i>25,35 persen</i>			
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Triwulanan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	1 dok	1 dok			
				Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kab/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan dan evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri di Kudus dalam Penyampaian Data ke SIINAS	1 dok	1 dok			
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL		<i>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</i>	<i>persentase calon transmigran yang terfasilitasi</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber pada DBHCHT baru dilaksanakan di	Utk Renja OPD pada triwulan/tahun berikutnya, Dinas	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
		DAN MENENGAH		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan triwulanan Penataan Persebaran Penduduk	1 dok	1 dok	Triwulan II setelah DPA DBH CHT disahkan dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan PMK. 215-2021. Beberapa kegiatan yang bersumber dari DBHCHT tidak bisa dilaksanakan karena terkendala regulasi.	Nakerperinkop UKM dapat meneruskan kegiatan-kegiatan yang dapat memajukan UMKM sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, serta lebih kreatif dalam menyusun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat pengangguran.	
			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan konsultasi an transmigran	1 lap	1 lap				

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan Strategis yang diambil meliputi pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus yang dituangkan baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati maupun tindakan yang diambil oleh Bupati Kudus dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2022

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	-Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2022	Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2022	Kebijakan Pengawasan
2	-Perda Kab. Kudus No. 10 tahun 2021 tentang Perlindungan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran Hak Azazi Manusia
3	-Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kudus.	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;	1. Masa berlaku KTP berlaku seumur hidup; 2. Pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya (GRATIS).

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
4	Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Kudus.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Kudus.	1. Penerbitan data kependudukan secara cepat, mudah, gratis dan terukur sesuai ketentuan perundang-undangan; 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Kudus.
5	Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kudus tahun 2022 -2025	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012	Tujuan: Untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas bagi pengembangan Penanaman Modal di Daerah.
6	Standar operasional prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus	Keputusan Bupati Kudus Nomor 067.1/385/2021 tanggal 15 September 2021	Tujuan: Sebagai pedoman pelaksanaan tugas berupa petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
7	Standar Pelayanan (SP) Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Keputusan Bupati Kudus Nomor: 067/384/2021 tanggal 15	Tujuan: -Sebagai pedoman dan acuan yang

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus	Setember 2021	digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus dalam melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan.
8	Tersalurkannya Hibah Uang untuk Bantuan Modal Usaha kepada Wirausaha	Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/266/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah Uang untuk Bantuan Modal Usaha kepada Wirausaha yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.	Sebagai stimulus yang diberikan kepada UMKM untuk mendukung pengembangan dan peningkatan daya saing usaha UMKM agar terus berkembang sebagai usaha ekonomi produktif di Kabupaten Kudus.
9	Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang modern, efektif, efisien dan akuntabel melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
10	Peraturan Bupati Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 Tanggal: 1 Juli 2022	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023
11	Peraturan Bupati Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Bupati

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Tanggal: 26 Juli 2022	Kudus Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022
12	Peraturan Bupati Kudus	Keputusan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2022 Tanggal: 1 Agustus 2022	Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023
13	Keputusan Bupati Kudus	Keputusan Bupati Kudus Nomor: 050/184/2022 Tanggal: 25 Agustus 2022	Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022
14	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup Nomor 59 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. 2. Perbup Nomor 60 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. 3. Perbup Nomor 61 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir. 4. Perbup Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pajak Air Tanah. 	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		5. Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pajak Restoran. 6. Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). 7. Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan ke 2 atas Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD)	
15	Surat Keputusan Bupati Kudus	Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor: 360/177/2022 Tanggal: 11 Agustus 2022	Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Tanah Longsor, Banjir, dan Angin Kencang di Kabupaten Kudus
16	Peraturan Bupati Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2022 Tanggal: 1 Desember 2022	Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2022-2026
17	Peraturan Bupati Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 54 Tahun 2022 Tanggal: 1 Desember 2022	Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2022-2026
18	Surat Keputusan Bupati Kudus	Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor: 360/283/2022 Tanggal: 2 Desember 2022	Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Tanah Longsor, Banjir, dan Angin Kencang di Kabupaten Kudus
19	Surat Keputusan Bupati Kudus	Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor: 360/282/2022 Tanggal: 2 Desember 2022	Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
20	Peraturan Bupati Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corono Virus Disease</i> 2019 di Kabupaten Kudus	Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya percepatan dan pengendalian Corono Virus Disease (Covid 19) di Kabupaten Kudus
21	Keputusan Bupati Kudus	Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor 220 / 230 / 2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 220 / 254 / 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kudus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pelaksanaan aktivitas Organisasi kemasyarakatan berjalan sesuai fungsi dan tujuan organisasi 2. Melakukan pengawasan eksternal kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak; 3. Melakukan kajian dan analisa terhadap subyek, obyek dan materi pengaduan dari masyarakat dan dikoordinasikan dengan instansi dan atau lembaga lain; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terencana dan sistematis sebelum maupun sesudah ada pengaduan dari masyarakat; 5. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian sanksi kepada Organisasi Kemasyarakatan yang melanggar kewajiban dan larangan;

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada Bupati minimal 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan
22	Keputusan Bupati Kudus	Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor 134 / 258 / 2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa; 2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kerukunan antar dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan; 3. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi penanganan konflik sosial, pelaksanaan tugas antar instansi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul; 4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; 5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
23	Keputusan Bupati Kudus	Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor 220 / 230 / 2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 220 / 254 / 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kudus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa; 2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kerukunan antar dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan; 3. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi penanganan konflik sosial, pelaksanaan tugas antar instansi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul; 4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; 5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
24	Keputusan Bupati Kudus	Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor 300 / 263 /2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 300 / 262 / 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Kudus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 3. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
25	Keputusan Bupati Kudus	Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor 450 / 269 / 2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 450 / 350 / 2021 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus Periode Tahun 2021 - 2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragam; 2. Memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Kabupaten Kudus dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di Kabupaten Kudus
26	Keputusan Bupati Kudus	Keputusan Bupati Kudus Nomor 300 / 17 / 2017 tentang Pembentukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kudus	Kabupaten Kudus; 2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik di Kabupaten Kudus; 3. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya; 4. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini; 5. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; 6. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
27	Keputusan Bupati Kudus	Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor 134 / 258 / 2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	1. Meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik yang diajukan oleh Partai Politik 2. Membuat Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
28	Keputusan Bupati Kudus	Keputusan Bupati Kudus Nomor 201.8 / 275 / 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG); 2. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah daerah.
29	Keputusan Bupati Kudus	Keputusan Bupati Kudus Nomor 300 / 460 / 2019 tentang Penetapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Kudus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah 2. Mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi / bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya. 3. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 4. Memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kabupaten Kudus
30	Keputusan Bupati Kudus	Keputusan Bupati Kudus Nomor 300 / 62.1 / 2019 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaring aspirasi masyarakat di bidang persaudaraan bangsa; 2. Menyelenggarakan dialog dengan pimpinan Organisasi Kemasyarakatan bidang persaudaraan bangsa Indonesia, pemuka adat, suku dan masyarakat; 3. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan persaudaraan bangsa Indonesia; 4. Merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan persaudaraan bangsa Indonesia;
31	Keputusan Bupati Kudus	Keputusan Bupati Kudus Nomor 220 / 33 / 2017 tentang Pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia di Kabupaten Kudus Periode Tahun 2017 - 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaring aspirasi masyarakat di bidang penghayat kepercayaan 2. Menyelenggarakan dialog dengan pimpinan Penghayat Kepercayaan yang ada di Kabupaten Kudus 3. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			penghayat kepercayaan; 4. Merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan tentang penghayat kepercayaan
32	Peraturan Bupati Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2015	Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus
33	Peraturan Bupati Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2015	Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Kudus yang Berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil
34	Peraturan Bupati Kudus	Peraturan Bupati Kudus No. 27 Tahun 2017	Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus
35	Peraturan Bupati Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B
36	Peraturan Bupati Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2022	Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
37	Keputusan Bupati Kudus	Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/208/2011	Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus
38	Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ttg Perangkat Daerah.	Mengakomodir Peningkatan Kelembagaan Dinas PMD dari Tipe C (2 Bidang) menjadi Tipe B (3 Bidang).
39	Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus.	Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.	Mengakomodir Peningkatan Kelembagaan Kantor Kesbangpol menjadi Badan Kesbangpol dgn Intensitas Sedang.
40	Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.	Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	Mengakomodir Peningkatan Kelembagaan Kantor BPBD Kabupaten Kudus dari Klasifikasi B menjadi Klasifikasi A. Menindaklanjuti surat BNPB tanggal 16 Nopember 2021 Nomor: B.1385/BNPB/SU/HK.08/11/2021 Hal Rekomendasi atas Permohonan Peningkatan Klasifikasi BPBD Kab. Kudus.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
41	Keputusan Bupati Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor 435 / 264 / 20225 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Kudus Tanggal 8 Mei 2014 Nomor 436 / 112 / 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Kudus 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2016-2025 adalah dasar untuk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035 selama periode masa perencanaan pembangunan jangka Panjang
42	SK BUPATI Nomor 556/133/2020 Tanggal 7 Juli 2020 tentang Penetapan Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Berkembang di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> -Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam
43	Tersalurkannya Hibah Uang untuk Bantuan Modal	Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/266/2022 tanggal 18 November	<ul style="list-style-type: none"> -Sebagai stimulus yang diberikan kepada UMKM untuk mendukung

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Usaha kepada Wirausaha	2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah Uang untuk Bantuan Modal Usaha kepada Wirausaha yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan -Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.	pengembangan dan peningkatan daya saing usaha UMKM agar terus berkembang sebagai usaha ekonomi produktif di Kabupaten Kudus.
44	SK BUPATI Nomor 556/124/2020 Tanggal 2 Juli 2020 tentang Penetapan Desa Jepang Kecamatan Mejobo Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Berkembang di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah 	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam
45	SK BUPATI Nomor 556/173/2020	- Peraturan Daerah Provinsi Jawa	-Bahwa desa wisata mempunyai

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Tanggal 2 September 2020 tentang Penetapan Desa Jurang Kecamatan Gebog Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah	peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam
46	SK BUPATI Nomor 556/126/2020 Tanggal 2 Juli 2020 tentang Penetapan Desa Kaliputu Kecamatan Kota Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah	
47	SK BUPATI Nomor 556/134/2020 Tanggal 7 Juli 2020 tentang Penetapan Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah 	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam
48	SK BUPATI Nomor 556/125/2020 Tanggal 2 Juli 2020 tentang Penetapan Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Berkembang di Kabupaten Kudus	- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46)	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah 	<p>dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam</p>
49	<p>SK BUPATI Nomor 556/122/2020 Tanggal 2 Juli 2020 tentang Penetapan Desa Margorejo Kecamatan Dawe Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah 	<p>-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam</p>
50	<p>SK BUPATI Nomor 556/131/2020 Tanggal 7 Juli 2020 tentang Penetapan Desa Padurenan Kecamatan Gebog Sebagai Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah 	<p>-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan</p>

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	<p>(Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah 	masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam
51	SK BUPATI Nomor 556/121/2020 Tanggal 2 Juli 2020 tentang Penetapan Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah 	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	SK BUPATI Nomor 556/135/2020 Tanggal 7 Juli 2020 tentang Penetapan Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah 	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam
52	SK BUPATI Nomor 556/130/2020 Tanggal 7 Juli 2020 tentang Penetapan Desa Temulus Kecamatan Mejobo Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah	
53	SK BUPATI Nomor 556/123/2020 Tanggal 2 Juli 2020 tentang Penetapan Desa Terban Kecamatan Jekulo Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Berkembang di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah 	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam
54	SK BUPATI Nomor 556/129/2020 Tanggal 7 Juli 2020 tentang Penetapan Desa Ternadi Kecamatan Dawe Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah	karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam
55	SK BUPATI Nomor 556/172/2020 Tanggal 2 September 2020 tentang Penetapan Desa Wonosoco Kecamatan Undaan Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Berkembang di Kabupaten Kudus	- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam
56	SK BUPATI Nomor 556/132/2020 Tanggal 7 Juli 2020 tentang Penetapan Desa Wates Kecamatan	- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat,

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Undaan Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahkan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah	memeratakan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam
57	SK BUPATI Nomor 556/248/2021 Tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Desa Gondosari Kecamatan Gebog Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahkan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Provinsi Jawa Tengah - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 232)	
58	SK BUPATI Nomor 556/237/2021 Tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Desa Gribig Kecamatan Gebog Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 232) 	
59	SK BUPATI Nomor 556/238/2021 Tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Desa Janggalan Kecamatan Kota Kudus Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah - Peraturan Daerah Kabupaten 	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 232)	
60	SK BUPATI Nomor 556/240/2021 Tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Desa Japan Kecamatan Dawe Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 232)	
61	SK BUPATI Nomor 556/239/2021 Tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Desa Kajar Kecamatan Dawe Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk 	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 232)	
62	SK BUPATI Nomor 556/241/2021 Tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata 	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 232)	
	SK BUPATI Nomor 556/242/2021 Tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020- 	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 232)	
63	SK BUPATI Nomor 556/243/2021 Tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah 	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 232)	
64	SK BUPATI Nomor 556/249/2021 Tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 232)	
65	SK BUPATI Nomor 556/244/2021 Tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Desa Klaling Kecamatan Jekulo Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran 	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Daerah Kabupaten Kudus Nomor 232)	
66	SK BUPATI Nomor 556/245/2021 Tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Desa Menawan Kecamatan Gebog Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		232)	
67	SK BUPATI Nomor 556/246/2021 Tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 232) 	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
68	SK BUPATI Nomor 556/247/2021 Tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Desa Pedawang Kecamatan Bae Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 232) 	-Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
69	SK BUPATI Nomor 556.1.6/183/2022 Tentang Penetapan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kudus Masa Kerja Tahun 2022-2026	Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kudus	-Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BP2D) berfungsi untuk menjadi koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah serta menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah dan mempunyai tugas untuk meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia, meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa, meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
70	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022 ttg Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	UNDANG - UNDANG NO. 11 TAHUN 2010 ttg Cagar Budaya	-Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya
		Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 ttg Register Nasional	-

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		dan Pelestarian Cagar Budaya	
		Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 tahun 2013 ttg Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah	-Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah untuk menetapkan peringkat dan status Cagar Budaya
71	Keputusan Bupati Kudus No. 432/79/2022 ttg Penetapan Sebagian Bangunan pada SD Muhammadiyah 1 Kudus sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus	UNDANG - UNDANG NO. 11 TAHUN 2010 ttg Cagar Budaya	-Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya
		Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 ttg Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya	-
		Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 tahun 2013 ttg Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah	-Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah untuk menetapkan peringkat dan status Cagar Budaya
72	Keputusan Bupati Kudus No. 432/78/2022 ttg Penetapan Sebagian Bangunan pada SMP 1 Kudus sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus	UNDANG - UNDANG NO. 11 TAHUN 2010 ttg Cagar Budaya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 ttg Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya	-Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 tahun 2013 ttg Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah	-Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah untuk menetapkan peringkat dan status Cagar Budaya
74	Keputusan Bupati Kudus No. 432/77/2022 ttg Penetapan Sebagian Bangunan pada SMP 2 Kudus sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus	UNDANG - UNDANG NO. 11 TAHUN 2010 ttg Cagar Budaya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 ttg Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya	-Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya
		Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 tahun 2013 ttg Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah	-Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah untuk menetapkan peringkat dan status Cagar Budaya
75	Keputusan Bupati Kudus No. 432/80/2022 ttg Penetapan Sebagian Bangunan pada E ks Omah Mode Kudus sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus	UNDANG - UNDANG NO. 11 TAHUN 2010 ttg Cagar Budaya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 ttg Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya	-Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 tahun 2013 ttg Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah
		Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 tahun 2013 ttg Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah	-Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah untuk menetapkan peringkat dan status Cagar Budaya

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
76	Keputusan Bupati Kudus Nomor 430/160/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan Tim Ahli Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018	Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055; Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);	-Untuk kelancaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan di Kabupaten Kudus.
77	Keputusan Bupati Kudus Nomor 430/164/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018	Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055; d.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);	-Untuk merumuskan kondisi factual, permasalahan dan usulan penyelesaian permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Kudus

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
78	Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/422/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah Uang yang dialokasikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 43); - Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 14); 	-Untuk meningkatkan sarana dan prasarana organisasi kesenian di Kabupaten Kudus

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Sedangkan pelaksanaan dan tindaklanjut atas rekomendasi DPRD Kabupaten Kudus sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 130.0.2/12 Tahun 2022 tanggal 19 April 2022, adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
1	Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pendidikan, perlu adanya dukungan sumber daya manusia yang handal dengan peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan.	Peningkatan peran PBG untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar	Penggunaan IT guru meningkat dalam proses pembelajaran
2	Perlu kajian yang komprehensif terhadap regrouping sekolah dalam rangka mengefisienkan anggaran, manajemen pengelolaan dan solusi dari berkurang tenaga pendidik.	Regrouping sekolah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Regrouping sesuai ketentuan yang berlaku
3	Visi dan Misi Bupati yang menjadikan Kudus sebagai kota yang religius, maka pendidikan moral dan	Implementasi sikap spiritual dalam pembelajaran oleh guru mapel, guru BK dan guru kelas seperti budaya kegiatan	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
	keagamaan terhadap anak didik harus menjadi perhatian serius dalam pembelajaran.	beribadah bersama, mentoring keagamaan dan kebiasaan senyum sapa salam salim	
4	Pembangunan kolam renang yang membutuhkan anggaran yang besar namun fungsi dan pengelolaannya kurang jelas, agar pembahasan anggaran tahun berikutnya perlu dicermati.		
5	Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang taruna, maka anggaran Program kepemudaan yang dulu ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sekarang ikut di Program Kegiatan Dinas Sosial P3AP2KB, sehingga dalam penganggaran Organisasi Kepemudaan perlu diperhatikan efek guna dan Manfaatnya.		

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
6	Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan atas telah tercapainya prestasi bidang pendidikan, baik tingkat propinsi maupun tingkat nasional yang membawa harum nama Kabupaten Kudus.	Mempertahankan prestasi	
7	Pelaksanaan Program Peningkatan peran serta kepemudaan sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta kepemudaan dalam pembangunan melalui beberapa kegiatan antara lain pembinaan pemuda sehingga terbentuk pemuda yang mandiri yang memiliki kepekaan terhadap permasalahan sosial sekitarnya termasuk lingkungan alam.		
8	Pembinaan dan Pengembangan olahraga pendidikan agar dilaksanakan	Pembangunan lapangan olahraga dan pengadaan alat peraga olahraga PJOK	Pembinaan dan pengembangan olahraga melalui pembelajaran di

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
	dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional, melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru olah raga yang berkualifikasi serta didukung prasarana dan sarana olahraga yang memadai.		sekolah dengan meningkatnya sarpras olahraga di sekolah. Hasil pembangunan 1 lapangan olahraga dan 11 sekolah penerima PJOK
9	Prestasi yang diraih putra-putri baik tingkat daerah Provinsi maupun tingkat nasional, Pemerintah daerah harus mengawal sebagai apresiasi atas prestasi yang diraihnya dan memberikan bantuan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi.	Siswa berprestasi diberikan fasilitas pembinaan dan mendapatkan bonus	

2. Dinas Kesehatan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
1	Kegiatan yang anggarannya berasal dari APBD dan APBN agar diperhatikan waktu pelaksanaannya, sehingga tidak terjadi kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak cukup waktu pelaksanaannya.	Menyusun timeline atau schedule pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan skala prioritas Kegiatan berorientasi pada prioritas pengawasan masalah dan capaian realisasi kontruksi kegiatan sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar 100%.	Kegiatan dapat dilaksanakan dan selesai tepat waktu.
2	Pembangunan yang lebih menekankan aspek tuntas sehingga segera bisa dimanfaatkan.	Perencanaan dan penganggaran berdasarkan skala prioritas. Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas disesuaikan dengan tingkat kerusakan.	Pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat dan dapat berjalan secara optimal.
3	Perlunya pertimbangan penggunaan SILPA RSUD sebesar RP. 162.541.560.597,- untuk kemandirian dan peningkatan performance dan pelayanan RSUD sehingga lebih baik.	Digunakan untuk pembangunan gedung IBS dan kelengkapannya serta untuk kegiatan pelayanan kesehatan BLUD T.A. 2022 - Telah digunakan untuk pembangunan gedung IBS T.A. 2022 sebesar RP. 60.000.000.000,-	- Telah terbangunnya gedung IBS sesuai standar Kementerian Kesehatan dan Kamar Operasi yang baru menggunakan sistem MOT yang menghasilkan pelayanan yang lebih baik, diantaranya : waktu pelaksanaan operasi lebih cepat, jumlah kumulatif operasi lebih banyak, pendapatan pelayanan IBS

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
		Telah digunakan untuk penambahan anggaran pada perubahan T.A. 2022 sebesar Rp. 102.541.560.597	meningkat. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dan pendidikan.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Perencanaan pembangunan harus direncanakan matang dan komprehensif, ada aspek estetika dan keselamatan tidak asal-asalan dan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu dan penyedia jasa agar mengerjakan sesuai batas waktu sehingga kualitas pekerjaan lebih baik.	Penyusunan dokumen perencanaan teknis yang berpedoman pada spesifikasi teknis dari kementerian dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan estetika. Penyusunan dokumen perencanaan teknis tahun 2023 sebelum dimulainya pekerjaan kontruksi.	1. Menyediakan dokumen perencanaan teknis yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan memperhatikan aspek keselamatan dan estetika. Penyusunan dokumen perencanaan teknis teranggarkan dalam APBD 2023

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2	Keberadaan Pamsimas yang ada diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan sarana air bersih, adanya beberapa Pamsimas yang mangkrak dan ada yang sudah berjalan tapi kualitas airnya tidak layak oleh karena itu agar dikelola dengan baik.	<p>Pengelolaan Pamsimas (setelah selesai konstruksi) telah diserahkan kepada masyarakat/KPSPAM. Pembinaan telah dilakukan untuk memperbaiki sarana Pamsimas yang rusak (minor), bersifat stimulus supaya masyarakat kembali aktif mengelola sarana Pamsimas.</p> <p>Telah dilaksanakan pembinaan SPAM berbasis masyarakat terhadap KPSPAM Desa Getas Pejaten dan Klaling dengan dana APBD pada TA 2022.</p>	Meningkatkan kualitas air bersih dan kelembagaannya, terkait operasional dan pemeliharaan.
3	Jalan bulucangkring – Batas pati potensi rawan kecelakaan, mobil terguling di sawah dll dikarenakan jalannya sempit, untuk itu perlu peningkatan jalan di ruas tersebut.	Tahun 2022 dilaksanakan pelebaran jalan sepanjang ± 231 meter dan overlay ACWC sepanjang ± 370 meter, tahun 2023 telah diusulkan melalui bantuan Gubernur Jawa Tengah untuk pelebaran jalan sebesar Rp 10.000.000.000,- Pelebaran jalan dan overlay tahun 2022;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dengan meningkatkan kapasitas jalan; 2. Usulan masuk dalam prioritas Bupati dan telah diinput di E-Rembukan Jateng.

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
		Pengusulan peningkatan jalan ke Pemerintah Provinsi melalui Bantuan Keuangan Sarpras.	
4	Pola komunikasi antara dinas PUPR dan BBWS Pemali Juwana agar ditingkatkan lagi sehingga jika ada kegiatan yang dilakukan oleh BBWS Pemali juwana, Dinas PUPR tau detail sampai ke tingkat perencanaannya.	Komunikasi telah dilaksanakan dengan mengusulkan kegiatan-kegiatan pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Kudus. Telah dilaksanakan pembersihan sungai dari sampah dan ranting pohon di beberapa desa, dengan pola kerjasama dan kolaborasi antara dinas PUPR, BBWS Pemali Juana dan BPSDA Seluna.	Pola komunikasi yang lebih baik antara instansi vertikal untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan prinsip kerjasama dan kolaborasi.
6	Jalan Sidorekso – Kedungdowo mengalami rusak parah akibat meluapnya air dikarenakan selokan air di sawah kurang lebar dan tersumbat tanah lumpur dan sampah perlu normalisasi	Peningkatan Jalan Sidorekso – Kedungdowo dengan beton tahun 2022, pengusulan lanjutan pada perubahan tahun 2022 dan murni tahun 2023. Pelaksanaan konstruksi beton lebar 4 meter sepanjang 70 meter	1.Menyediakan prasarana jalan dan bangunan pelengkap yang lebih baik; Peningkatan jalan teranggarkan di APBD Tahun 2023

4. Dinas PKPLH

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Berkaitan dengan pengelolaan persampahan, TPA tanjungrejo sudah mulai penuh, oleh karena itu perlu ada upaya serius penanganan pengelolaan sampah yang dimulai dari hulu, pemilahan plastic organic, non organic, B3	Dalam upaya pengelolaan persampahan kami sudah berupaya melakukan pemilahan sampah dari sumbernya yaitu rumah tangga, dan saat ini kami sudah bekerjasama dengan PT. jarum dalam pengelolaan sampah organic yang kami kirim dari TPS -TPS yang kami miliki untuk diproses menjadi pupuk kompos, sedangkan untuk sampah non organic kami minta untuk dikumpulkan oleh warga untuk dijual sendiri dan hasilnya bisa untuk membayar retribusi pengambilan sampah.untuk sampah B3 kami minta agar penghasil sampah B3 mempunyai TPS penyimpanan limbah B3 dan diambil oleh pihak ketiga yg sudah berizin untuk dikelola.	Usaha-usaha yang telah dilakukan bertujuan untuk mengurangi beban TPA yaitu dengan cara mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke TPA.
2.	Dinas PKPLH agar terlibat aktif dalam penanganan sampah di desa-desa dan tidak terfokus pada perkotaan saja	Dinas PKPLH sudah melakukan fasilitasi optimalisasi pengelolaan sampah di desa/kelurahan yaitu dengan	Adanya peningkatan pembentukan bank sampah baru dari tahun ke tahun dan

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		<p>dikeluarkannya Instruksi Bupati Nomor dengan 660/02/2019 tentang Pembentukan Bank Sampah di Setiap desa/kel dan Sekolah dan Pusat Daur Ulang dan atau TPS Dengan Penerapan Prinsip 3R (Reuse, Recycle, Reduce)</p> <p>Dinas PKPLH juga memberikan fasilitasi sosialisasi pengelolaan sampah di Desa/kel terutama pengurangan sampah dari sumbernya/masyarakat</p> <p>Dengan melakukan pembinaan peningkatan kapasitas komunitas bank sampah agar berperan aktif dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.</p>	<p>diharapkan bank sampah tersebut tetap aktif berperan dalam kegiatan pengelolaan sampah.</p>
3.	<p>Penanganan LPJU dan persampahan mohon untuk ditingkatkan</p>	<p>Sudah dilaksanakan pengadaan material LPJU dan peningkatan sarpras persampahan dengan pengadaan dump truck di tahun 2022 ini</p>	<p>- Dengan adanya material LPJU yang disediakan dapat meningkatkan kualitas pelayanan LPJU terutama dalam perbaikan LPJU.</p> <p>Denganadanya penambahan</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			dump truk sampah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan persampahan
4.	Banyaknya LPJU yang mati dan belum ditangani contoh, LPJU sepanjang jalan lingkaran ngembal terminal banyak yang mati mengakibatkan sering terjadi laka dan rawan kejahatan seolah-olah ini pembiaran dari Dinas terkait.	<p>Sudah dicek oleh Tim LPJU dengan hasil sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terminal - Bangjo Barisan terdapat 23 lampu yang mati 2. Timur Bangjo Barisan - Timur Proliman Tanjung terdapat 19 lampu mati dan 15 yang hidup 3. Lingkaran Loram sampai barat pasar hewan terdapat 28 lampu mati dan 2 hidup 4. Barat pasar hewan - lingkaran gulang terdapat 25 lampu mati dan 3 lampu hidup <p>Kondisi tersebut belum bisa tertangani, material lampu tidak ada.</p>	Kondisi tersebut belum bisa tertangani terkendala dengan material LPJU terutama material lampu tidak ada
5.	Kinerja pada Dinas PKPLH supaya lebih ditingkatkan lagi perumahan dalam penanganan LPJU	Kinerja akan lebih ditingkatkan lagi dalam pelayanan perbaikan LPJU	Kinerja akan lebih ditingkatkan lagi dalam pelayanan perbaikan LPJU
6.	Pohon penghijauan yang sudah rimbun	Kami sudah menginventaris pohon	Dilakukan penebangan terhadap

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	agar dipangkas karena kalau hujan disertai angin bisa membahayakan pengendara	penghijauan yang sudah tua dan rimbun yang akan kami tindaklanjuti untuk ditebang dan dirimbas, untuk yang ditebang kami akan bekerjasama perusahaan dalam hal penanaman kembali pohon penghijauan tersebut.	pohon yang sudah tua dan rimbun
7.	LPJU di sepanjang jalan Jekulo sampai Gondoharum ada beberapa titik yang mati dan juga LPJU arah ke Colo banyak yang mati mohon segera ditangani	<p>Sudah dicek oleh Tim LPJU dengan hasil sebagai berikut :</p> <p>1. LPJU sepanjang jalan Jekulo sampai Gondoharum terdapat titik yang mati karena sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PJU Timur polres terdapat 90 lampu di mana yang mati 55 dan 35 lampu hidup; - Box app Timur polres selatan jalan terdapat rangkaian KWH yang hilang; - Di Pal terakhir perbatasan jalan Kudus-Pati terdapat pal yang doyong serta lampunya juga hilang; - Depan Putra Terban terdapat kabel putus; - Barat Pura bengkel Terban terdapat kabel PJU putus; 	Kondisi tersebut belum bisa tertangani terkendala karena material LPJU terutama material lampu tidak ada, dan truk hidrolis juga rusak/tidak layak serta perlu dilakukan koordinasi dengan PLN yang berkaitan dengan KWH meter yang terbakar.

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		<p>LPJU sepanjang jalan Jekulo Gondoharum belum dapat ditangani karena material LPJU tidak ada selain itu juga mobil truk hidrolis mengalami kerusakan dan masih dalam perbaikan. Sedangkan untuk penanganan rangkaian KWH yang hilang memerlukan koordinasi dengan pihak PLN</p> <p>2. LPJU arah ke colo banyak yang mati belum bisa ditangani karena sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di Jalan arah makam Sunan Muria (pesanggrahan) terdapat KWH meter yang terbakar; <p>PJU selatan kecamatan Dawe terdapat lampu mati</p>	

5. Dinas Sosial P3AP2KB

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Dinas Sosial P3AP2KB Kab. Kudus agar dapat menangani permasalahan yang muncul sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Punk.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menganggarkan untuk dokumen pelaksanaan kegiatan tahun 2023; b. Melakukan pembinaan; c. Melakukan penyantunan 	Mencegah dan mengantisipasi bertambahnya komunitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis
2	Pelayanan terhadap Disabilitas agar dilaksanakan secara sinergitas dengan pihak-pihak terkait, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	Melakukan sosialisasi : pencegahan, pengenalan tindak pidana dan laporan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan	Memenuhi hak penyandang disabilitas diantaranya: hak kewirausahaan, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, pendataan, berekspresi, berkomunikasi.
3	Sangat mendukung pembangunan Rumah Singgah Tahun 2023 sudah teruntuk pengemis, gelandangan yang direncanakan oleh Dinas Sosial P3AP2KB.	Menunggu anggaran	Menampung sementara gepeng, anjal hasil razia kerjasama dengan SatpolPP

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
4	Pemutakhiran data penerima bantuan yang ada di Dinas Sosial P3AP2KB	Menganggarkan di dokumen pelaksanaan kegiatan tahun 2023	Penyaluran bantuan sosial dan bantuan perlindungan lainnya tepat sasaran

6. Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Apresiasi terhadap realisasi penerimaan PAD Tahun Anggaran 2021 yang mencapai 249,19% dan Penyerapan anggaran yang hanya sebesar 20,40% pada tahun 2021 adalah sangat rendah dan perlu koordinasi semua bidang pada OPD tersebut	Melakukan koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan mendasar pada peraturan yang berlaku.	Diperoleh data laporan perkembangan kegiatan per bulan.
2	Terkait dengan hibah untuk pengembangan usaha mikro yang bersumber dari DBHCHT yang tidak dapat dilaksanakan karena administrasi tidak lengkap dan belanja untuk pengadaan tanah dan pembangunan Gedung produksi	- Belanja Hibah kepada Kelompok Wirausaha yang bersumber dari APBD akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata cara Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.	- Tersalurkannya Hibah Uang untuk Bantuan Modal Usaha Kepada Kelompok Wirausaha Tahun 2022 (81 Kelompok Wirausaha) - Akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada tahun berikutnya.

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	yang bersumber dari DBHCHT yang tidak terlaksana karena keterbatasan waktu agar menjadi perhatian dan tidak terulang lagi untuk tahun kedepannya.	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk Pengadaan tanah telah melakukan pembentukan tim verifikasi Data Pengadaan Tanah dan Tim Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Kudus - Untuk Pembangunan Gedung produksi telah dilakukan perencanaan terhadap 3 (tiga) unit pembangunan Gedung produksi di KIHT 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan tanah Tahun Anggaran 2022 untuk SIHT ditiadakan, tetapi pembangunan SIHT tetap dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dengan menggunakan tanah milik Pemkab Kudus yang terletak di Desa Klaling Kecamatan Jekulo. <p>Terbangunnya 3 unit gedung produksi, 1 unit ruang genset, 3 unit renovasi musholla, ruang tunggu laboratorium dan kantin KIHT</p>
3	OPD agar melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas fungsinya, termasuk monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengembangan usaha mikro dan pelatihan di BLK untuk mengetahui perkembangannya dan sejauhmana manfaat dari program/kegiatan tersebut.	Melakukan monitoring dan evaluasi alumni pelatihan secara berkala (per semester)	<ul style="list-style-type: none"> - Diperoleh data dan informasi keterserapan alumni dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), - Diperoleh data dan informasi pembentukan wirausaha baru oleh alumni pelatihan, <p>Diperoleh data dan masukan untuk pengembangan kurikulum pelatihan.</p>

7. Dinas Perhubungan

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Perubahan waktu jam buka tutup di jalan Jenderal Sudirman perlu dikaji ulang untuk mengurai kemacetan terutama di jam-jam sibuk dan pengadaan BUS Sekolah bagi pelajar di wilayah yang terjangkau transportasi, disamping untuk mengurai kemacetan lalu lintas juga solusi penggunaan kendaraan bermotor yang belum saatnya bagi anak sekolah.	Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Forum LLAJ terkait pembahasan Evaluasi Kinerja Jalan Jenderal Sudirman yang bertempat di ruang rapat Dinas Perhubungan yang dihadiri oleh SEKDIN, KABID LLAJ dan POLRES.	Meningkatkan pengawasan serta penindakan pelanggaran rambu lalu lintas Dinas Perhubungan Bersama dengan Satlantas Polres.
2	Pendapatan parkir tidak memenuhi target yang diharapkan untuk itu diperlukan kajian dan evaluasi yang mendalam terkait potensi pendapatan yang sebenarnya dan inovasi terkait pengelolaan parkir seperti penggunaan aplikasi e-parkir sehingga bisa lebih optimal dan dapat meminimalisir adanya kebocoran.	Kami sependapat, untuk tahun ini pendapatan parkir tidak memenuhi target karena terjadi kenaikan target, sedangkan kondisi ekonomi masyarakat yang baru berangsur- angsur pulih pasca covid 19.	Agar target tercapai dan meminimalisir tingkat kebocoran
3.	Menghadapi lebaran untuk tempat parkir agar supaya tertib terutama parkir di area pasar kliwon, Pasar	Kami sependapat, untuk parkir di area pasar kliwon, pasar bitingan merupakan kewenangan Dinas Perdagangan. Untuk kompleks Wisata	Agar arus lalu lintas di depan kompleks wisata menara lancar dan tidak

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Bitingan, Kompleks Wisata Menara Kudus sering terjadi kemacetan.	menara Kudus kami akan melaksanakan penataan parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang menyebabkan kemacetan.	terjadi kemacetan, sehingga tidak mengganggu kenyamanan bagi pengguna jalan.
4	Untuk rambu lalu lintas dan marka jalan perlu ditingkatkan arah dan petunjuk jalan supaya pengguna jalan aman.	Penyediaan perlengkapan jalan pada tahun 2022.	Memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna jalan.

8. Dinas Pertanian dan Pangan

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Penyerapan anggaran yang rendah sebesar 75,51% pada tahun 2021 karena Pandemi Covid 19 maupun karena tidak cukupnya waktu pelaksanaan kegiatan agar menjadi perhatian untuk tahun kedepannya.	Dalam rangka mengantisipasi capaian kegiatan dan serapan anggaran yang rendah Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022 telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan membuat daftar resiko serta tindaklanjut penanganannya.	Penyerapan anggaran yang rendah tahun 2021 lebih disebabkan factor non teknis

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap semua kegiatan secara berkala.	
2	Terkait dengan program/kegiatan bantuan kepada kelompok tani agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui perkembangannya dan sejauhmana manfaat dari program/kegiatan tersebut.	Kegiatan bantuan hibah kepada kelompok tani tahun 2021 berupa: Jaringan irigasi, jalan usaha tani, bantuan budidaya ternak kambing, kalkun, budidaya lele dan pembangunan rumah burung hantu telah dilakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan melalui pendampingan kepada kelompok tani penerima hibah.	Bantuan hibah sangat dirasakan manfaatnya oleh petani dan kegiatan ini mendukung program Bupati

9. Dinas Perdagangan

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Penyerapan anggaran sebesar 83,04% pada tahun anggaran 2021 agar menjadi perhatian untuk tahun kedepannya, rendahnya penyerapan anggaran kegiatan penyedia sarana distribusi perdagangan dan	Melaksanakan koordinasi ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan terkait juknis dalam pelaksanaan Anggaran.	Tujuan: Terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran di tahun berikutnya. Hasil tindak lanjut: -

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	terkait dengan tidak adanya juknis kegiatan yang bersumber dari DAK agar dikoordinasikan dengan dinas/instansi terkait.		
2	Pembinaan dan pengarahan sesuai tupoksi distribusi pupuk dan pestisida	Menambah frekuensi pembinaan dan pengawasan. Evaluasi berkala.	Tujuan: Kelancaran distribusi penyerapan pupuk sesuai alokasi. Hasil tindak lanjut: Tersalurnya pupuk dan pestisida 86,67%

10. Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
1.	<p>Urusan Komunikasi dan Informatika</p> <p>a. Dinas Kominfo hendaknya bisa menjadi rujukan up to date yang mudah diakses masyarakat untuk referensi mendapatkan Dinas antara berita fakta atau hoax.</p> <p>b. Melaksanakan publikasi potensi Kabupaten Kudus utamanya di Bidang Pariwisata.</p>	<p>Dinas Kominfo menyediakan platform resmi untuk bisa diakses masyarakat baik itu website, media luar ruang maupun media social.</p> <p>Publikasi yang dilaksanakan oleh di Dinas Kominfo adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh</p>	<p>Hampir semua masyarakat saat ini telah menggunakan media sosial sebagai media untuk mendapatkan informasi. Belum adanya regulasi yang spesifik terhadap media social memungkinkan dalam media social akan muncul informasi-informasi yang belum tentu benar. Dinas Kominfo</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
		<p>pimpinan daerah yang merupakan pengejawantahan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkab Kudus melalui OPD tidak terkecuali bidang pariwisata.</p>	<p>sebagai perangkat daerah yang salah satu tupoksinya adalah memberikan informasi kepada masyarakat telah menyediakan informasi melalui berbagai media yang dikelola. Melalui media-media inilah diharapkan masyarakat mendapatkan informasi yang update dan valid terutama program-program yang dilaksanakan oleh Pemkab Kudus.</p> <p>Publikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo secara umum terkait dengan seluruh program kegiatan yang dilaksanakan Pemkab termasuk didalamnya bidang pariwisata.</p>
2.	<p>Urusan Persandian Dalam usaha kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan koordinasi yang cepat</p>	<p>Kedepan untuk koordinasi dan surat-menyurat sudah menggunakan aplikasi SRIKANDI yang telah memanfaatkan tanda tangan elektronik, aplikasi tersebut</p>	<p>Koordinasi dan surat menyurat sudah secara online dan menggunakan tanda tangan elektronik dengan tujuan efisiensi waktu.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
	antar pihak. DPRD merekomendasikan agar dirintis kedepannya kordinasi dilakukan secara online.	merupakan aplikasi umum yang ditetapkan oleh MENPAN RB.	

11. Dinas Kkebudayan dan Pariwisata

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
1.	Keberhasilan anggaran TAPD dan Badan Anggaran DPRD untuk meningkatkan performa kinerja Kebudayaan dan Kepariwisata untuk pelestarian kebudayaan dan pemulihan kepariwisataan daerah untuk menunjang peningkatan PAD yang terdampak Pandemi Covid-19	- Anggaran Urusan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.540.898.980,- meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.157.785.295,- Meski terjadi peningkatan, Anggaran ini belum memenuhi kebutuhan dalam rangka pelestarian kebudayaan daerah yang terdiri atas upaya pemajuan obyek kebudayaan dan pelestarian cagar budaya. Apabila dibandingkan Kabupaten/Kota, anggaran ini masih	Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata; mengkomunikasikan DPK dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab; mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan mengembangkan kelembagaan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
		<p>belum cukup untuk memenuhi urusan Kebudayaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Urusan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.540.248.219,- anggaran ini menurun pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.595.726.898,- Anggaran ini belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan urusan pariwisata. - Namun demikian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan anggaran yang tersedia, berupaya untuk melaksanakan kinerja dalam pengembangan kebudayaan dan pengembangan pariwisata dengan sebaik-baiknya. 	<p>kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mesinergikan pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.</p>
2.	<p>Menyusun skala prioritas pembangunan pariwisata di Kabupaten Kudus sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk</p>	<p>Tindak lanjut dari Perda Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus melaksanakan pembangunan</p>	<p>Terciptanya tempat wisata yang ramah, aman, nyaman, dan tetap kondusif.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
	Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035	dengan skala prioritas sesuai dengan pasal 9 yaitu perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a meliputi : DPK,KSPK, dan KPPK. Sesuai Pasal 12 ayat (1) DPK Kota dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi Kecamatan Kota, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Bae, sebagian Kecamatan Gebog yang kami fokuskan pada point a. KSPK Patiayam dan sekitarnya; (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan pembangunan di kawasan Wisata Budaya Situs Purbakala Patiayam saya Terban). Sesuai Pasal 12 ayat (3) DPK Gunung Muria dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi sebagian Kecamatan Dawe, sebagian Kecamatan Gebog yang kami fokuskan pada point a. KSPK Colo sekitarnya;	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
		(Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan pembangunan di Kawasan Wisata Colo yaitu Paguyuban Kopi Muria). Selain itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus juga melaksanakan pembangunan Desa Wisata Kabupaten Kudus.	
3.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Kudus khususnya usaha perhotelan dan hiburan karaoke dengan berkoordinasi bersama dinas/instansi terkait, untuk menciptakan suasana yang kondusif;	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus sudah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap para pengelola usaha pariwisata di Kabupaten Kudus baik Usaha Daya Tarik Wisata, Desa Wisata, usaha perhotelan dan Restoran serta Usaha Pariwisata lainnya. Salah satunya berupa sosialisasi, pelatihan SDM serta monitoring secara rutin mengenai sapta pesona dan prokes. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan kembali di Anggaran Tahun 2023.	Dengan tindak lanjut tersebut diharapkan PKL di Kawasan Obyek Wisata Colo dapat tertata dengan baik.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
4	Penataan PKL di Kawasan obyek wisata Colo;	- Pada tahun 2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus telah membangun 62 kios baru untuk PKL Colo, di bagian bawah terdapat 37 kios, di bagian atas terdapat 25 kios. Kemudian ada 36 kios lama di lantai 1.	Dengan pelaksanaan pendampingan Desa Wisata di Kawasan Muria diharapkan Destinasi Wisata di Kawasan Muria dapat maju.
5	Mendorong majunya destinasi wisata di kawasan Muria.	- Pada tahun 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus melaksanakan pendampingan Desa Wisata di Kawasan Muria meliputi Desa Kajar, Desa Rahtawu, Desa Japan, Desa Ternadi, dan Desa Dukuhwaringin. Serta sering melaksanakan pembinaan di Destinasi Wisata kawasan muria yang dilakukan secara berkala guna mendorong kemajuan Destinasi di Kawasan Muria.	

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
1.	<p>Pandemi Covid - 19 berdampak luas pada masyarakat salah satunya adalah menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat.</p> <p>DPRD merekomendasikan untuk peningkatan alokasi anggaran kegiatan yang mendukung usaha meningkatkan pendapatan keluarga</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa - Penganggaran Jogo Tonggo dan Satgas Desa Penanggulangan Covid - 19. - Bantuan Bahan Pokok Pangan untuk Keluarga yang melaksanakan Isoman. - Bantuan pemulihan bagi warga yang terinfeksi covid - 19. - Penyiapan dan penyediaan Isolasi Mandiri Tingkat Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kemampuan ekonomi Masyarakat - Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT DD bersinergi dengan Dinas Sosial terkait data BTKS untuk menghindari double penerimaan - Sampai dengan saat ini progres 100 % - Terlaksananya tugas dan fungsi Satgas Jogo Tonggo dan Satgas Desa Penanggulangan Covid - 19
2.	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar mempercepat pencairan Bantuan Keuangan kepada Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan •Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersalurnya Bantuan Keuangan Provinsi + Kabupaten 100 % dan terbangunnya Infrastruktur Pemerintah Desa
3.	<p>Untuk Pengisian Perangkat Desa di kembalikan ke Desa agar lebih cepat dalam prosesnya</p>	<p>Sesuai Perda dan Perbup pengisian perangkat Desa dilaksanakan oleh Desa dan bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu Perguruan Tinggi atau Lembaga</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Akan dilaksanakan seleksi pengisian Perangkat Desa - Memenuhi kebutuhan personil Perangkat Desa dengan kualitas SDM sesuai dengan ketentuan.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
		yang berkompeten dan terakreditasi A serta sudah MOU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.	

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
1.	Sistem pelayanan adminduk di Kabupaten Kudus agar tidak berhenti dalam melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Pengembangan/upgrade aplikasi pelayanan online "PAK SEMMOK" (Pelayanan Administrasi Kependudukan Sepenuh Hati Melayani Masyarakat Secara Online di Kabupaten Kudus) guna peningkatan kualitas dan kemudahan mengurus pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kudus melalui daring.	Peningkatan kependudukan dengan melakukan upgrade inovasi pelayanan online "PAK SEMMOK" telah lolos sertifikasi dan di Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kemendagri. Selanjutnya pada tahun 2023 akan dilanjutkan uji keamanan data dan informasi ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mendapatkan ijin pelayanan online yang aman yang sesuai dengan tata kelola Sistem Manajemen Informasi (SMKI)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
			sebagaimana Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan.
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk proaktif dalam rangka pembuatan KIA.	1. Penambahan loket pelayanan pembuatan KIA di Dinas, Kecamatan dan MPP (Mall Pelayanan Publik), cetak mandiri dengan mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) serta jemput bola pelayanan pembuatan KIA di TK, SD, SMP dan balai desa; Melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan mitra yang bergerak dalam bidang rekreasi dan tempat bermain, serta usaha ekonomi lainnya.	Peningkatan kepemilikan KIA yang dilakukan secara berkesinambungan telah menunjukkan hasil yang mencapai dan bahkan melebihi target nasional administrasi kependudukan pada tahun 2022.

14. Satuan Polisi Pamong Praja

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
1.	Untuk Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Agar Menyediakan Sarana Prasarana Penunjang Yang Memadai Serta Termasuk Personil Satpol Pp Yang Kurang Berkompeten.	Kami Sependapat terkait adanya ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan untuk itu kami mohon adanya dukungan anggaran pada Satpol PP.	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat.
2.	Perencanaan Penganggaran Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Agar Disusun Untuk Memenuhi Sarpras Penunjang Kegiatan Satpol PP Yang Belum Ada (Misal: Pengadaan Alat Pelindung Diri) Jangan Hanya Dialokasikan Untuk Perjalanan Dinas.	Penyusunan rencana awal sudah Kita Masukkan	Terpenuninya Sarpras untuk penunjang kegiatan di Satpol PP
3.	Satpol PP Sebagai Ujung Tombak Penegak Perda Harus Bisa Menindak Tegas Pelanggar Perda, Selain Berfungsi Untuk Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, Juga	- Kami Sependat, untuk itu kami mohon dukungan Bapak Ibu Anggota DPRD Kabupaten Kudus untuk ikut terlibat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, agar patuh terhadap Peraturan perundang-	Meningkatkan kesadaran agar patuh terhadap Peraturan perundang-undangan yang ada

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
	Berpengaruh Pada Aspek Pendapatan Daerah.	undangan yang ada dan dukungan untuk kegiatan peningkatan SDM pada pegawai Satpol PP sehingga dapat mendongkrak pendapatan asli daerah.	
4	Penyerapan Anggaran Satpol PP 95 % Agar Ditingkatkan Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Masyarakat. DPRD Merekomendasikan Agar Satpol PP Diberikan Dukungan Semua Pihak Baik Internal Pemerintah, DPRD Dan Kesadaran Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Standart satuan harga yang di indeks SIPD tidak dapat diambil 100 %. Karena ada selisih harga dipasaran dengan yang dianggarkan di SIPD. - Terkait honor, gaji, TPP tidak dapat diambil 100%. Karena dalam penyusunan anggaran ada selisih lebih anggaran dan juga ada mutasi / pegawai yang purnantugas dan tidak di isi, sehingga pengeluaran untuk belanja pegawai jumlahnya berkurang dari yang dianggarkan, itulah yang mengakibatkan terjadi silpa. 	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat

15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
1.	BPBD agar meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan sehingga kegiatan bisa berjalan maksimal.	Penyusunan draf final dokumen RPB Kabupaten Kudus sudah	Komitmen dari pimpinan CPD lintas sektor dalam penanggulangan bencana Kabupaten melalui program kerja dalam dokumen pelaksanaan kegiatan
2.	BPBD dalam menyusun perencanaan dan menetapkan target kegiatan agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat sehingga outcome setiap kegiatan bisa tepat sasaran	Target kegiatan telah ditetapkan dalam penyusunan anggaran sesuai Standar Pelayanan Maksimal (SPM) sesuai permendagri Nomor 101 Tahun 2018.	Perencanaan kegiatan BPBD telah sesuai kebutuhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.
3	Peraturan Bupati terkait SOTK yang menjadi tipe A Badan, harapan anggaran ke depan dapat di usulkan dan penanganan bencana agar bersinergitas dengan relawan BPBD	1.Anggaran Tahun 2023 harus sudah menyesuaikan anggaran Badan; Sinergitas Pemerintah dan Relawan BPBD (masyarakat dan dunia usaha) dalam penanganan bencana harus ditingkatkan.	1.Selama ini anggaran masih kurang maksimal sehingga dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat terdampak bencana belum bisa maksimal. Pemangku kepentingan kurang peduli dengan kemanusiaan sehingga sinergitas dalam penanggulangan bencana kurang maksimal.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
4	Dalam penanggulangan bencana diarahkan ke Desa Mandiri sesuai petunjuk Presiden.	Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kudus tahun 2022 sudah ada 22 Desa	Komitmen dari Pemerintah Desa dan masyarakat untuk menjadi Desa Tangguh Bencana.

16. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
	Urusan Perencanaan		
1	Perencanaan memegang peranan penting dalam mengarahkan pembangunan, DPRD merekomendasikan agar dalam perencanaan melibatkan stakeholder dan mendasarkan pada akurasi data sebagai salah satu instrumen penting dalam pengambilan kebijakan perencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses penyusunan dokumen telah melibatkan stakeholder terkait mulai tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, baik itu melalui forum tatap muka maupun media teknologi informasi. • Pemenuhan ketersediaan data perencanaan pembangunan yang lengkap, up to date dan valid terus diupayakan karena sangat penting dalam perumusan kebijakan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai visi dan misi Daerah. • Tersedianya Satu Data Kabupaten Kudus dalam tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
2	Mensinergikan perencanaan program mulai Kecamatan Kota sampai desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber pembiayaan pembangunan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan pemerintah desa, kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, dan tercermin dalam dokumen perencanaan masing-masing. • Sinergi perencanaan program antar wilayah diperlukan dalam rangka pemerataan pembangunan antar wilayah. Disamping analisis kebutuhan dari perangkat daerah, juga diperlukan aspirasi dan partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder terkait.. 	Hasil pembangunan seyogyanya dapat dinikmati seluruh masyarakat Kabupaten Kudus, baik di desa maupun di wilayah perkotaan.
3	Dana Cukai agar dapat direalisasikan secara maksimal sesuai aturan yang berlaku.	Melaksanakan perencanaan penggunaan DBHCHT sesuai Rancangan Kegiatan dan Penggunaan (RKP) DBHCHT berdasarkan PMK 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau DBHCHT, yang dibahas bersama dengan perwakilan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian	Anggaran DBHCHT dapat terserap 100%

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
		Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Agro Kementerian Perindustrian, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.	
4	Perlu dilaksanakan upaya untuk mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah, karena ketersediaan data informasi belum optimal pada saat data tersebut dibutuhkan dengan alasan tergantung pada support instansi lain.	Mengkoordinasikan pemenuhan Membangun sistem dan substansi ketersediaan data perencanaan pembangunan yang lengkap, up to date dan valid terus diupayakan kepada perangkat daerah sesuai tugas fungsi dan kewenangannya menjadi Satu Data Kabupaten Kudus.	Tersedianya Satu Data Kabupaten Kudus dalam tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
	Urusan Penelitian dan Pengembangan		
5	Litbang sangat dibutuhkan sebagai salah satu unsur acuan dalam pembangunan. DPRD merekomendasikan agar ada koordinasi antara Litbang, pengelola data, dan perencanaan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.	Telah dilaksanakan koordinasi dan sinergitas antara Litbang, Pengelola Data, dan Perencanaan sesuai tupoksi masing-masing dalam proses penyusunan dokumen pembangunan daerah.	Tersedianya dokumen pembangunan Kabupaten Kudus untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

17. Badan Pngelolan Pendapatan dan Aset DAerah

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
1	Apresiasi terhadap realisasi penerimaan pendapatan pada APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 yang mencapai 103%.	Melakukan optimalisasi pendapatan daerah secara berkelanjutan.	Mewujudkan kemandirian keuangan daerah melalui pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
2	<p>Dengan kenaikan kelas tanah di perkotaan maupun di pedesaan berdampak pada kenaikan BPHTP dan khusus pada PBB agar mengambil kebijakan (sesuai dengan kewenangan) sehingga tidak memberatkan masyarakat/wajib pajak.</p>	<p>Melakukan reviu dalam setiap rencana penyesuaian kelas tanah dalam penetapan Nilai Jual Obyek Tanah (NJOP) atas bumi dan bangunan.</p>	<p>Penyesuaian (kenaikan dan/atau penurunan) kelas tanah pada dasarnya memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu meningkatkan manfaat/nilai ekonomi obyek pajak dan mengoptimalkan pendapatan daerah.</p> <p>Dalam melakukan penyesuaian, terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi perekonomian lokas, 2. Harga pasar obyek pajak, dan/atau 3. Kondisi obyek pajak. <p>Selain itu, penyesuaian NJOP juga merupakan salah satu rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih mendekati harga pasar riil. Oleh karena itu, penyesuaian NJOP juga dapat dilakukan secara selektif (atas obyek pajak di kawasan komersial, industri residensial, dan</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
			daerah dengan pertumbuhan yang tinggi) agar tidak memberatkan wajib pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah yang berkelanjutan.

18. Bagian perekonomian Setda

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
1	Terkait dengan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap BUMD oleh Bagian Perekonomian Setda, agar menjadi perhatian terhadap kinerja BUMD, yang tidak memenuhi target pendapatan.	Rencana tindak lanjut yang dilakukan terhadap BUMD yang tidak memenuhi target pendapatan adalah dengan meningkatkan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap BUMD.	Tujuan masalah yang diselesaikan adalah terpenuhinya target pendapatan BUMD pada tahun 2022. Hasil tindak lanjut, proyeksi pendapatan tahun 2022 mengalami kenaikan lebih dari 10% dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2021.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

**4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-
PEMBANTUAN**

Prinsip Keuangan Negara menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Tugas Pembantuan mempunyai peran strategis untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi Pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari APBN yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Pada umumnya dipertanyakan adanya kegiatan yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hal ini disebabkan penulisan nomenklatur Dekonsentrasi selalu dibarengi dengan Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kudus tidak mendapatkan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat (Kementerian) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (NIHIL), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Diterima
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021

NO	K/L	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- NIHIL -											

4.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Informasi adanya anggaran/DIPA tugas pembantuan dari kementerian teknis baru diperoleh pada saat tahun anggaran telah berjalan sehingga jika terdapat pelaksanaan tugas pembantuan maka tidak ada anggaran pendampingan dari APBD.
2. Selama ini kegiatan yang dilaksanakan pada tugas pembantuan belum sinkron dengan prioritas kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
3. Adanya pandemi Covid-19, menjadikan program dan kegiatan oleh Kementerian lebih difokuskan pada upaya penanganan dampak pandemi, sehingga tugas pembantuan yang diberikan ke daerah praktis sangat berkurang, bahkan untuk Kabupaten Kudus tidak diberikan tugas pembantuan..

BAB V PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* yang bersih, transparan dan bertanggung jawab serta mampu memenuhi tantangan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, sebagai lembaga perwakilan dan representasi rakyat di daerah. Disamping LKPJ tersebut Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah dalam bentuk LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), serta menginformasikan kepada Masyarakat melalui media publik dalam bentuk Ringkasan LPPD.

Hasil kinerja Kepala Daerah disajikan secara transparan dan terukur, dalam bentuk capaian indikator makro pembangunan daerah dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen- dokumen perencanaan pembangunan setahun sebelumnya. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya.

Pada kesempatan ini pula, disampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun lalu. Pemerintah Kabupaten Kudus akan lebih berkomitmen dan terus berbenah diri meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Saran, masukan dan kritik yang konstruktif dari DPRD dan *stakeholders* sangat diharapkan demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Demikian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2022 ini disusun dan disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, atas bantuan serta kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih.